Laporan Bersama

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi
Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku dan Poso



PEREMPUAN PENGUNGSI:
BERTAHAN DAN BERJUANG DALAM KETERBATASAN



NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PEREMPUAN PENGUNGSI: BERTAHAN DAN BERJUANG DALAM KETERBATASAN

Laporan Bersama

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi
Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku dan Poso.

Komnas Perempuan, 2007

Perempuan Pengungsi:
Bertahan dan Berjuang Dalam Keterbatasan

ISBN: 978-979-26-7521-4
Cetak I: Juli 2007
Komnas Perempuan

Editor: Andy Yentriyani

Desain Cover & Tata Letak: Saiful Bahri

Foto: Dok. Pendamping

Laporan ini disusun bersama para pendamping pengungsi di Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku dan Poso. Masukan juga diberikan oleh Selviana Yolanda & Suraiya Ramli, khususnya mengenai pengungsi Poso & Ambon. Laporan dicetak dengan dukungan Ford Foundation.

Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari No. 4B
Jakarta, 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3922
mail@komnasperempuan.or.id
www.komnasperempuan.or.id

Sekapur Sirih

Buku ini merupakan laporan bersama hasil ujicoba dari format pendokumentasian kondisi pemenuhan HAM perempuan di pengungsian yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan bersama 15 rekan pendamping pengungsi di 7 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Nias), Jogjakarta, Jawa Timur (Porong-Sidoarjo), Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Tengah (Poso) sejak akhir 2006 sampai dengan Maret 2007. Ujicoba dan proses pengembangan format dirasakan sebagai kebutuhan bersama, mengingat inisiatif serupa ini belum pernah ada dan akibatnya, berbagai persoalan perempuan di pengungsian seringkali terabaikan.

Inisiatif untuk mengembangkan format pendokumentasian tentang kondisi pemenuhan HAM perempuan di pengungsian dimotori oleh Komnas Perempuan pasca laporan pertama Pelapor Khusus untuk Aceh yang bertajuk "Sebagai Korban, Juga Survivors". Laporan ini menyingkap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan pengungsi sehari-harinya, baik dipicu oleh buruknya fasilitas di pengungsian, pemiskinan pengungsi, korupsi yang merajalela, ataupun praktek sosial budaya dan sikap masyarakat yang masih melecehkan perempuan. Ketajaman laporan tak lepas dari format yang digunakan, yaitu hasil rumusan bersama dengan 25 dokumentator yang adalah juga perempuan pengungsi dan 5 aktivis perempuan yang sebelumnya mempunyai aktivitas dalam pendamping di wilayah pengungsian.

Berbekal pengalaman dokumentasi ini, Gugus Kerja Aceh Komnas Perempuan, mengajak rekan-rekan pendamping dari 7 provinsi untuk berbagi pengalaman mereka melakukan pendokumentasian HAM perempuan di kelompok dampingan masing-masing. Selain itu, diskusi juga diperkaya oleh masukan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jendral Bantuan Sosial Departemen Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Format yang diujicobakan, dan kini telah diterbitkan oleh Komnas Perempuan, adalah hasil sintesis dari proses refleksi pembelajaran dan berbagai pengalaman dari forum yang berjalan sejak akhir tahun 2006.

Sementara format pendokumentasian diharapkan dapat menjadi acuan bersama untuk melakukan pemantauan berkala, publikasi laporan ini dimaksudkan untuk menguatkan upaya bersama dalam memajukan kondisi pemenuhan HAM perempuan di pengungsian. Laporan ini menggambarkan berbagai persoalan perempuan di pengungsian akibat bencana maupun konflik bersenjata. Panjangnya masa pengungsian tak pelak menambah beban persoalan bagi perempuan. Namun sejak awal, perempuan selalu menunjukkan daya juang tak berujung untuk kelangsungan hidup dirinya, keluarga dan komunitas. Dengan informasi yang lengkap, pihak-pihak yang bekerja dan berwewenang untuk peningkatan kualitas hidup pengungsi dan yang berupaya untuk penegakan HAM dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penanganan persoalan pengungsi. Atas dasar inilah, laporan bersama ini kami terbitkan, selain tentunya juga sebagai upaya mewujudkan komitmen untuk terus membangun sebuah pertanggunggugatan publik atas apa yang telah dilakukan.

Selamat membaca!

Pelapor Khusus untuk Aceh
Agustus 2007

Daftar Isi

Sekapur Sirih ____ iii

Daftar Isi ____ v

Bagian I ____ 1

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan
Di Pengungsian Akibat Bencana Alam dan Kelalaian Industri

Haruskah Kami Tetap Bertahan Di Pengungsian? ____ 3
Laporan Aceh: Sari Afrianti, Safiah T.A, & Irawati

Rumah Permanen Impian Pengungsi ____ 9
Laporan Nias: Misran Lubis

Perempuan Pengungsi Pasca Gempa ____ 17
Laporan Jogjakarta: Bonnie Kertaredja & Johan Dwi Bowo Santosa

Perempuan Pengungsi Di Pasar Porong Sidoarjo ____ 25
Laporan Jawa Timur: Iva Hasanah

Bagian II ____ 35

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan
Di Pengungsian Akibat Konflik Bersenjata

Perempuan Pengungsi Masih Terlupakan ____ 37
Laporan Nusa Tenggara Timur: Meri Djami, Maria Filiana Tahu, & Sr. Sesilia SpS

Perempuan Menderita Yang Menghidupkan:
Potret Parampuang Bacarita Tentang Persoalannya ____ 53
Laporan Maluku: Baihajar Tualeka, Sr. Brigitta Renyaan PBHK & Rosa Pentury

Poso Dalam Potret Kehidupan Perempuan Pengungsi ____ 65
Laporan Poso: Heidy M & Alex Patambo

Lampiran ____ 75

Aceh
Jogjakarta
Nusa Tenggara Timur
Maluku

Tentang Komnas Perempuan ____ 135



I

BAGIAN I

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Di Pengungsian Akibat Bencana Alam dan Kelalaian Industri

Bagian ini terdiri dari empat laporan, yaitu dari Aceh pasca tsunami Desember 2004, Nias pasca gempa bumi Maret 2005, Jogjakarta pasca gempa Mei 2006 dan Porong-Sidoarjo pasca luapan lumpur Mei 2006. Masing-masing laporan memaparkan kondisi terkini dari perempuan pengungsi, berbagai persoalan yang mereka hadapi dan upaya mereka untuk bangkit.

Keempat laporan memberikan perhatian pada identifikasi kelompok perempuan yang rentan dalam memperoleh akses bantuan dan layanan dasar. Diskriminasi tampaknya terutama terjadi terhadap perempuan tua, janda dan perempuan yang berstatus bukan istri pertama. Rasa aman dan nyaman perempuan untuk beraktivitas dan berpergian sendirian juga menjadi perhatian dari laporan ini. Bagi perempuan muda, rasa aman terkait sangat dengan kondisi infrastruktur seperti kualitas barak, lokasi MCK dan fasilitas penerangan. Kondisi kemiskinan dan tidak adanya penegakan hukum terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan juga ikut meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan.

Beranjak dari posisi pengungsi dan memiliki rumah baru adalah harapan para perempuan pengungsi. Dengan harapan ini, mereka berjuang melangsungkan hidup keluarga yang hancur akibat bencana sampai saatnya mereka pindah dari lokasi pengungsian yang serba terbatas.

Laporan Aceh

Pengungsian di Barak Musa-Pidie, Barak Lhong Raya-Pidie
dan Kamp Bantaran Sungai Alue Naga-Banda Aceh

HARUSKAH KAMI TETAP BERTAHAN DI PENGUNGSIAN?

* Sari Afrianti, Safiah T. A. & Irawati

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pengungsian di Aceh yang kami fokuskan dalam laporan ini adalah pengungsian akibat bencana alam Tsunami pada 26 Desember 2004. Setelah dua tahun lebih bencana alam, kondisi di pengungsian Aceh saat ini sangat memprihatinkan. Dalam serba keterbatasan fasilitas, mereka dipaksa untuk mampu bertahan hidup di pengungsian karena tempat untuk mereka tinggal sudah tidak ada lagi.

Dari begitu banyak titik pengungsian di Aceh, ada tiga tempat pengungsian yang menjadi daerah pantauan kami, yaitu (a) Barak Musa, Desa Musa, Kecamatan Bandar Baru, Pidie, (b) Barak Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, dan (c) Kamp Bantaran Sungai Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh. Dua lokasi pertama menempati barak yang disediakan pemerintah, sedangkan satu lagi masih tinggal di rumah darurat yang dibuat dari puing-puing tsunami.



Pertemuan pengungsi di Barak Musa, Pidie.

Jumlah keluarga pengungsi yang terdata di Barak Musa adalah 137 KK, Barak Lhong Raya 60 KK, dan Kamp Bantaran Sungai Alue Naga 80 KK. Data jumlah jiwa sudah tidak ada karena banyak pengungsi sudah kembali ke daerah asal. Ada juga yang sudah keluar dari pengungsian dengan alasan menikah atau mencari pekerjaan di daerah lain.

1. 2. Kondisi Umum

Kondisi perekonomian di pengungsian Aceh sudah mulai membaik, karena pengungsi sudah memulai bekerja sesuai dengan profesi masing-masing dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Hanya saja, sebagian pengungsi belum bisa melakukan aktivitas perekonomian sebelumnya karena lokasi pengungsian jauh dari tempat mereka bekerja, atau lahan pekerjaan yang dulunya mereka geluti juga sudah tidak ada, misalnya karena lahan pertanian mereka telah menjadi bagian dari lautan pasca tsunami.

1. 3. Tantangan Melakukan Pemantauan

Karena kondisi pengungsi Aceh sudah sangat tergantung dengan bantuan, dan daerah yang dipantau adalah bukan daerah dampingan lembaga kami bekerja, maka banyak pengungsi berharap akan mendapatkan bantuan materi lewat pendokumentasian ini. Harapan ini menyebabkan pengungsi tidak bersedia memberikan informasi, dan bukan tidak mungkin dokumentator diusir dari tempat pengungsian, ketika mereka memperoleh penjelasan bahwa bantuan tidak serta merta datang bersama pendokumentasian ini. Informasi tentang jumlah pengungsi maupun tentang kondisi lapangan di pengungsian juga sulit diperoleh karena keterbatasan waktu untuk berjumpa dengan koordinator pengungsi.

2. HASIL PEMANTAUAN

2. 1. Akses pada Bantuan Pokok

Kebutuhan pokok pengungsi saat ini sudah tidak banyak terpenuhi lagi. Pemerintah mengalokasikan bantuan pokok hanya untuk waktu dua tahun, walaupun pada kenyataannya setelah dua tahun lebih pengungsi di Aceh masih ada dan masih membutuhkan bantuan pokok. Bantuan yang saat ini masih tersedia di Barak Musa dan Kamp Alue Naga hanya beras 10 kg/jiwa/bulan, mi instan 5 bungkus/jiwa/bulan, dan minyak goreng 6 ons/jiwa/bulan. Untuk pengungsi Barak Lhong Raya, yang tersedia hanya beras dan minyak goreng saja dengan jumlah yang sama.

Khusus di Barak Lhong Raya, akses air bersih sangat terbatas. Air yang tersedia hanya cukup untuk memasak saja dan untuk mendapatkannya juga sangat sulit. Setiap orang harus mengantri kira-kira 30 menit untuk mendapatkan satu ember kecil. Itu pun kalau berhasil menyedot dengan mulut agar air mau keluar dari selang. Karena peran gendernya, antri air menjadi kerja perempuan.

Tempat tinggal pengungsi dalam bentuk barak masih tersedia sampai saat ini. Hanya saja, kondisinya sudah tidak layak lagi. Misalnya, papan yang sudah rapuh sehingga dapat membuat orang jatuh. Kondisi ini sangat dikhawatirkan oleh perempuan pengungsi karena mereka lebih sering berada di barak daripada laki-laki. Selain itu, ada banyak dinding yang sudah berlubang sehingga perempuan mudah diintip. Bagi pengungsi yang sudah mendapatkan bantuan rumah, mereka tidak dibolehkan lagi untuk tetap tinggal di barak karena barak tersebut akan segera dibongkar atau akan ditempati oleh pengungsi lain yang masih tinggal di tenda. Peraturan ini sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi rumah baru tersebut layak atau tidak untuk didiami.



(Searah jarum jam): Tiga generasi di Barak Lhong Raya; Perempuan menyedot air bersih dengan mulut di Barak Lhong Raya; Perempuan pengungsi pengrajin tikar di Pidie; Perempuan mencuci pakaian di Kamp Alue Naga.

2. 2. Akses pada Layanan Dasar

Di Barak Musa, masih tersedia pelayanan kesehatan walaupun pelayanannya tidak maksimal, seperti tidak adanya pelayanan untuk ibu melahirkan dan menyusui. Ruang khusus pemeriksaan untuk perempuan tidak tersedia sejak mereka mengungsi. Obat-obatan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi khususnya alat kontrasepsi sama sekali tidak tersedia. Karenanya, pengungsi harus membeli obat-obatan dan mencari layanan kesehatan reproduksi di luar pengungsian.

Di Barak Lhong Raya, layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, masih tersedia tetapi lokasinya tidak berada di sekitar lokasi pengungsian. Untuk mendapatkan layanan tersebut, mereka harus menggunakan alat transportasi umum. Waktu pelayanan hanya pada siang hari saja. Sementara itu, di lokasi Kamp Alue Naga, semua pelayanan kesehatan tidak tersedia dan pengungsi harus mencari keluar lokasi pengungsian dan harus membayar.

Layanan pendidikan formal dan non formal tidak tersedia baik di Barak Musa maupun Kamp Alue Naga meskipun pemerintah berjanji akan menyediakan layanan tersebut. Untuk memperoleh pendidikan formal, pengungsi di Kamp Alue Naga harus berjalan kaki kira-kira 3 km sebelum bisa

meneruskan perjalanan dengan angkutan umum dan harus membayar sekolah mereka sendiri. Di Barak Lhong Raya, pendidikan formal yang tersedia hanya tingkat SD. Untuk tingkat SMP dan SMU, pengungsi harus bersekolah di luar pengungsian dan menggunakan transportasi umum untuk mencapai sekolah. Bagi mereka yang tidak bersekolah, tidak tersedia layanan pendidikan non formal.

Tidak seperti di Barak Lhong Raya, layanan ekonomi belum tersedia di Barak Musa. Saat ini, pengembangan layanan baru memasuki tahap pendataan oleh lembaga lokal (PASKA Pidie). Di Alue Naga, layanan ini juga belum tersedia.

2. 3. Akses pada Fasilitas Bersama

Seluruh fasilitas bersama yang tersedia di tempat pengungsian dapat diakses oleh perempuan. Hanya saja, sebagian besar fasilitas seperti MCK, dapur umum, dan kamar barak dan rumah darurat tidak memadai.

2. 4. Akses pada Pembuatan Keputusan

Perempuan pengungsi di Barak Musa aktif dan punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dalam berbagai pertemuan, misalnya tentang cara pembagian bantuan, prioritas yang berhak mendapatkan bantuan dan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Pada umumnya perempuan kepala keluarga cepat memperoleh bantuan rumah. Bahkan, jika ada pertemuan yang diselenggarakan tanpa melibatkan perempuan, maka perempuan pengungsi di Barak Musa ini mengambil inisiatif untuk bermusyawarah sesama perempuan tentang keputusan yang telah diambil. Perempuan akan menyuarakan kepentingannya kepada warga pengungsi lainnya bila ada keberatan tentang keputusan tersebut.

Di dua titik pengungsian yang lain, sebagian besar perempuan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam rapat dan pembuatan keputusan di pengungsian. Proses pembuatan keputusan hanya melibatkan laki-laki. Perempuan yang tidak memiliki suami hanya mendengarkan informasi dari koordinator barak atau orang lain tentang keputusan yang diambil.

2. 5. Keterlibatan dalam Aktivitas di Pengungsian

Keterlibatan aktif perempuan dalam aktivitas di pengungsian tampak di Barak Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie, tetapi tidak di kedua titik pengungsian lainnya. Kegiatan yang diikuti perempuan pengungsi di Barak Musa antara lain pengajian, rapat tentang kondisi pengungsian, gotong royong dan kegiatan PKK.

Di beberapa lokasi barak di Pidie, pembongkaran barak dilakukan oleh perempuan. Menurut pengungsi perempuan, mereka lebih mampu dalam menghadapi persoalan yang datang dari luar terkait dengan keputusan mereka untuk membongkar barak.

2. 6. Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Karena kondisi bangunan di barak dan di kamp tidak bagus, pengungsi perempuan merasa tidak aman dalam menggunakan fasilitas yang ada. Misalnya saja, kondisi MCK yang kurang tertutup sehingga rawan bagi perempuan untuk diintip oleh orang lain dan kondisi kamar barak yang tidak tertutup sampai ke atas sehingga perempuan merasa tidak nyaman bila berada sendirian di dalam kamar. Di Barak Lhong Raya, kondisi ini disikapi oleh perempuan pengungsi dengan menutupnya dengan tripleks.









(Dari atas ke bawah): Mengambil bantuan, Pidie; Mengembangkan usaha ikan asin, Pidie; Sumur untuk pengungsi; Pertemuan kelompok perempuan di Lhong Raya, Banda Aceh.

3. MASALAH, POLA PENANGANAN DAN KEKUATAN PEREMPUAN

3. 1. Masalah Utama Perempuan di Pengungsian

Dari hasil pemantauan di tiga titik pengungsian tersebut di atas, terdapat sejumlah persoalan utama yang dihadapi perempuan di pengungsian yaitu:

a. Tidak adanya bantuan untuk ibu hamil dan melahirkan. Ketika waktunya melahirkan, perempuan pengungsi harus mencari pertolongan dari luar tempat pengungsian dan harus mengeluarkan biaya yang mahal.
b. Air bersih sulit diperoleh di Barak Lhong Raya. Karena peran gendernya, perempuan harus antri lama dan menyedot selang air dengan mulut untuk memperoleh air bersih untuk memasak setiap harinya.
c. Bantuan pokok sudah hampir tidak ada sementara pengungsi masih bertahan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka akibat hilangnya mata pencaharian pasca tsunami.
d. Kondisi kamar barak yang papannya rapuh, dinding berlubang dan tidak tertutup sampai ke atas serta kondisi MCK yang tidak tertutup menyebabkan perempuan merasa tidak aman setiap kali menggunakan fasilitas tersebut, terutama bila sendirian.
e. Kecuali di Barak Musa, perempuan pengungsi di Barak Lhong Raya dan Alue Naga hampir tidak pernah memiliki akses untuk terlibat dalam perumusan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di tempat pengungsian mereka.



Mengolah ketrampilan membuat hiasan dari kertas, Pidie.



Mencuci di Barak Lhong Raya.

3. 2. Pola Penanganan

Program rehabilitasi dan rekonstruksi difasilitasi oleh BRR dan terutama oleh lembaga-lembaga lainnya. Pada dua tahun pertama, sebagian besar persoalan pengungsi sudah tertangani meskipun belum maksimal. Sesudah dua tahun, jumlah bantuan dan layanan yang tersedia bagi pengungsi berkurang drastis sehingga seolah-olah pengungsi yang tertinggal terabaikan.

3. 3. Kekuatan Perempuan

Dalam kondisi serba keterbatasan, perempuan pengungsi menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

4. REKOMENDASI

Untuk menyikapi persoalan pengungsi yang tersisa di tempat-tempat pengungsian:

a. Pemerintah harus mendata kembali jumlah pengungsi yang masih tinggal di pengungsian dan juga bersama-sama pengungsi, merumuskan ulang kebutuhan mereka. Pemerintah juga harus memberikan kejelasan tentang bantuan yang disalurkan untuk pengungsi.
b. Pemerintah dan lembaga pendamping memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan pengungsi, termasuk didalamnya kebutuhan spesifik untuk perempuan dan anak.
c. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan perempuan mulai dari perencanaan sampai selesai pelaksanaan. Pelibatan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan cara memberikan ruang kepada perempuan untuk mengeluarkan pendapat.
d. Pemerintah mempersiapkan kebijakan dan sistem yang responsif untuk menghadapi masa tanggap darurat dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

RUMAH PERMANEN IMPIAN PENGUNGSI

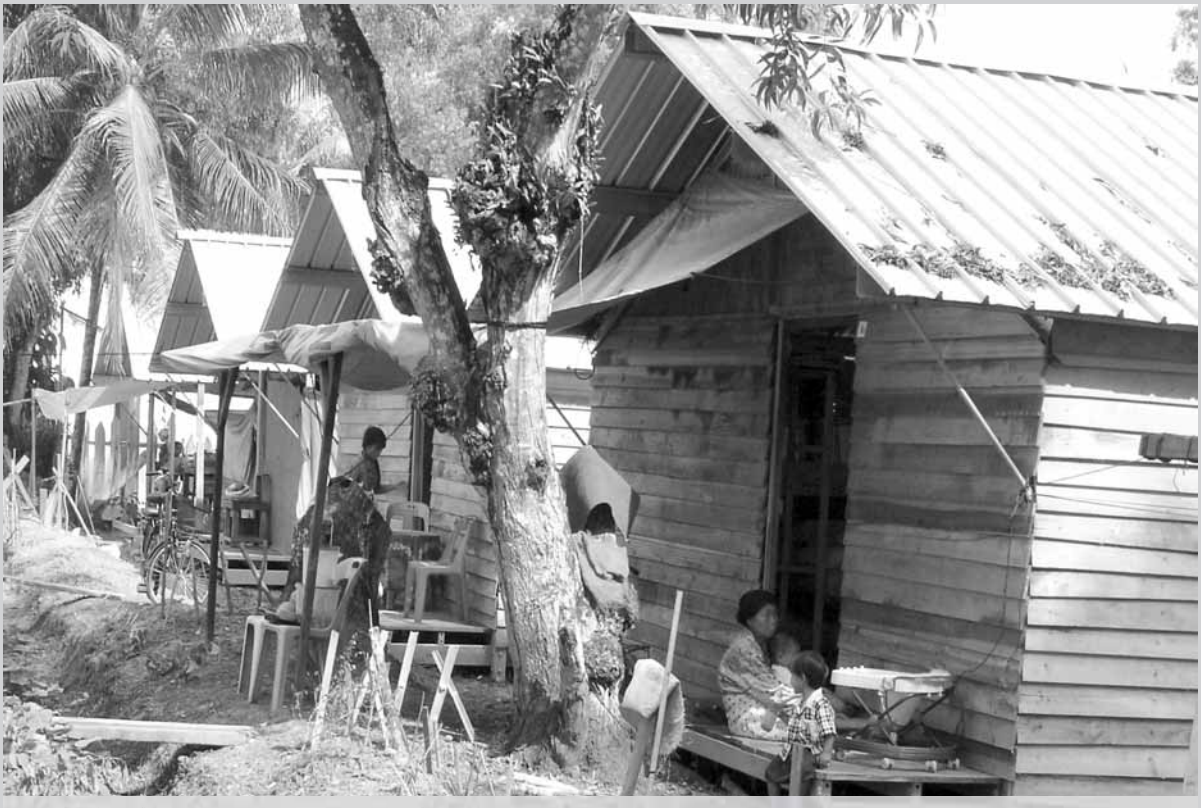
* Misran Lubis

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Pengungsian

Pulau Nias terletak di sebelah barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Nias dengan luas 5.625 km2 merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan terdiri dari dua kabupaten, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Jumlah penduduk pulau Nias adalah 712.075 jiwa- 351.992 laki-laki dan 360.083 perempuan- dengan komposisi etnis utama Nias, Batak, Melayu/Minang dan Cina.

Secara geografis, pulau Nias termasuk kepulauan yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami dan tanah longsor. Saat tsunami terjadi akibat gempa bumi berkekuatan 8,9 SR di Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember 2004, wilayah bagian barat pulau Nias yaitu Kecamatan Sirombu dan Kecamatan Mandrehe, mengalami kerusakan fisik dan korban jiwa. Sekitar 300 orang meninggal



Suasana barak pengungsian Kamp Pramuka.

dan lebih dari 2000 orang mengungsi. Belum selesai penanganan korban akibat tsunami, pulau Nias kembali dilanda bencana yang lebih parah. Gempa bumi berukuran 8,7 skala Richter mengguncang permukaan Nias pada tengah malam 28 Maret 2005. Gempa tersebut mengakibatkan 848 orang meninggal dunia dan 6.000 penduduk lainnya luka-luka. Selain itu, antara 10.000 – 20.000 penduduk terpaksa meninggalkan kepulauan Nias dan sekitar 70.000 penduduk yang petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian mereka.

Jumlah pengungsi pun bertambah mencapai lebih 250.626 jiwa (52,7) di Kabupaten Nias dan 136.476 jiwa (50,5%) di Nias Selatan. Lebih dari setengah adalah perempuan pengungsi (127.256 jiwa di Nias dan 68.417 jiwa di Nias Selatan). Setelah dua tahun, sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing atau menempati rumah baru/permanen bantuan BRR maupun lembaga kemanusiaan yang bekerja di Nias. Namun, menurut catatan BRR NAD - Nias masih ada 346 keluarga yang mengungsi dan menempati *shelter*/barak yang tersebar di 14 lokasi di Nias dan Nias Selatan.

Warga pengungsi pada umumnya adalah masyarakat urban yang berasal dari berbagai desa di pulau dan kemudian tinggal di Kota Gunung Sitoli dengan menyewa rumah atau membuat rumah kecil/gubuk di pinggir pantai. Sumber pencaharian pengungsi sebelum terjadinya bencana alam pada umumnya adalah nelayan tradisional (hampir 80%) dan sebagian kecil pedagang asongan dan buruh bangunan. Setelah terjadinya bencana, mereka kehilangan aset sumber perekonomian dan juga tempat tinggal. Untuk saat ini, mereka bekerja "mocok-mocok" (bekerja secara serabutan) seperti buruh bangunan dan supir. Ada pula yang kembali menjadi nelayan, tetapi tidak bekerja sendiri melainkan menjadi pekerja kapal nelayan milik orang lain (nelayan upahan).

1. 2. Kamp Pramuka

Salah satu lokasi pengungsian adalah Kamp Pramuka yang terletak di lahan milik pemerintah yang dikelola oleh Kwarcab Pramuka sebagai tempat perkemahan. Pemenuhan kebutuhan pengungsi melibatkan beberapa pihak yaitu: penyediaan *shelter*/barak oleh IFRC dan Samaritan Purs, logistik/sembako oleh WFP, air dan sanitasi oleh OXFAM, Pendidikan dan Kesehatan oleh PKPA dan lahan oleh Pemerintah. Pengungsi di Barak Kamp Pramuka (Lamcadika) Desa Moawo Gunung Sitoli, berasal dari 4 kelompok desa yaitu pengungsi asal Pantai Jln. Kelapa yang berjumlah 30 keluarga atau 150 jiwa dan sebelumnya tinggal di Pengungsian Supomo, pengungsi asal GPIsa sebanyak 15 keluarga atau 64 jiwa, asal Komplek Mawar sebanyak 9 keluarga atau 53 jiwa dan asal Komplek Ampera 3 keluarga atau 20 jiwa. Pada awalnya mereka menempati tenda-tenda darurat di lahan milik masyarakat. Karena kondisi tenda yang sudah rusak dan pemilik lahan sudah tidak mengizinkan adanya pengungsian maka seluruh pengungsi dipindahkan ke satu lokasi barak penampungan, yaitu di Kamp Pramuka.

Tidak ada penolakan dari masyarakat lokal atas kehadiran pengungsi di Kamp Pramuka, Desa Moawo, karena lahan yang digunakan adalah milik pemerintah. Masyarakat lokal justru banyak membantu kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh pengungsi dengan memperbolehkan pengungsi mengambil air di sumur warga lokal dan aliran listrik. Pengungsi yang tidak memiliki pekerjaan oleh warga setempat diajak untuk bekerja sebagai buruh bangunan atau anggota kapal nelayan. Masyarakat lokal juga merasa diuntungkan karena dapat mengakses fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di kamp pengungsian.



Pertemuan dengan pendamping.



Suasana di dalam tenda.

1. 3. Tantangan Melakukan Pemantauan

Kamp Pramuka dipilih sebagai daerah pemantauan karena di sana tinggal pengungsi dari Kelurahan Ilir, yang telah didampingi PKPA sejak awal bencana. Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pemantauan adalah ketidaksiapan pemantauan memenuhi keinginan pengungsi. Pengungsi berpandangan bahwa kebutuhan mendasar dan mendesak bagi mereka adalah bantuan sembako dan rumah permanen, sementara kehadiran PKPA di lokasi pengungsian adalah untuk pemantauan dan penyelenggaraan pendidikan non formal dan kesehatan dasar. Pengungsi bahkan pernah merusak fasilitas belajar yang disediakan oleh PKPA karena kesal terhadap BRR dan pemerintah daerah yang tidak segera merealisasikan perumahan permanen untuk mereka.

Untuk mengatasi tantangan dari pengungsi PKPA membuat dialog untuk menjelaskan posisi dan peran masing-masing lembaga serta jalur advokasi yang perlu dilakukan oleh pengungsi untuk memperjuangkan haknya. Dialog yang digagas ini dapat memperkuat informasi dan pemahaman pengungsi dan mengurangi tantangan bagi proses pemantauan. Dialog untuk mengurangi tantangan tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga dilakukan secara informal dalam pendampingan yang reguler. Semua dilakukan PKPA dengan tetap konsisten pada tujuan utama aktivitas program di pengungsian yaitu untuk layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

2. HASIL PEMANTAUAN

2. 1. Kondisi HAM Perempuan

Hidup di pengungsian dan tinggal di barak dirasakan sangat berat bagi kaum perempuan, namun tidak ada pilihan lain kecuali bertahan dengan kondisi serba terbatas. Barak yang sempit dengan ukuran 4 x 3 meter harus menampung seluruh anggota keluarga dengan jumlah rata-rata 5-9 orang. Ruang barak dibagi untuk dapur, tempat istirahat dan lain-lain. Dengan kondisi ruang tersebut sangat tidak mungkin bagi seorang perempuan memiliki ruang privat.

Kondisi barak memaksa pengungsi untuk mengasingkan anak perempuan yang sudah "gadis" (usia di atas 15 tahun dan belum menikah) untuk tinggal bersama saudara yang lain, baik di Nias maupun di luar Nias. Anak gadis dianggap tidak aman tinggal di tenda/barak karena sering mengalami pelecehan, seperti "diintip" dan "diganggu' oleh laki-laki muda di sekitar barak. Hanya pada siang hari anak gadis mereka kadang-kadang datang ke pengungsian.

Setelah hampir 1,5 tahun Kamp Pramuka berdiri, berbagai masalah mulai muncul dan mengganggu kenyamanan pengungsi seperti isu penggusuran oleh pemerintah, suplai bantuan pokok yang dihentikan, air dari sumur bor keruh dan volumenya kecil, dan saluran air limbah yang tidak lancar sehingga menimbulkan banjir dan becek saat musim hujan. Kondisi barak yang buruk menyebabkan pengungsi, terutama anak-anak, terserang penyakit seperti gatal-gatal, ISPA dan Malaria.

Pada awal bencana akses bantuan, distribusi dan pengorganisasian pengungsi hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki saja. Sifat bantuan juga sangat umum dan terbatas pada kebutuhan dasar makanan, tenda dan air. Secara perlahan-lahan, lembaga kemanusiaan yang mendampingi pengungsi seperti PKPA, YEU dan OXFAM mulai melibatkan perempuan dalam diskusi-diskusi pengungsi untuk menentukan berbagai kebutuhan dan fasilitas pengungsi. Hanya saja, akses bantuan yang lebih formal yaitu ke badan Satkorlak, BRR dan instansi pemerintah hanya boleh diwakili oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat dan seluruhnya adalah laki-laki. Perempuan pengungsi hanya bisa menunggu dan mengelola bantuan di kamp. Akibatnya, jenis bantuan khusus yang sangat dibutuhkan perempuan pengungsi, seperti kebutuhan pembalut dan pakaian dalam hanya diperoleh secara sekali-sekali dari lembaga kemanusian dan instansi resmi pemerintahan.

Upaya Bertahan Hidup :

- Mengatasi keterbatasan ekonomi dan fasilitas di barak, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan. Mereka hanya menunggu suami pulang dari kerja dengan harapan membawa uang. Mereka memang pernah memperoleh bantuan dana untuk modal usaha rumah tangga, namun karena tidak ada pembinaan dan pendampingan, modal yang diperoleh habis untuk menutupi keperluan sehari-hari. Kondisi ini berbeda dengan perempuan di pedesaan karena mereka masih bisa pergi ke ladang atau sawah.
- Sebagian dari perempuan di pengungsian mencoba untuk membuka usaha dagang jajanan dan keperluan rumah tangga sehari-hari, namun jumlahnya tidak banyak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kejenuhan dan menambah penghasilan keluarga.

2. 2. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Perempuan di Pengungsian:

Masalah persalinan: banyak perempuan yang hamil dan melahirkan tetapi tidak ada bantuan persalinan yang disediakan dari pemerintah atau pihak lain. Seorang pengungsi berkata, *"kami harus mengurus biaya persalinan sendiri, padahal kami tidak ada uang untuk membayar rumah sakit dan membeli kebutuhan anak."*

Masalah keuangan: setelah bantuan sembako diputus oleh WFP dan Pemerintah pada akhir Desember 2006, keadaan semakin sulit. Uang yang diperoleh suami dari bekerja tidak cukup untuk membeli kebutuhan makanan keluarga, uang sekolah, bayar listrik dll. *"Pekerjaan suami kami tidak ada yang tetap atau kerja "mocok-mocok" (kadang ada pekerjaan dan terkadang tidak). Untuk kembali melaut belum ada alat dan letak barak kami jauh dengan laut,"* ujar seorang perempuan pengungsi.

Masalah sekolah anak: *"kami sangat khawatir terhadap keselamatan anak kami ketika pergi sekolah [yang] letaknya sangat jauh dari kamp pengungsi, kira-kira 7 km. Di jalan banyak kendaraan sementara angkutan umum*

kadang-kadang menolak untuk membawa anak-anak kami karena ongkosnya lebih murah dibandingkan ongkos penumpang umum. Jika terjadi sesuatu terhadap anak kami, pasti kami akan dimarahi bapak [suami]. Urusan anak sekolah, mulai dari pergi sampai anak pulang, hampir seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab ibu."

2. 3. Kasus-kasus Kekerasan

Ada lima kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pengungsi yang tercatat selama pemantauan, mulai November 2006 hingga Februari 2007, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lokasi pengungsian. Dua diantaranya adalah kasus kekerasan fisik terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami. Alasan terjadinya kekerasan hampir sama yaitu soal uang belanja yang tidak cukup dan tuduhan suami bahwa istri tidak menjaga anak di rumah dengan baik. Terkadang si istri tidak tahu pasti alasan suami marah dan memukulnya. Saat pulang kerja, kadang-kadang emosi suami tidak terkontrol dan tiba-tiba membentak saat istri menanyakan sesuatu dan kemudian memukul.

Tercatat pula satu kasus pelecehan seksual di pengungsian. Pelecehan tersebut terjadi ketika korban masih mengungsi di tenda darurat Kamp Supomo. Korban adalah perempuan berusia 19 tahun. Ia didatangi laki-laki yang berasal dari kamp pengungsian yang sama. Pada awalnya, laki-laki itu hanya mengajak ngobrol biasa. Setelah waktu semakin malam, sekitar pukul satu dini hari, laki-laki itu mulai "memegang-megang" tubuh korban. Kejadian tidak berlanjut karena korban lari dan pindah tenda. Sejak kejadian tersebut hingga di pengungsian baru, tidak ada "anak gadis" yang tinggal di pengungsian.

Perempuan muda atau "anak gadis" yang dititipkan di rumah famili atau saudara yang tidak mengungsi ternyata tidak selalu aman dari kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Seorang anak perempuan siswa kelas 4 SD berusia 14 tahun mengalami perkosaan berulangkali oleh kakak iparnya (suami kakak kandung korban) yang berusia 18 tahun. Korban tinggal bersama pelaku atas permintaan ibu kandungnya yang mengungsi sementara ke Medan. Korban sendiri tidak lagi mempunyai ayah karena meninggal dunia saat kejadian tsunami Desember 2004.

Kasus Trafiking Anak Perempuan

Pasca gempa bumi di Nias, di luar tempat pengungsian banyak terjadi kasus-kasus trafiking terhadap anak perempuan dan juga kasus penelantaran istri/anak karena suami keluar dari Nias untuk mencari pekerjaan baru. Sepanjang tahun 2006 dan 2007, PKPA mencatat lebih dari 60 kasus trafiking dan penelantaran terhadap anak dan perempuan.

Salah satu kasus tersebut adalah perdagangan terhadap tiga anak perempuan yang berusia 9, 6 dan 3 tahun. Kakak beradik ini nyaris menjadi korban trafiking oleh ayah kandung mereka sendiri. Ibu para korban atau istri pelaku telah meninggal dunia saat melahirkan anak ketiga. Pelaku yang baru keluar dari Penjara Gunung Sitoli berencana menjual ketiga anak kandungnya kepada seorang perempuan tidak dikenal asal Medan seharga 10 juta pada awal September 2006 lalu. Rencana penjualan anak tersebut berhasil digagalkan setelah tetangga pelaku yang mengetahui rencana tersebut melaporkan ke PKPA. Selanjutnya, PKPA bekerjasama dengan Kepolisian Polres Nias mendatangi rumah pelaku. Sementara pelaku dibawa ke kantor Polisi, PKPA membawa ketiga anak tersebut ke panti asuhan. Pelaku mengakui rencana menjual ketiga anaknya itu karena ia membutuhkan biaya untuk kawin lagi.

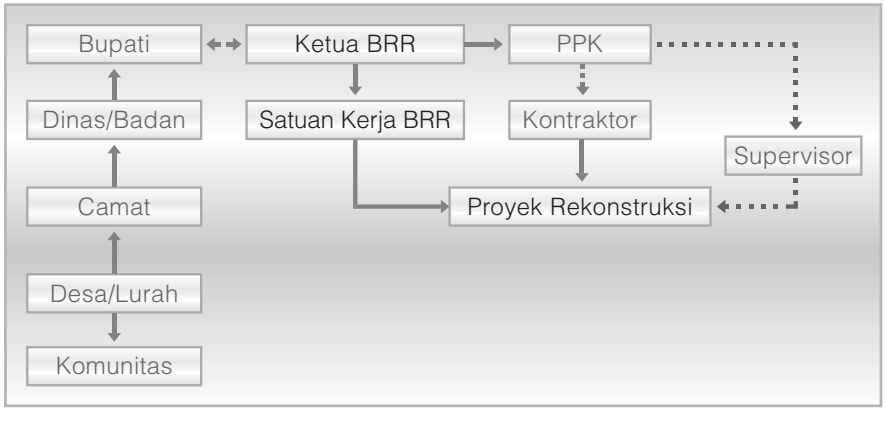
Kasus kekerasan lainnya dialami oleh korban yang baru berusia 6 tahun. Korban dititipkan kepada famili karena pasca gempa bumi orang tua korban bercerai dan keduanya eksodus keluar Nias. Korban dititipkan bersama seorang paman yang hidup dengan istri dan 2 orang anak yang masih kecil berusia 5 dan 3 tahun. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, paman korban selalu menggunakan kekerasan untuk meminta korban diam jika menangis, minta makan atau menanyakan keberadaan orang tuanya. Kekerasan tidak hanya menggunakan tangan kosong atau kaki tetapi menggunakan alat-alat seperti martil, besi panas dan kayu. Saat dilaporkan ke PKPA oleh tetangganya, kondisi badan korban sangat memprihatinkan- telapak kaki kiri masih berdarah dan terbakar karena sentuhan besi panas, kuku jempol kaki kiri dan kanan hitam membusuk karena ditoko martil serta di seluruh badan, terlihat bekas pukulan kayu atau rotan.

Kemungkinan ada bayak kasus-kasus kekerasan terhadap pengungsi perempuan maupun anak-anak perempuan yang dititipkan ke rumah keluarga mereka, namun tidak semua kasus dapat diungkap dan dilaporkan. Intimidasi dari pelaku dan ketergantungan secara ekonomi, termasuk kepada suami, merupakan faktor yang membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

3. POLA PENANGANAN PENGUNGSI

Pengungsi Nias ditangani secara estafet oleh pemerintah. Pada masa tanggap darurat, yaitu dari Desember 2004 dan Maret 2005 sampai dengan Juni 2005, penanganan pengungsi dilakukan oleh Satkorlak Sumatera Utara. Setelah itu, penanganan dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR) yang bertugas hingga Desember 2009. Selain mengimplementasikan program-program pemerintah, BRR juga bertugas mengkordinasikan program dari lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya baik lembaga internasional maupun nasional dan lokal. Dengan tugas ini, BRR NAD-Nias menjadi aktor utama pemulihan pengungsi Nias, mulai dari rehabilitasi fisik, perumahan, infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi dan sumber daya manusia. Sayangnya, proses yang dilakukan oleh BRR lebih menggunakan pendekatan birokrasi yang berlaku umum di struktur pemerintahan, tanpa menyediakan ruang atau media khusus bagi perempuan pengungsi untuk berpartisipasi, sebagaimana tergambar dalam Diagram 1.

Diagram 1
Struktur Pelaksanaan Program BRR



Peran dan akses pengungsi perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan untuk pengungsi sangatlah minim dan hampir tidak pernah dilakukan secara formal. Pada level komunitas, ruang bagi peran perempuan bahkan hanya bersifat formalitas. Pertemuan atau musyawarah dalam komunitas oleh laki-laki yang menjadi pemangku otoritas di berbagai tingkat organisasi pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasi agama dan organisasi adat. Organisasi perempuan biasanya hanya PKK dan peran PKK hanyalah simbolik semata.



Berdagang keliling demi keluarga.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi pengungsi, prioritas pemulihan ekonomi adalah jenis usaha untuk laki-laki. Alasannya, laki-laki dianggap pencari nafkah utama bagi keluarga, kecuali bagi perempuan orang tua tunggal. Bagi perempuan yang masih memiliki suami, ia akan memperoleh dukungan pembinaan ekonomi dalam jumlah yang lebih kecil dan pada umumnya. Program ini juga sebetulnya hanya untuk mengurangi kejenuhan perempuan di pengungsian.

4. OPSI BAGI PENGUNGSI

Relokasi dari barak pengungsian ke rumah permanen adalah harapan besar setiap pengungsi. Harapan ini tidak bisa dengan segera diwujudkan karena berbagai permasalahan, seperti perdebatan soal lahan yang tidak cocok, bantuan dana yang tidak cukup, sampai isu penggusuran oleh pemerintah. Permasalahan ini sering menyebabkan ketegangan antara pengungsi dengan BRR. Dalam situasi tersebut, peran perempuan pengungsi mulai menonjol. Perempuan lebih vokal dalam beberapa pertemuan terakhir untuk menuntut hak-hak relokasi ke rumah permanen. Seorang perempuan pengungsi menuturkan *"Kami tidak pulang ke tempat asal karena rumah sewaan telah hancur dan lahan tersebut milik orang lain. Kami mayoritas nelayan… Kalau lokasi rumah jauh dari pantai seperti di pegunungan maka kami keberatan. Kami ingin rumah dekat pantai agar suami kami mudah mencari nafkah di laut. Kalau tidak ada pilihan rumah permanen, bagi kami tidak masalah tetap di barak asal tidak ada pengusuran dan fasilitasnya diperbaiki."*

BRR pernah menawarkan pembangunan rumah permanen namun pengungsi harus mengajukan surat kepemilikan tanah. Syarat tersebut sangat tidak mungkin dipenuhi oleh pengungsi karena selama ini mereka tinggal di rumah kontrakan. BRR juga pernah menawarkan dana bantuan pindah sebesar Rp. 20.000.000 untuk setiap KK. Bantuan ini ditolak oleh pengungsi karena tidak cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah.

5. REKOMENDASI

1. Pelibatan perempuan pengungsi dalam setiap tahapan penanganan pengungsi sudah seharusnya dilakukan oleh semua institusi. Untuk dapat mengetahui kebutuhan mendasar bagi pengungsi dan untuk membentuk rasa aman dan nyaman di pengungsian, proses identifikasi tidak dapat diwakili oleh laki-laki semata. Anak dan perempuan sebagai kelompok rentan di pengungsian harus diberikan ruang khusus untuk terlibat dan berpartisipasi menentukan nasib mereka. PKPA memiliki pengalaman berharga di satu lokasi pengungsian halaman Masjid Jami' Ilir, Gunung Sitoli. Pada awalnya, pengaturan pengungsian dan distribusi bantuan didominasi oleh laki-laki. Pengaturan ini berakhir dengan konflik antar pengungsi. Kondisi ini teratasi setelah muncul inisiatif sekolompok kaum ibu dan remaja perempuan untuk mengkordinir distribusi bantuan. Bantuan kebutuhan dasar perempuan seperti pakaian dalam, pembalut, dan kebutuhan dasar lainnya, mereka catat dan kemudian diusulkan ke lembaga kemanusiaan yang bekerja di posko tersebut.

2. Relokasi ke rumah permanen bagi pengungsi yang sudah hampir 2 tahun tinggal di barak penampungan merupakan kewajiban yang harus segera direalisasikan oleh BRR NAD - Nias bersama Pemerintah Kabupaten Nias maupun Nias Selatan. Semakin lama tinggal di barak, semakin buruk situasi kehidupan mereka, baik itu dalam hal kelangsungan ekonomi keluarga maupun pendidikan anak. Relokasi harus memperhatikan karakteristik masyarakat pengungsi. Artinya, bila pengungsi berasal komunitas nelayan maka relokasi tidak mungkin dengan menjauhkan mereka dari kehidupan pantai.

3. Selama menunggu relokasi, harus ada perhatian khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar dan fasilitas di pengungsian seperti fasilitas air dan sanitasi, persalinan, alat transportasi untuk akses anak ke sekolah dan pemberdayaan ekonomi perempuan pengungsi.

4. Aparat penegak hukum dan pemerintah harus lebih serius memperhatikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan baik di pengungsian maupun di masyarakat untuk memberikan perlindungan rasa aman, rasa keadilan dan pemulihan.

Laporan Jogjakarta

Pengungsian di Desa Wonokromo-Pleret, Dusun Ngereco-Pundong, dan Dusun Caben-Pandak, Kelurahan Bantul, Jogjakarta

PEREMPUAN PENGUNGSI PASCA GEMPA

* Bonnie Kertaredja & Johan Dwi Bowo Santosa

1. PENDAHULUAN

1. 1. Yogya, Jawa Tengah dan 5,9 skala Richter.

Gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) dan sebagian Jawa Tengah sebesar 5,9 skala ricther pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.55 WIB merupakan akibat dari gerakan blok sesar/patahan Sungai Opak yang dipicu oleh zona penunjaman lempeng tektonik yang terletak di laut sebelah selatan Yogyakarta. Lokasi sumber gempa berada 37 Km di selatan kota Yogyakarta pada kedalaman 33 Km.

Dampak lebih besar dari bencana yang terjadi di kiri-kanan zona Sungai Opak. Daerah yang terkena gempa diantaranya adalah Kretek, Bambanglipuro, Jetis, Pleret, Imogiri, Piyungan, Berbah, Kalasan, dan Prambanan. Dampak gempa merambat ke Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten meliputi wilayah Wedi, Ceper, Bayat, dan Gantiwarno.



Bertahan di antara reruntuhan gempa.






(Searah jarum jam): Mengungsi di fasilitas publik; Sementara tinggal di jalan raya; Melepas lelah; Menanti kegiatan belajar sambil bermain.

Dalam hitungan detik yang begitu cepat, orang meninggal dan ratusan ribu rumah dan fasilitas publik hancur. Warga yang masih bisa menyelamatkan diri berhamburan ke jalan-jalan dan areal persawahan sembari menggendong sanak famili dan harta benda yang bisa diselamatkan. Isu tsunami yang menyusul kemudian semakin menggusarkan warga. Jalan-jalan di Yogyakarta pagi itu dijejali kendaraan menuju ke dataran tinggi.

1. 2. Pengungsi Secara Umum

Gempa susulan terjadi berulang-ulang dan warga dihinggapi rasa takut mendiami tempat tinggal seperti waktu sebelum bencana terjadi. Mereka yang tak lagi mempunyai rumah memilih tinggal di tenda, terpal dan puing yang mereka jadikan hunian sementara yang didirikan di pekarangan, lapangan, persawahan, serta pinggir-pinggir jalan. Mereka yang tidak berada di daerah patahan gempa mendirikan hunian sementara di luar rumah atau memilih memakai teras sebagai tempat aktivitas, termasuk untuk tidur. Kondisi ini berlangsung lebih dari seminggu.

Gempa yang terjadi tak jarang mengakibatkan air sumur berkurang. Sebagian besar penduduk yang sumurnya tertimpa reruntuhan mesti meluangkan waktu untuk mengendapkan air sebelum dikonsumsi. Mereka yang sumurnya hampir kering harus menggali lebih dalam sumur mereka. Hal ini membuat pengungsi kesulitan memperoleh air bersih. Belum lagi karena hujan sudah lama tak turun.

Penyakit seperti gangguan pencernaan dan pernafasan merebak di daerah ini. Banyaknya debu akibat reruntuhan yang jarang tersapu air hujan dan lokasi pengungsian menjadi faktor pemicu masalah pernafasan, sebagian pengungsi mengalami gangguan pencernaan akibat susah mendapatkan air bersih.

1. 3. Tantangan dalam Melakukan Pemantauan Pemenuhan HAM Perempuan

Pemantauan pemenuhan HAM perempuan pengungsi dilakukan di tiga titik di kabupaten Bantul, Yogyakarta, yaitu di Desa Wonokromo – Pleret, Dusun Ngereco – Pundong, dan Dusun Caben – Pandak. Pemantauan dilakukan dari bulan Mei hingga Juni 2006.

Ada kemudahan namun juga ada tantangan dalam pemantauan ini. Beberapa kemudahan seperti penerimaan dan keterbukaan responden dan sejumlah perangkat desa dan dusun, dan kondisi pengungsian yang mudah dijangkau. Tantangan yang dihadapi seperti kecurigaan perangkat dusun tertentu dan isu penyebaran agama, serta hambatan kecil seperti hujan dan minimnya data penduduk yang otentik akibat terusak gempa.

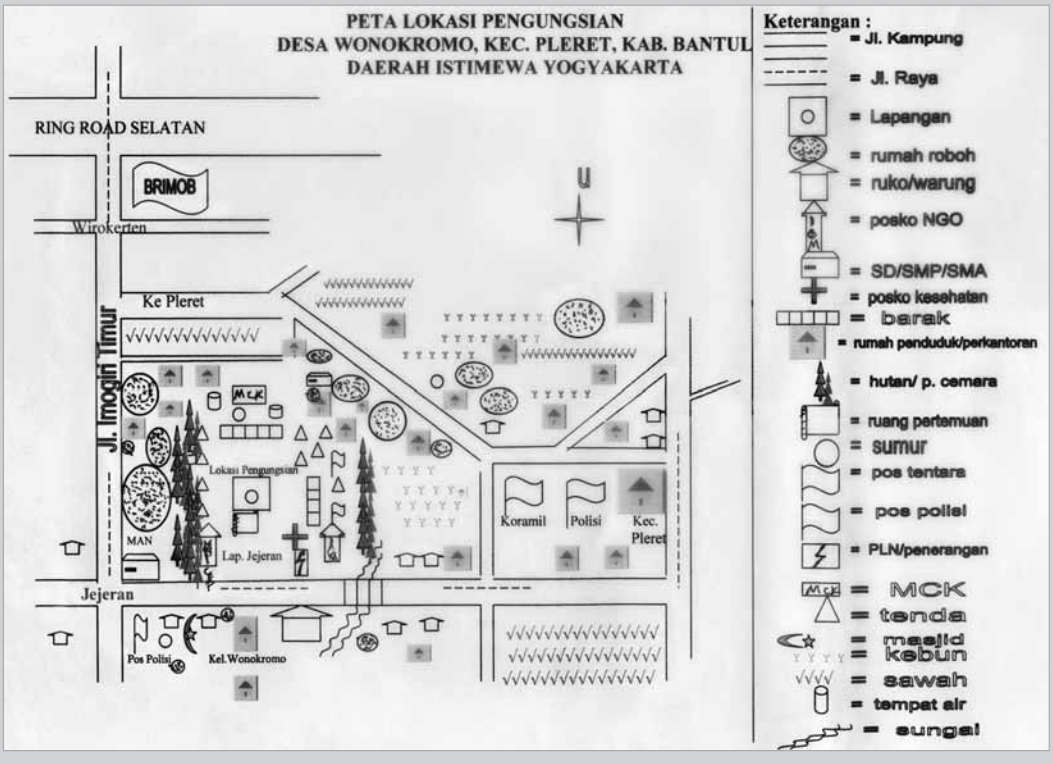
2. HASIL PEMANTAUAN

2. 1. Kondisi Umum Wilayah Pantauan

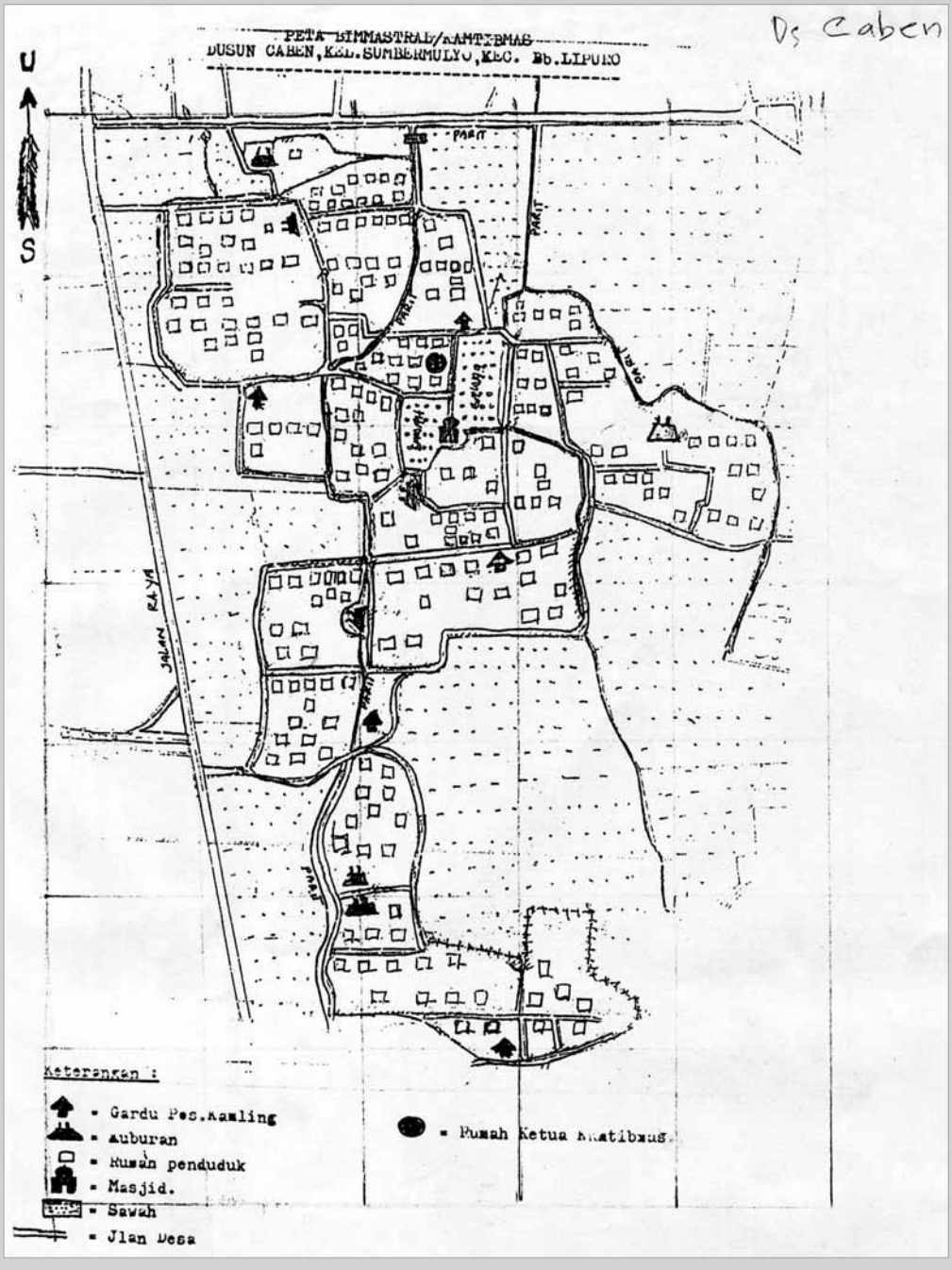
2. 1. 1. Lapangan Jejeran, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret

Konsentrasi pengungsi di tempat ini terjadi selama 15 hari setelah gempa. Selama berada di pengungsian, mereka mendiami barak berupa tenda besar. Keinginan pengungsi untuk memulai aktivitas kembali dan merawat harta benda mereka mendorong pengungsi pulang ke rumah. Di desa ini, Wonokromo, jumlah KK pengungsi adalah 3.505 unit. Jumlah pasangan menikah 475 orang, duda/orang tua tunggal 234 orang, perempuan kepala keluarga 79 orang, janda meninggal 37 orang, janda cerai 12 orang, perempuan orang tua tunggal 56 orang.

Peta Jejeran



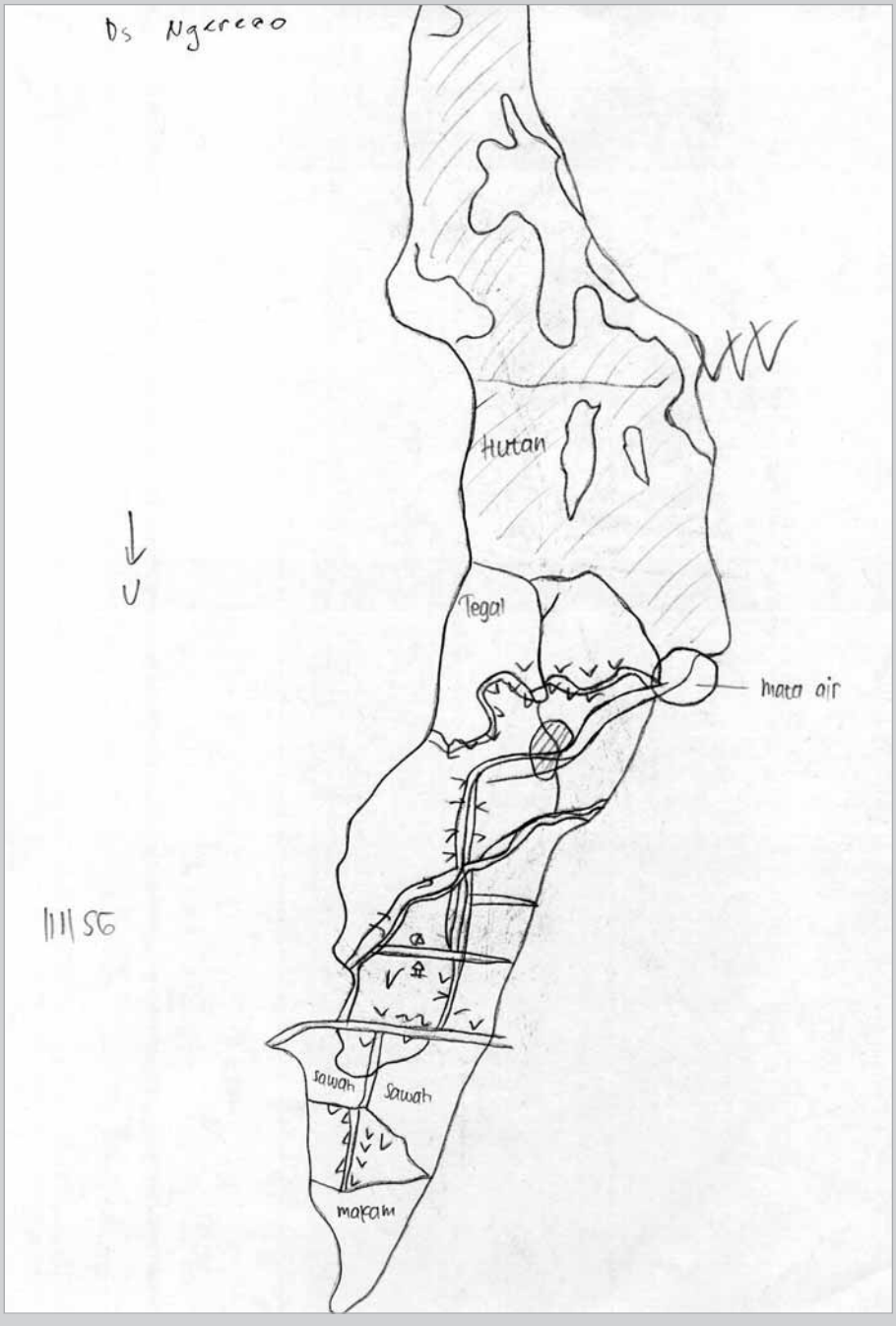
Peta Caben



2. 1. 2. Dusun Caben, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro

Penduduk dusun ini tidak pindah melainkan mendiami pekarangan masing-masing, menghuni tepian jalanan, atau menginap sementara di tetangga dan/atau kerabat. Jumlah KK 238 unit, jumlah pasangan menikah 231 pasang; jumlah duda/orangtua tunggal 30 orang; perempuan kepala keluarga 8 orang; janda meninggal 71 orang dan perempuan orang tua tunggal 3 orang.

Peta Ngereco



2. 1. 3. Dusun Ngereco, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong

Sebelum akhirnya mendirikan hunian sementara dengan puing reruntuhan rumah atau tenda atau terpal, sebagian besar penduduk dusun ini tinggal sementara di tenda besar/tenda hajatan milik Kepala Dusun (Kadus) yang didirikan di pekarangan Kadus. Jumlah KK adalah 86 unit dan pasangan menikah sebanyak 81 orang, jumlah duda/orangtua tunggal 12 orang; perempuan kepala keluarga 1 orang; janda meninggal 35 orang dan perempuan orang tua tunggal 4 orang.



(Searah jarum jam): Perempuan ikut dalam distribusi bantuan; Mengasah kepemimpinan perempuan pengungsi; Bantuan alat masak; Mencari nafkah dengan berjualan.

2. 2. Akses Perempuan pada Bantuan Pokok

Segera setelah bencana, bantuan yang diterima pengungsi berasal dari sanak famili, tetangga, dan pihak-pihak lain yang peduli, termasuk dari lembaga non-pemerintah dan PMI. Selang beberapa hari, pengungsi memiliki akses untuk bantuan pokok seperti beras dan sejenisnya, mi instan, air mineral dan pakaian. Juga ada bantuan spesifik anak seperti susu dan pakaian balita, serta paket khusus perempuan, seperti celana dalam, bh, pembalut, perlengkapan ibu hamil dan melahirkan. Selain itu, terdapat bantuan berupa multivitamin dan tenda yang bisa diperoleh dengan menyertakan identitas diri.

Bantuan jatah hidup diterima sekali pada bulan pertama. Di pengungsian, segala bentuk bantuan diterima dengan baik oleh perempuan pengungsi. Apabila bantuan tidak cocok, bantuan akan dialihkan atau diberikan kepada yang membutuhkan. Misalnya, sejumlah perempuan lansia memperoleh paket khusus perempuan dan karena tidak membutuhkan, bantuan itu dialihkan dan ditolak. Sementara itu, bantuan khusus untuk lansia dan *diffable* tidak tersedia.

Bantuan untuk air bersih dan air minum di sejumlah wilayah juga tidak ada. Karenanya, pengungsi memakai air seadanya yang mereka dapat dari sumur sendiri, atau sumur tetangga jika sumur

mereka sendiri *sat* (tidak berair lagi akibat gempa dan musim kemarau yang panjang). Untuk mendapatkan air minum, pengungsi mengendapkan air terlebih dahulu. Namun, sejumlah pengungsi mengaku tidak memiliki ember untuk mengendapkan dan karenanya, memakai air keruh yang ada untuk kepentingan memasak. Akibat dari minimnya air bersih, sejumlah pengungsi menderita gangguan pencernaan.

2. 3. Akses Perempuan pada Layanan Dasar

Fasilitasi dan layanan dasar disediakan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah dan solidaritas warga. Namun demikian, sejumlah perempuan kepala keluarga miskin tidak menjadi prioritas dalam pemberian bantuan perumahan. Kendala lainnya adalah terkait dengan MCK. Ada banyak MCK yang disediakan tetapi perempuan kurang nyaman untuk menggunakannya kerena kondisinya yang tidak bisa dikunci atau juga mudah diintip.

Pergantian musim yang tidak semestinya mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat terasa oleh pengungsi- malam hari terasa lebih dingin dan siang menjadi lebih panas. Perempuan dan anak-anak rentan terhadap penyakit pada masa ini. Setelah pancaroba, musim hujan menyebabkan situasi menjadi semakin sulit bagi perempuan pengungsi. Mereka musti berkejaran dengan waktu dalam menyediakan hunian yang nyaman dan mampu melindungi keluarga dari hujan.

2. 4. Akses Pengambilan Keputusan/Kebijakan

Pengambilan keputusan di tingkat dusun lebih sering dilakukan oleh perangkat dusun. Kebanyakan perangkat dusun adalah laki-laki. Selain jarang dan tidak menduduki posisi strategis pengambilan keputusan, perempuan juga sering tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan diluar pendistribusian bantuan khusus paket perempuan ataupun dalam pertemuan-pertemuan informal. Hal ini karena suara perempuan sudah diwakilkan atau dianggap terwakili dan pelibatan perempuan tidak dianggap penting. Akibatnya, sejumlah keputusan yang diambil melalaikan kebutuhan khusus perempuan.

3. TINDAK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

3. 1. Kekerasan

Kekerasan yang menimpa perempuan pengungsi tidak banyak terungkap. Beberapa kekerasan sekedar menjadi gunjingan. Ketika dicoba digali, kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang masih wajar oleh perempuan dan tak baik untuk dibicarakan.

3. 2. Diskriminasi

Banyak kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau didiskriminasikan dalam kegiatan atau rapat-rapat. Hal ini karena masih banyak anggota masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak layak untuk ditampilkan. Perlakukan diskriminasi ini berakibat pada terbatasnya akses dan kontrol perempuan.

Ada indikasi bahwa diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan tindak korupsi. Misalnya, perempuan yang aktif memantau pendistribusian bantuan menjadi sulit dalam mengakses bantuan-bantuan lain dan tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan (lihat lampiran dokumentasi kasus).



Mengungsi di tanah sendiri.

4. INISIATIF PEREMPUAN

Di banyak situasi ditemukan bahwa paska bencana, perempuan terbukti bertindak sebagai aktor lincah dalam keluarga, terlebih dalam keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Keterbatasan kebutuhan pangan membawa perempuan ke dalam pola interaksi untuk pencukupan kebutuhan pangan baik dengan sesama pengungsi dan/atau tetangga dan famili. Perempuan mengatasi kerumitan ekonomi keluarga dalam pengungsian disamping melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik membenahi kembali tempat tingal yang telah rusak.

5. REKOMENDASI

5. 1. Pemangku kepentingan pendistribusian bantuan agar lebih sensitif gender.
5. 2. Pemangku kepentingan pendistribusian bantuan agar sensitif terhadap kaum rentan.
5. 3. Pemangku kepentingan pendistribusian agar melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan menjaring aspirasi perempuan.
5. 4. Masyarakat luas agar lebih jernih melihat isu dan kepentingan perempuan pengungsi.
5. 5. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam setiap kegiatan perempuan pengungsi.
5. 6. Membangun ruang pertemuan yang dapat diakses bersama.

PEREMPUAN PENGUNGSI DI PASAR PORONG SIDOARJO

* Iva Hasanah

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Pengungsian

Pengungsi di Sidoarjo berasal dari sejumlah desa yang tenggelam oleh semburan lumpur dari pusat pengeboran minyak yang dioperasikan oleh Lapindo Brantas Inc. Semburan lumpur berawal di bulan Mei 2006 di Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada awalnya, lokasi pengungsian ada di beberapa tempat, seperti pasar Porong, kantor desa Reno Kenongo, kantor desa Kedung Bendo dan jalan tol kilometer 38 – 39. Masing-masing lokasi pengungsian menampung pengungsi dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan luas tempat yang digunakan. Rata-rata tempat yang digunakan tidak mencukupi untuk jumlah pengungsi yang ditampung. Penanganan lokasi pengungsian banyak terpusat di pasar Porong karena memang jumlah yang ditampung lebih banyak dari tempat pengungsian yang lain. Kondisi ini mengakibatkan tempat-tempat pengungsian yang lain luput dari perhatian dan penanganan.

Ketika lumpur terus menerus menyembur dan mengakibatkan lebih banyak lagi desa yang terendam, pengungsi bertambah banyak. Sampai-sampai, mereka harus mengungsi di jalan tol Surabaya Gempol.



Berteduh di pasar pasca banjir lumpur.

Di sana, hanya ada tenda-tenda darurat dari terpal plastik yang didirikan oleh pengungsi sendiri. Tidak ada air bersih dan dapur umum yang menangani logistik pengungsi.

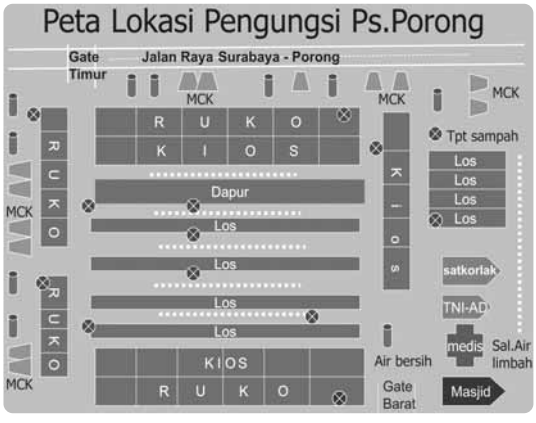
Paska ledakan pipa gas Pertamina bulan November 2006, kembali terjadi gelombang pengungsian tahap kedua. Kali ini pengungsi terdiri dari masyarakat perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai dan Tanggulangin Anggun Sejahtera dan desa-desa berikutnya yang terendam akibat jebolnya tanggul dan melubernya lumpur ke arah utara. Pasar Porong yang semula kosong oleh pengungsi, menjadi padat kembali.

Ketika pengungsi semakin banyak, sejumlah warga menuntut adanya uang kontrak agar mereka tidak tinggal di lokasi pengungsian. Negosiasi dengan pihak perusahan berakhir dengan kesepakatan bantuan bagi masing-masing kepala keluarga sebesar Rp. 5.500.000 untuk kontrak rumah selama dua tahun. Sedikit demi sedikit, kepala keluarga yang menerima uang kontrak tersebut meninggalkan tempat-tempat pengungsian.

1. 2. Kondisi Umum

Pemantauan pemenuhan HAM perempuan pengungsi dipusatkan di lokasi pasar Porong karena lebih banyak penghuninya. Pemantauan dilakukan pada Februari 2007. Pada saat itu, jumlah pengungsi masih sekitar 7.000 orang dan berasal dari Perumahan Tanggulangi Citra Pesona, Kedung Bendo, Ketapang dan Desa Reno Kenongo. Setengah lebih dari pengungsi adalah perempuan, anak-anak dan kelompok lanjut usia. Profesi pengungsi bervariatif: ada petani, buruh pabrik, pegawai negeri, pengacara, pegawai swasta, pedagang, dsb.

Lokasi pengungsian adalah pasar yang belum ditempati dan terdiri dari ruko (rumah-toko yang berbentuk bangunan 2 lantai), kios (berada di belakang ruko, hanya satu lantai) dan los/pasar (ruang lorong di tengah pasar, tidak bersekat). Ruko dihuni oleh 3-5 keluarga, sedangkan kios masing-masing 3 keluarga dan lorong/los dibagi menjadi 3 keluarga per petak dengan ukuran 3 x 3 meter tanpa sekat. Sebagai tempat tinggal, ruko masih memiliki ventilasi yang cukup, tetapi di kios tidak ada ventilasi karena langsung dengan pintu depan berbentuk *rolling door* dan lorong sangat terbuka sehingga hanya atap saja yang ada (lihat peta lokasi).



Karena pasar, lokasi ini dilengkapi dengan beberapa kamar mandi umum, satu masjid dan ruang kantor untuk digunakan oleh pengelola pasar. Lantai pasar semuanya dari semen dan jalan-jalan yang ada menggunakan *paving* (cor semen). Lokasi pasar strategis, yaitu di samping jalan utama Surabaya - Malang dan karenanya, dilewati oleh banyak angkutan umum selama 24 jam.

Untuk pemilihan tempat, tidak ada mekanisme khusus yang menjadi acuan melainkan tergantung waktu kedatangan. Artinya, yang datang lebih dulu dapat memilih tempat yang tertutup misalkan ruko atau kios, sedangkan untuk pengungsi yang datang belakangan harus puas menempati lokasi lorong atau los yang terbuka. Pengungsi biasanya berlompok berdasarkan asal daerahnya karena mereka masuk ke lokasi pengungsian pada waktu yang hampir bersamaan.

1. 3. Tantangan Melakukan Pemantauan

Pemantauan pemenuhan HAM perempuan pengungsi ini terutama dilakukan sebagai ujicoba untuk menghasilkan sebuah instumen pemantauan di pengungsian yang mempu menangkap kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pengungsi terutama pengungsi perempuan. Proses pendokumentasi menjadi proses pembelajaran bagi organisasi pembela HAM/masyarakat sipil untuk menggunakan metode yang partisipatif dan berperspektif perempuan sebagai landasan pemantauan kondisi pengungsi perempuan. Hasil dokumentasi juga digunakan sebagai alat atau media untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada para pihak yang berkompeten menangani pengungsi.

Dalam proses pemantauan, kami menghadapi kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala secara internal adalah keterbatasan pemantau baik jumlah personil maupun waktu yang digunakan untuk melakukan monitoring. Padahal, pemantau ingin memperoleh informasi yang mendalam baik itu tentang pemenuhan umum kondisi HAM perempuan maupun dalam pencatatan kasus diskriminasi atau kekerasan yang dialami oleh perempuan pengungsi serta penggumpulan data-data pendukung.

Kendala secara eksternal adalah pelecehan dari pengungsi laki-laki saat menolak untuk diwawancarai. Walaupun demikian, pemantau mendapat dukungan yang sangat berharga dari para pengungsi perempuan yang dengan sikap terbuka menerima kedatangan pemantau dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. HASIL PEMANTAUAN

2. 1. Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan

2. 1. 1. Akses pada Bantuan Pokok

Secara umum, hampir semua jenis bantuan pokok tidak diperoleh pengungsi. Mereka hanya menerima nasi bungkus berisi nasi putih, lauk pauk tanpa kuah dan air mineral gelas yang disediakan oleh dapur umum dan dibagikan setiap hari sebanyak tiga kali. Menurut petugas di lokasi pengungsian, harga nasi tersebut adalah Rp. 5.000 per bungkus, padahal menurut pengungsi harga nasi bungkus tersebut sekitar Rp. 2.500 jika beli di luar.

Air bersih dan air minum disediakan dalam tandon yang ada di sekeliling pasar. Karena minimnya air bersih, pengungsi sering harus membeli air mineral untuk konsumsi. Pada awal bulan November 2006 ketika banyak sekali pengungsi, air bersih yang dipakai selalu tidak cukup. Akibatnya, banyak orang yang tidak mandi dan mencuci. Pengungsi, terutama ibu dan anak-anak yang tiap hari tinggal di lokasi pengungsian, mengalami gangguan penyakit kulit dan diare.

Kondisi tempat tinggal juga memperburuk kondisi kesehatan pengungsi. Pengungsi harus berhadapan dengan udara panas di musim kemarau dan udara yang dingin di musim hujan. Tantangan cuaca tidak terlalu terasa di ruko. Bila tinggal di kios, pengungsi masih mempunyai pintu walaupun *rooling door*. Pintu itu bisa mereka buka penuh di siang hari dan ditutup separuh di malam hari untuk menyiasati ventilasi yang tidak ada. Bagi pengungsi yang tinggal di los/lorong pasar, mereka hanya memiliki penutup berupa atap dari asbes dan tidak berdinding. Para pengungsi menggunakan terpal plastik untuk memisahkan petak satu dengan lainnya. Satu petak terdiri dari 3 keluarga. Pengungsi juga membuat kamar kecil dari kardus dan kain atau kelambu untuk tempat tidur anak bayi dan balita.



Berupaya tidur.


Diskusi dengan perempuan pengungsi.

Bantuan alas tidur, bantal, selimut dan kelambu hanya diberikan satu kali pada tiga bulan pertama mereka menjadi pengungsi. Bantuan ini dari pihak swasta. Pada awalnya, ruang privat untuk suami-istri disediakan. Ruang ini kemudian tidak ada lagi karena pengungsi merasa malu untuk menggunakannya. Untuk melakukan hubungan intim, biasanya mereka pulang ke rumah saudara atau orang tua. Bantuan berbentuk sandang/pakaian pun tidak pernah didapat, apalagi pakaian dalam, pakaian anak-anak/bayi, baju hangat maupun jilbab. Padahal, tidak semua pengungsi sempat membawa pakaian ke tempat pengungsian.

Untuk perlengkapan kesehatan, pengungsi pernah menerima bantuan sabun mandi, sabun cuci, dan pasta gigi. Bantuan mi diperoleh dari pihak swasta yang kadang-kadang datang. Pengungsi biasanya melengkapi kebutuhan sanitasi/kesehatan dengan membeli. Untuk bantuan khusus perempuan, pengungsi pernah menerima pembalut, tetapi hanya dua bungkus yang dibagikan bersamaan dengan sabun mandi.

Umumnya, bantuan yang dibagikan hanya sedikit jumlahnya sehingga tidak mencukupi untuk semua pengungsi. Pengungsi yang menerima bantuan hanyalah mereka yang dekat dengan petugas atau tinggal di dekat kantor pembagian bantuan. Perempuan pengungsi seringkali tidak menerima bantuan karena tidak pernah ikut rapat dan tidak pernah mengeluh apabila ada memperoleh bantuan.

2. 1. 2. Akses pada Layanan Dasar

Layanan dasar yang tersedia di lokasi pengungsian pasar Porong hanyalah layanan dari posko kesehatan. Pengungsi terutama datang ke posko bila sakit ringan. Hanya saja, obat–obat yang diberikan sering kadaluarsa dan obat baru akan diberikan bila pengungsi protes. Petugas medis yang melayani di posko tidak selalu dokter; terkadang hanya perawat/suster. Petugas medis yang bertugas jarang berkeliling di tempat pengungsian; mereka hanya berjaga di posko. Hanya ada satu kali pengobatan keliling yang dilakukan oleh bantuan medis yang datang dari Jakarta. Ketika wawancara, sebagian besar perempuan pengungsi tidak tahu apakah pada posko kesehatan itu ada layanan kesehatan reproduksi. Hal ini karena tidak ada sosialisasi dari posko kesehatan. Akibatnya, jika perempuan pengungsi memerlukan layanan KB, mereka justru pergi ke Puskesmas. Posko kesehatan juga tidak memberikan layanan bagi ibu melahirkan; mereka dibawa ke rumah sakit terdekat. Layanan konseling juga tidak tersedia meskipun di tempat pengungsian ini ditemukan sejumlah anak dan perempuan yang mengalami trauma dan adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Layanan bantuan hukum dan administrasi sama sekali tidak tersedia. Pemantau menemukan pengungsi perempuan yang kebingungan tentang cara pengurusan tanah dan surat-surat kependudukan yang menjadi syarat dalam pengurusan uang kontrak dan ganti rugi. Pengurusan administrasi selama ini dilakukan oleh ketua kelompok masing-masing rukun tetangga yang sama-sama berstatus pengungsi.

Layanan pengembangan ekonomi juga tidak tersedia. Biasanya, pengungsi yang di daerah asalnya mempunyai pekerjaan atau usaha di rumah akan melanjutkan usahanya itu di tempat pengungsian. Perempuan pengungsi merintis sendiri usahanya sesuai dengan kondisi yang ada. Beberapa perempuan memanfaatkan waktu luang di pengungsian dengan berjualan seperti jajanan anak, makanan dan minuman. Beberapa ibu membuat krupuk yang bahannya diambil dari sisa nasi bungkus. Hasil penjualan krupuk ini bisa menambah pendapatan keluarga terutama untuk uang jajan anaknya. Tidak ada program pendidikan ketrampilan maupun bantuan modal usaha. Akibatnya, walaupun banyak perempuan yang ingin berusaha, mereka tidak dapat memulainya karena tidak ada modal.

Layanan pendidikan untuk perempuan tidak ada di lokasi pengungsian baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tidak ada program yang diinisiasi di lokasi pengungsian sehingga banyak anak putus sekolah, khususnya mereka yang berusia TK. Anak yang sekolah SD sampai SMA masih dapat terus bersekolah walaupun tempatnya tidak di lokasi pengungsian. Untuk kebutuhan sekolah, Angkatan Darat menyediakan mobil angkutan/truk sebagai kendaraan antar jemput. Layanan pendidikan informal dan kegiatan bagi perempuan dewasa sama sekali tidak ada. Bahkan, pengajian pun tidak rutin; hanya ketika ada kunjungan tokoh agama atau bila ada acara khusus.

2. 1. 3. Akses pada Fasilitas Bersama

Beberapa fasilitas bersama untuk pengungsi sejak awal sudah ada misalnya MCK, tempat ibadah/masjid dan penerangan. Keberadaan fasilitas ini terkait dengan lokasi pengungsian yang didesain sebagai areal perniagaan. Karena jumlah pengungsi yang banyak, memang sudah ada penambahan MCK. Walaupun masih dalam satu komplek, MCK sulit dijangkau bagi para manula yang mendiami los pasar karena harus berjalan keluar sejauh 500 meter.











(Dari atas ke bawah): Menjemur nasi sisa; Anak di pengungsian; Sekolah terendam; Bantuan transportasi; WC untuk pengungsi.

Dapur umum disediakan di bagian los pasar yang tertutup. Bahan makanan yang sudah masak dibungkus di ruangan yang tertutup, tetapi proses masak-memasak tetap dilakukan di los pasar yang terbuka. Penanganan dapur umum dilakukan oleh *catering* yang mendapat tender dari Dinas Sosial.

Karena tidak ada fasilitas untuk menjemur pakaian, para pengungsi menjemur pakaian sesuka hati dan biasanya di dekat petak mereka masing-masing. Tempat sampah yang tersedia adalah tempat sampah tidak permanen yang berbentuk keranjang dari bambu. Jika kena hujan atau air, tempat sampah ini akan rusak dan terbuka. Akibatnya, dan juga karena tidak bertutup, bau menyengat yang menyebar dan dikerumuni lalat, terutama jika ada sampah basah seperti sisa makanan.

Fasilitas informasi hanya tersedia di posko Satkorlak, disamping papan pengumuman pada ruko/kios yang dipergunakan oleh pengungsi sebagai posko. Posko Satkorlak khusus digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan atau memberi pengumuman yang berhubungan dengan informasi dari Lapindo. Pertemuan konsolidasi pengungsi secara mandiri dilaksanakan di posko-posko pengungsi. Informasi yang berbentuk selebaran dapat dengan mudah diakses karena informasi ini ditempelkan di tembok-tembok di sekitar pasar. Alat komunikasi lain seperti *megaphone* dimiliki oleh masing-masing kelompok pengungsi untuk kebutuhan konsolidasi internal.

2. 1. 4. Akses pada Proses Pengambilan Keputusan

Keterlibatan perempuan di dalam proses pertemuan maupun keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan hampir-hampir tidak ada. Pertemuan yang diadakan baik oleh kelompok pengungsi maupun pertemuan resmi yang dilakukan Satkorlak tidak terinformasikan dengan baik ke perempuan. Apalagi karena pertemuan-pertemuan tersebut seringkali hanya mengundang kepala keluarga yang mayoritas adalah laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali tidak tahu tentang perkembangan terbaru dan perempuan yang berstatus janda atau yang suaminya sedang tidak ada di tempat pengungsian menjadi terabaikan.

Kalaupun ada perempuan yang hadir dalam pertemuan, mereka hanya bersikap pasif. Pada saat akan melakukan demonstrasi, biasanya perempuan juga hadir dalam rapat-rapat khusus. Hanya saja mereka tidak berani menyampaikan pendapat. Hal ini terutama karena jumlah perempuan yang hadir lebih sedikit dan dominasi laki-laki terlalu kuat. Akibanya, para perempuan hanya memendam sendiri jika mereka tidak setuju dengan hasil keputusan.

2. 1. 5. Keterlibatan dalam Aktivitas di Pengungsian

Aktivitas di pengungsian seperti pembagian bantuan, penyediaan layanan, dan penanganan kasus kekerasan hampir tidak pernah melibatkan perempuan. Kegiatan sosialisasi perkembangan keputusan dari Lapindo sering kali hanya melibatkan laki-laki. Itu pun hanya pada golongan-golongan tertentu, misalnya pejabat desa atau pemimpin kelompok. Akibatnya, perempuan tidak paham akan adanya kegiatan-kegiatan di tempat pengungsian.

2. 1. 6. Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Ancaman tindakan kriminalitas memang tidak dirasakan oleh perempuan. Masalah utama perempuan terhadap rasa aman dan nyaman lebih terkait dengan kondisi tempat pengungsian yang memprihatinkan. Karena tidak ada kamar privat, perempuan pengungsi tidak merasa nyaman

bila hendak tidur dan ganti pakaian. Bagitu pula persoalan persediaan air bersih yang terbatas sehingga perempuan pengungsi tidak nyaman dalam mencuci dan mandi. Belum lagi bau yang menyengat dan lalat yang hinggap di sampah membuat kondisi lingkungan tidak nyaman.

2. 2. Kasus

2. 2. 1. Kekerasan terhadap Perempuan Pengungsi

Perempuan rentan mendapatkan kekerasan di tempat pengungsian. Di dalam pemantauan ini, ditemukan beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami korban. Kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik seperti dipukul, dijambak, dan ditampar, serta kekerasan psikologis seperti dimarah-marahi, atau dituduh berselingkuh. Alasan tindak kekerasan ini adalah suami yang menganggap istrinya tidak beres dalam merawat anak, istri yang marah akibat suami menggunakan uang jatah hidup tanpa kesepakatan bersama atau karena kondisi ekonomi keluarga yang turun drastis akibat sumber pencaharian hilang atau usaha bangkrut. Selain itu, tindak kekerasan juga dipicu oleh kondisi psikologis yang terus menerus tertekan karena penyelesaian pengungsian yang tidak kunjung tuntas. Kondisi pengungsian yang tidak memiliki ruang privat juga membuat banyak perempuan dituduh melakukan selingkuh oleh suaminya. Seorang ibu di pengungsian menuturkan, *"Para laki-laki sekarang menjadi pengangguran karena tidak punya pekerjaan… [mereka] sering sekali menggunakan waktu luang untuk berjudi sepanjang hari,bahkan uang yang digunakan biasanya uang jatah hidup yang diberikan bulanan sehingga uang tersebut tidak sampai pada keluarga atau istri mereka."*

Dampak dari tindak kekerasan tersebut adalah perempuan semakin tertekan di tempat pengungsian dan merasa tidak ada tempat perlindungan. Perempuan korban juga cenderung mengucilkan diri dari lingkungan karena malu.

2. 2. 2. Diskriminasi terhadap Perempuan Pengungsi

Diskriminasi terhadap perempuan terutama terlihat dalam minimnya akses perempuan pada layanan dasar, informasi, akses untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan untuk terlibat aktif dalam kegiatan di pengungsian. Diskriminasi terutama dialami oleh perempuan yang berstatus janda dan mereka yang status perkawinannya tidak jelas, misalkan perempuan yang menjadi istri kedua. Begitu juga dengan perempuan orang tua tunggal yang tidak diakui secara administrasi sebagai kepala keluarga. Akibat dari diskriminasi ini, sebagian besar perempuan tidak mendapatkan bantuan, ketinggalan dalam informasi yang penting dan tidak dapat menentukan keputusannya sendiri, misalnya dalam hal pilihan kompensasi dan opsi ke depan.

3. PENANGANAN

Sampai saat ini tidak ada penanganan yang signifikan terhadap pemenuhan HAM perempuan pengungsi. Penanganan di tempat pengungsian hanya dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Satkorlak baik itu dalam hal pembagian bantuan dan penyediaan makanan bagi pengungsi. Penanganan oleh Satkorlak juga dianggap tidak efektif, dan ini terutama karena:

- Pemetaan kebutuhan pengungsi tidak dilakukan secara partisipatif.
- Birokrasi tumpang tindih yang mengakibatkan proses menjadi lambat dan tidak efektif.
- Tidak melibatkan perempuan untuk memetakan kebutuhan perempuan.
- Lemahnya koordinasi antar semua pihak yang mempunyai komitmen dalam penanganan pengungsi.









(Searah jarum jam): Nasi bungkus untuk pengungsi; Gedung untuk satkorlak; Tempat koordinasi antar pengungsi; Klinik.

Data yang tidak lengkap terutama diakibatkan oleh proses pendataan yang tidak menggunakan metode yang proaktif. Hanya orang-orang yang sering datang ke posko saja yang terdaftar dan mengetahui perkembangan informasi. Karena data yang tidak lengkap, pembagian bantuan menjadi tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bantuan terutama sering kali tidak diterima oleh para perempuan karena data mereka tidak ada di posko.

Pendekatan penanganan tidak partisipatif karena tidak menghiraukan aspirasi pengungsi. Misalnya, tuntutan pengungsi atas uang sebagai bentuk bantuan pokok. Tuntutan ini sama sekali tidak dihiraukan dengan terus memberikan nasi bungkus meskipun akhirnya tidak dimakan pengungsi. Hal ini terjadi karena pengungsi bosan dengan jenis makanan yang tidak berkuah tiap hari dan kecewa tidak sesuai dengan nilai yang ditentukan. *"Bahkan untuk pengecekan apakah bahan makanan yang akan dimasak masih dalam kondisi baik atau sudah kadaluarsa tidak dilakukan [sehingga] nasi bungkus yang dibagikan ke pengungsi ada belatungnya,"* ujar seorang perempuan pengungsi.

4. KEKUATAN PEREMPUAN

Dalam kondisi yang sangat sulit, perempuan mempunyai kekuatan untuk mengelola masalah yang dihadapi. Berbeda dari prasangka umum, perempuan tidak bersikap emosial dalam menyikapi kondisi yang ada. Perempuan banyak berpikir tentang persoalan yang sering dilupakan oleh kaum laki-laki. Misalnya saja untuk menghadapi anak-anaknya yang masih kecil, belum paham kondisi sesungguhnya, dan mengalami trauma. Ketika melihat mendung, hujan dan air, anak-anak seringkali ketakutan dan mengatakan *"ayo lari ….ayo lari, tanggulnya mau jebol nanti kita terendam lumpur"*.

Dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat kehilangan segalanya, perempuan masih mempunyai kekuatan untuk menginisiasi usaha ekonomi untuk menambah ekonomi keluarga. Adapun usaha yang dilakukan berbentuk warung makanan, ataupun kios kecil yang menjual perlengkapan hidup sehari-hari. Perempuan juga mengupayakan sendiri informasi yang mereka butuhkan walaupun pertanyaan mereka untuk informasi seringkali diabaikan.

5. REKOMENDASI

Penanganan yang tidak efektif dalam kasus pengungsian akibat luberan lumpur ini erat kaitannya dengan upaya pelepasan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam permasalahan kejahatan lingkungan. Tanggung jawab tidak hanya di pundak perusahaan, tetapi juga di pihak pemerintah sebagai pengurus negara yang telah memberikan izin bagi perusahaan untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Dalam penanganan, kedua belah pihak ini terkesan saling melempar tanggung jawab.

Agar kondisi HAM pengungsi dapat membaik, khususnya bagi perempuan pengungsi, dan permasalahan pengungsian cepat terselesaikan, maka dibutuhkan model penanganan terpadu yang dilakukan kedua belah pihak yang bertanggung jawab ini. Pertama, pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional menyusun kebijakan yang mengharuskan perusahaan mempunyai alokasi dana khusus untuk penanganan resiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengupayakan perlindungan bagi warganegaranya dari tindakan kejahatan lingkungan akibat kecerobohan perusahaan.

Kedua, pemerintah memastikan adanya ruang keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan di pengungsian. Upaya pemerintah ini merupakan tindakan afirmatif untuk memastikan kelompok marjinal tidak terabaikan kebutuhan dan aspirasinya.

Ketiga, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi pengungsian yang memberikan tekanan psikologis bagi pengungsi menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan oleh orang-orang terdekat dari korban. Terkait dengan ini, layanan-layanan dasar yang dibutuhkan oleh perempuan haruslah tersedia. Misalnya, layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan konseling. Penyediaan layanan ini juga harus bersifat institusional dan dianggarkan dalam budget penanganan pengungsi; bukan lagi bersifat sukarela dan insidentil.



II

Bagian II

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Di Pengungsian Akibat Konflik Bersenjata

Bagian ini terdiri dari tiga laporan, yaitu dari Nusa Tenggara Timor atau Timor Barat pasca referendum Timor Timur serta Maluku dan Poso sejak pecah konflik bersenjata di kedua wilayah tersebut. Seperti juga pada bagian sebelumnya, masing-masing laporan ini memaparkan berbagai persoalan terkini dari perempuan pengungsi dan upaya untuk bangkit setelah lebih dari 6 tahun berada di pengungsian.

Konteks pengungsian akibat konflik bersenjata menjadikan kondisi pemenuhan HAM perempuan pengungsi di ketiga provinsi ini khas. Seluruh persoalan yang ada tidak terlepas dari dinamika konflik itu sendiri. Waktu tinggal di pengungsian yang begitu lama menimbulkan persoalan baru bagi perempuan pengungsi dalam bentuk ketegangan dengan warga lokal akibat perebutan sumber daya alam seperti air bersih dan kayu bakar. Karenanya, peran pemerintah dalam penyelesaian persoalan pengungsi menjadi sorotan dari ketiga laporan disamping akses perempuan pengungsi atas keadilan terhadap pengalaman kekerasan yang ia alami.

Berbagai persoalan selama tinggal di pengungsian mengasah kekuatan perempuan pengungsi untuk bangkit dan memperjuangkan haknya secara mandiri. Inisiatif-inisiatif perempuan, karenanya, menjadi bagian tak terpisahkan dari catatan seluruh perjalanan perempuan pengungsi akibat konflik bersenjata.

PEREMPUAN PENGUNGSI MASIH TERLUPAKAN

* Meri Djami, Maria Filiana Tahu, & Sr. Sesilia SpS

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pengungsian yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah jejak persoalan pasca referendum/jajak pendapat Timor Timur pada 4 September 1999 yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Jajak pendapat ditawarkan Presiden Indonesia, BJ Habbie, untuk memberikan kesempatan pada penduduk Timor Timur menentukan masa depan politik wilayah itu[1] yaitu antara *integrasi* (otonomi di dalam bingkai negara Indonesia) dan merdeka (berdiri sendiri). Data UNAMET[2] menunjukkan bahwa dari 446.953 penduduk yang terdaftar dalam jajak pendapat yang dilangsungkan pada 30 Agustus 1999, sebanyak 21,5% atau 94.388 suara memilih untuk tetap integrasi atau otonomi khusus (pro integrasi) dan 78,5% atau 34.4580 suara memilih merdeka (pro kemerdekaan).[3]

1. Pengumuman opsi dari pemerintah RI disampaikan pada tanggal 27 Januari 1999 oleh Menlu Ali Alatas & Mentri Penerangan Yunus Yosfiah. Kompas, 28 Januari 1999.
2. UNAMET atau *United Nations Mission in East Timor* adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh PBB dalam rangka mengawal proses jajak pendapat di Timor Timur.
3. Press Release UNAMET, SG/SM/7119 SC/6722, 3 September 1999 dalam website http://www.un.org/peace/etimor99/result_frame.htm, diakses pada 3 Juli 2007.



Menenun.

Pengumuman hasil jajak pendapat berlanjut dengan kekacauan hebat dan kekerasan bersenjata di Timor Timur, seperti penembakan secara acak, penghancuran gedung pemerintahan dan rumah penduduk, penjarahan, pembakaran dan serta tindak kekerasan lainnya. Ketika situasi kekerasan semakin meningkat, penduduk Timor Timur pergi menyelamatkan diri ke hutan, ke bukit-bukit dan sebanyak lebih dari 200 ribu orang Timor-Timur mengungsi ke wilayah Timor Barat dan tinggal di kamp-kamp terkonsentrasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang.

Evakuasi penduduk dibantu oleh pemerintah Indonesia di bawah koordinasi TNI, oleh berbagai lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, oleh pihak gereja, dan juga lembaga-lembaga sosial di Timor Barat yang tergabung dalam FORSOLIDARESTE atau Forum Solidaritas untuk Timor Leste. Evakuasi dilakukan lewat darat, laut dan udara, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi. Berikut model evakuasi yang dilakukan:

Tabel 1
Model Evakuasi Pengungsi

No	Asal Pengungsi	Sarana	Daerah tujuan
1	Oekusi, sebagian Same, Ermera	Jalan kaki, truk, dalmas, Hino (truk tentara) dan transportasi darat lainnya	TTU
2	Dilli, Maliana, Ambenu, Same, Ermera, sebagian Aileu, Liquica, Ainaro, Kovalima, sebagian Manatuto, dan sebagian Lospalos	Jalan kaki, truk, dalmas, Hino dan transportasi darat lainnya, serta transportasi udara	Belu
3	Manatuto, Baucao, Viqueque, Lospalos, sebagian Aileu dan Dilli	Jalan kaki, truk, dalmas, Hino dan transportasi darat lainnya, serta udara	Kupang

1. 2. Kondisi Umum dan Karakter Pengungsi

Bagian timur (Timor Leste, dulu Timur-Timur) maupun bagian barat (Nusa Tenggara Timur) Pulau Timor dihubungkan dengan satu ruas jalan yang dikenal dengan nama Jalan Timor Raya (dulu Jalan Tim-Tim). Penduduk di kedua wilayah ini memiliki sejarah budaya yang sama.

Kondisi kesejahteraan penduduk wilayah Timor Barat berhadapan dengan berbagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan primer dan layanan dasar. Warga lokal memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah dan sulit mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak. Rata-rata mereka bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh. Hanya sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai. Dalam keterbatasan ini, penduduk lokal harus berbagi dengan pengungsi asal Timur Timur, termasuk sumber air bersih, hasil hutan dan lahan produksi. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketegangan antara warga lokal dan pengungsi. Apalagi bila jumlah pengungsi yang tinggal di kamp-kamp terkonsentrasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah warga lokalnya. Selain itu, kebanyakan wilayah-wilayah konsentrasi pengungsi berdekatan dengan rumah-rumah warga lokal.

Peristiwa ketegangan antara warga lokal dan pengungsi yang sempat direkam Tim Kemanusiaan Timor Barat dan CIS Timor, antara lain:

- Akhir Desember - hingga awal Januari 2000, konflik antara pengungsi yang berada di daerah transmigrasi Nawen dengan warga lokal di Desa Poto, Kab. Kupang. Warga lokal kemudian harus mengungsi karena rumah dan harta benda mereka dibakar oleh kelompok pengungsi.
- Januari 2000, perkelahian antara pengungsi kamp Noelbaki dan warga Desa Noelbaki. Kedua pihak didamaikan dengan acara sumpah adat.
- Mei 2000, perkelahian antar warga pengungsi di kamp Tuapukan yang berasal dari Baucao dan Viqueque. Perkelahian berujung pada pembakaran 14 rumah milik warga Tuapukan oleh sekelompok pengungsi dan seorang warga lokal menjadi korban penembakan. Konflik diselesaikan dengan acara sumpah adat.
- Di Kabupaten TTU, terjadi pengusiran terhadap beberapa keluarga warga lokal oleh pengungsi di pengungsian Oebkin.
- 25 dan 26 September 2000, konflik antara penduduk lokal dan pengungsi di Labour, Kab. Belu. Seorang laki-laki menderita luka panah di kaki kanannya, dan dirawat di Rumah Sakit Halilulik.
- 9 Oktober 2000, warga Tuapukan berdemo menuntut pemerintah untuk memindahkan pengungsi karena lahan yang dipakai untuk pembangunan kamp adalah lahan warga Tuapukan yang akan diolah pada musim hujan.
- 14 Oktober 2000, bentrok antara warga Oesao – Kupang dengan pengungsi Tuapukan. Dalam peristiwa ini, kamp milik pekerja yang ada di sekitar proyek bendungan Tilong dibakar.
- 20 November 2000, konflik antara warga Halilulik dengan pengungsi di pasar Halilulik. Barang jualan warga lokal dihancurkan oleh sekelompok pengungsi.
- 11 dan 13 Des. 2000, demonstrasi warga pengungsi yang berada di TTU dengan membentuk pagar betis mengelilingi Kantor Bupati TTU. Pengungsi menuntut uang lauk-pauk yang belum diberikan pemerintah. Selama aksi, tidak ada seorang pegawai pun yang dapat keluar dari lingkungan kantor itu.
- Di Belu terjadi perkelahian karena pembabatan hutan lindung Wemer sepanjang 5 km oleh warga pengungsi.

Ketegangan juga muncul akibat stigmatisasi yang dikembangkan baik terhadap pengungsi maupun warga lokal. Pengungsi Timor-Timur digambarkan sebagai orang-orang keras kepala, suka membunuh, tidak mau kompromi, kasar dan jorok, sedangkan warga lokal sering dicap sebagai penakut dan pemalas. Sementara harus berhadapan dengan stigmatisasi dari pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran mereka, pengungsi hidup dalam berbagai tekanan politik dan trauma konflik. Akibatnya, pengungsi cenderung penuh curiga pada orang baru, selalu merasa ketakutan, stres karena kehilangan anggota keluarga dan kuatir dengan masa depan mereka.

Dalam kondisi ini, kehidupan pengungsi khususnya perempuan menjadi rentan kekerasan. Kondisi politik yang melatarbelakangi persoalan Timor-Timur tidak memungkinkan mereka untuk dapat mengambil keputusan dan berbicara dengan orang baru. Perempuan pengungsi lebih banyak berinteraksi dengan warga lokal dalam kesehariannya. Mereka biasa bertemu di tempat-tempat pengambilan air, kayu bakar, pasar dan kebun. Tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan kasar dari masyarakat lokal. Namun, banyak juga perempuan yang berhasil membangun relasi harmonis dengan warga lokal.

1. 3. Tantangan Melakukan Pemantauan

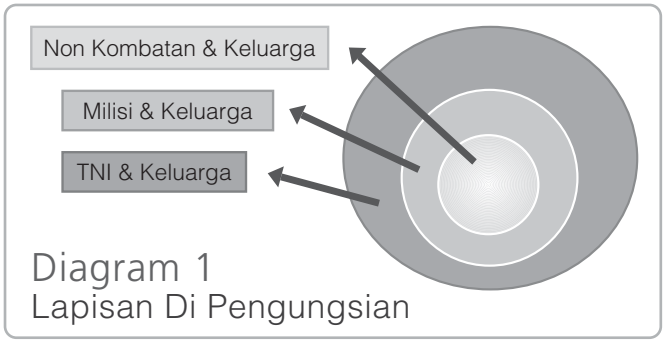


Diagram 1
Lapisan Di Pengungsian

Melakukan pekerjaan sebagai pemantau di lokasi pengungsian Timor Barat pada 6 bulan pertama hingga 1 tahun pengungsian, bukanlah hal yang mudah. Para pemantau harus siap menghadapi penolakan dalam bentuk makian, ancaman pemukulan bahkan ancaman pembunuhan. Selain tingkat kecurigaan yang tinggi pada orang baru, pola penempatan pengungsi pun sangat menyulitkan. Seperti tercermin dalam Diagram 1, lapisan terluar atau pintu masuk kamp pengungsi ditempati oleh TNI dan keluarga TNI. Lapisan kedua ditempati oleh kelompok milisi atau eks kombatan dan keluarganya. Lapisan paling dalam ditempati oleh warga yang non kombatan. Pola penempatan ini menyebabkan pemantau sulit mendapatkan informasi yang akurat dari warga pengungsi non kombatan tentang tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di lokasi tersebut. Bila hanya menggantungkan informasi pada jawaban penghuni kamp lapisan pertama, maka semua persoalan akan disederhanakan atau malah dikatakan *tidak ada masalah* atau *sudah biasa*.

Hambatan lain dalam memperoleh informasi akurat adalah kontrol pemimpin pada pemberian informasi. Sebagian banyak dari pengungsi datang dengan mengikuti orang yang dituakan atau yang dianggap sebagai pemimpin mereka, seperti tetua adat yang datang dari daerah asal yang sama, kepala desa, saudara tentara atau camat ketika di daerah asal. Mereka kemudian tinggal di lokasi kamp bersama-sama. Para tetua ini menjadi tokoh sentral dalam struktur sosial pengungsi, meskipun sudah berada di luar kamp. Akibatnya, mereka tidak selalu tahu dan paham persoalan yang dihadapi oleh pengungsi. Tokoh lain yang muncul adalah koordinator kamp yang dipilih dengan dua syarat utama, yaitu melek huruf dan berani berbicara di depan umum. Hanya sedikit perempuan yang dipercaya warga untuk menjadi koordinator- hanya bila memang tidak ada laki-laki yang bisa memenuhi syarat itu dan jumlah rumah tangga di komunitasnya kecil. Sejauh pengamatan kami di Timor Barat, rata-rata jumlah rumah tangga yang dikoordinir oleh perempuan sekitar 70-100 rumah tangga. Pada umumnya koordinator kamp bertugas mendata komunitasnya dan mengatur bantuan. Karena merujuk pada struktur sosial dan ketergantungan terhadap pemimpin, hunian pengungsi cenderung berkelompok-kelompok sesuai daerah asal, per-kabupaten, per-kecamatan hingga per-dusun. Pada saat bersamaan, hal ini cukup memudahkan para pemantau mengidentifikasi alamat orang yang dibutuhkan.

Tantangan lainnya adalah bahasa. Dalam kehidupan keseharian mereka selalu menggunakan bahasa daerah seperti Tetum, Dawan, Makasae, Bunak dan Fataluku. Kebanyakan dari mereka akan berbicara bahasa Indonesia seperlunya saja. Ada pula yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini menjadi hambatan bagi pemantau yang tidak bisa berbahasa daerah.

Penolakan pengungsi untuk memberikan informasi juga terjadi ketika pemantau menyampaikan bahwa dokumentasi ini tidak terkait dengan penyerahan bantuan. Pemantau juga dicap sebagai *penjual data* pengungsi untuk mendapatkan uang. Kesulitan lainnya adalah untuk mendapatkan data pengungsi yang akurat karena jumlah pengungsi selalu berubah-ubah, hasil rekayasa pihak-pihak yang hendak memperoleh keuntungan dari pembagian bantuan ataupun untuk memperkuat posisi tawar di era suksesi para pejabat pengungsi.

Berhadapan dengan persoalan-persoalan tersebut, para pemantau membangun strategi, antara lain:

- Memastikan penerimaan masyarakat; biasanya membutuhkan waktu lama dengan pemantau tinggal bersama di kamp pengungsian selama 1-3 bulan.
- Melakukan pendekatan dengan para pemegang jabatan struktur di komunitas pengungsian.
- Mencari informasi tempat-tempat pengungsi perempuan dan laki-laki beraktivitas setiap harinya.
- Terlibat dalam setiap aktivitas masyarakat di kamp.
- Mempunyai teman akrab di komunitas untuk membantu proses pemantauan sekaligus menjembatani tantangan bahasa.

2. HASIL PANTAUAN

2. 1. Pergulatan Perempuan di Pengungsian

Kami bukan pengungsi. Kami hanya berbeda situasi dengan kalian, tapi kami ini manusia yang sama juga seperti saudara atau ibu kalian kalian. Tolong perlakukan kami sebagai diri kalian sendiri …
(R, Kader Kesehatan di Kamp Tuapukan)

2. 1. 1. Bantuan Pokok

Pada masa tanggap darurat, para pengungsi memperoleh bantuan pokok dari pemerintah berupa uang lauk-pauk sebesar Rp. 1.500/jiwa/hari dan bantuan beras 1 kg/jiwa/hari. Bantuan ini diberikan dengan waktu yang bervariasi; ada yang 5 hari sekali, seminggu sekali sampai sebulan sekali. Air bersih setiap harinya didistribusi ke kamp-kamp dengan menggunakan tanki berkapasitas 4.000 liter dan 5.000 liter. Tempat penampungan air dari fiber disediakan di titik-titik lokasi yang dekat dengan pinggir jalan agar mudah diakses oleh para pengungsi. Bantuan lain seperti minyak goreng, supermi, ikan kaleng, biskuit, gula, dan garam biasanya diterima sekali seminggu. Ada juga bantuan makanan tambahan berupa susu dan bubur kacang hijau bagi anak-anak, balita dan ibu hamil/menyusui yang diberikan tiap minggu. Bantuan berasal dari berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Bentuk hunian yang dibangun bagi para pengungsi sebagian besar berbentuk barak dan tenda. Karena jumlah pengungsi sangat banyak dan kapasitas jumlah barak dan tenda terbatas, banyak dari pengungsi yang terpaksa tinggal gedung-gedung bekas kantoran. Sebagian lagi ditampung sementara di rumah-rumah warga lokal, namun kemudian mereka memilih membuat rumah darurat untuk tinggal. Kebanyakan ruang barak yang rata-rata berukuran 6 m^2 ditinggali oleh lebih dari 3 keluarga. Hal ini sangat berdampak pada kenyamanan dan keamanan perempuan.

Pada masa tanggap darurat, pengungsi juga mendapat bantuan pakaian, alat dapur, sabun mandi dan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan layanan administrasi kependudukan serta pembuatan fasilitas umum untuk hidup bersama seperti MCK, tempat pembuangan sampah, saluran limbah, dan sarana transportasi. Hampir setiap hari banyak petugas masuk keluar kamp untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan ini, baik itu Dinas Sosial, TNI, lembaga-lembaga PBB, lembaga internasional lain seperti CWS, JRS, MSF, dan CCF, lembaga agama, sekolah, LSM Nasional, LSM Lokal, dll. Bantuan-bantuan pokok dibagikan di lapangan umum berdasarkan data yang dipegang oleh petugas dari koordinator kamp dan SATKORLAP.

Meskipun bantuan banyak, perempuan belum menjadi perhatian penting. Berikut kesaksian para perempuan tentang pengalaman mereka mengakses bantuan dan layanan dasar:

"Di kamp ini kita semua pernah rasa [dapat] bantuan, walau tidak semua mendapatkannya. Kalau ada orang yang tidak dapat bantuan, biasanya kita rela [ber]bagi… Cape sekali berkelahi terus dengan petugas karena soal nama penerima yang tidak tercantum. Yang jadi soal adalah para koordinator sering tipu data untuk dapat bantuan lebih.." (R, 30 tahun, Kamp Tuapukan)

"Yang biasa ambil bantuan hanyalah laki-laki…kita perempuan biasanya ikut. Karena nama-nama orang Tim-Tim itu mirip, kita ikut untuk memastikan. Tapi kita sering diusir oleh petugas dan orang-orang yang antri… coba kalau mereka daftar nama suami istri, mungkin lebih gampang… Bantuan makanan yang paling sering adalah supermi. Anak-anak pakai makan main-main [makanan ringan]. Kadang-kadang jadi tidak cukup. [Akibatnya] hanya makan nasi kosong saja. Kita biasa minta daun-daun seperti daun ubi atau daun pepaya untuk sayur. Kalau tidak ada minyak, kita rebus satu kali dengan beras. Kalau sudah begini, anak-anak tidak mau makan. Jadi kita harus beli lagi supermi untuk mereka.." (M, 35 tahun, Kamp Noelbaki)

"Yang paling susah itu air. Saya ingat dulu itu kita harus antri lama sekali supaya dapat air." (N, 24 tahun, Kamp Tuapukan)

"Paling susah kalau mens. Kita biasa pakai kain tapi tidak ada kain. Jadi kalau ada bantuan pakaian daster, kita potong kecil-kecil untuk buat kain pembalut.." (C, 30 tahun, Kamp Tuapukan)

"Pernah ada yang kasih bantuan pembalut yang pakai kapas itu, tapi kita yang tua-tua ini tidak biasa pakai, anak muda saja yang pakai…" (R, Kamp Noelbaki)

"Kami masuk pengungsian Raknamo cuma [mem]bawa makanan yang ada. Kita mau datang [ke pengungsian] karena pemerintah janji mau kasih langsung jaminan hidup. Tapi saya kecewa sekali, ternyata harus tunggu lama baru dapat. Kasian anak-anak saya. Mereka masih kecil-kecil. Kalau orang dewasa memang masih bisa tahan sedikit.." (C, pengungsian Raknamo).

Perempuan yang sulit memperoleh layanan adalah kelompok lansia karena kebanyakan mereka tidak dapat berbahasa Indonesia. Kelompok lain yang kesulitan memperoleh akses bantuan dan layanan adalah para janda sipil. Walaupun telah mendatangi koordinator kamp, mereka tetap sering dilupakan dalam pembagian bantuan. Jika mereka menuntut, koordinatornya akan mengatakan "*sabar, nanti kalau ada bantuan pasti kalian dapat"*. Daripada harus berdebat dengan koordinator dan kemudian menjadi buah bibir di komunitas, mereka mendatangi para pemilik tanah di sekitar kamp untuk bekerja menjadi buruh tani di sawah milik warga lokal.

Di salah satu kamp di TTU, seorang ibu menangis karena tidak mendapat bantuan beras dengan alasan ia tidak bekerja. Ibu itu mengalami diskriminasi karena ia adalah seorang janda. Suaminya pergi mencari pekerjaan di Malaysia dan hingga kini belum ada kabar. Di Kamp Nain di TTU, seorang ibu menjadi korban diskriminasi oleh koordinator kamp pada tahun 2001. Tiga kali berturut-turut ia tidak diberikan bantuan dengan alasan statusnya janda sehingga dinilai tidak dapat berkontribusi banyak dalam setiap aktivitas bersama di kamp. Kegigihan ibu itu menuntut haknya mengundang keprihatinan para perempuan di kamp tersebut. Seorang perempuan yang dituakan



Ambil air.



Perempuan lansia di pengungsian.

di kamp tersebut kemudian mengumpulkan koordinator kamp dan para pengurus pengungsian untuk menjelaskan alasan mereka tidak memberikan bantuan kepada ibu itu. Hasil dari upaya ini, si ibu memperoleh kembali haknya.

2. 1. 2. Layanan Kesehatan

"Kalau sakit, kita harus ke bidan di Polindes atau Puskesmas. Obat di bidan harus kita beli. Di Puskesmas enak, obat ada yang gratis kecuali infus. Masalahnya, kita harus bayar uang transport… paling susah kalau harus rujuk ke rumah sakit umum. Kita harus urus surat keterangan tidak mampu supaya dapat keringanan… urus surat itu susah, tunggu sampai 1 minggu paling cepat… Kalau hanya sakit pilek, batuk, kulit, pusing atau sakit perempuan seperti luka di susu, kita pakai obat kampung saja. Tapi kalau malaria, diare baru kita beli obat…" (R, Kamp Tuapukan)

"Di sini ada polindes tapi ibu bidan tidak setiap hari di sini. Jadi, kalau sakit kami harus ke puskesmas. Tapi hujan seperti ini kami tidak bisa ke puskesmas karena di kali banjir besar. Jadi kami pakai obat kampung saja." (M, Kamp Nain)

2. 1. 3. Layanan Konseling

Layanan konseling tidak terdapat di setiap kamp. Kalau suster atau relawan perempuan yang mereka kenal datang ke kamp, baru perempuan pengungsi bebas menceritakan masalah mereka. Di Kamp Nain, TTU dan Kamp Tulamalae Belu beberapa perempuan telah beberapa kali mengikuti Pelatihan Konseling. Mereka biasa membantu para korban di sekitar tempat tinggal mereka.

2. 1. 4. Layanan Kesehatan Reproduksi, Ibu Hamil, Melahirkan dan Menyusui

Tidak ada penyuluhan kesehatan reproduksi untuk laki-laki. Untuk alat KB, perempuan pengungsi harus membeli. Kebanyakan suami mereka melarang untuk ikut KB, karena takut kalau ada pengaruh pada kesehatan di masa yang akan datang. Misalnya saja penuturan A di Kamp Nolebaki *"Pernah ada tetangga yang pakai suntik tapi dia tidak cocok, dia sering panas dan muntah-muntah dan suaminya suruh berhenti."*

Sejak tahun 1999 hingga sekarang tidak tersedia layanan yang memadai bagi ibu hamil/melahirkan dan menyusui. Misalnya penuturan B, pengungsi di Kamp Tuapukan. *"Saya melahirkan anak ke-7 dengan dibantu oleh suami saya. Waktu itu hujan deras sekali, bulan Desember 1999. Dengan alas tikar*

di atas tanah yang berlumpur di dalam rumah, saya melahirkan J. Tidak ada orang bantu kami. Saya juga tidak tau mau menyuruh suami ke mana cari bantuan. Malam itu rasanya saya mau mati saja. Saya melahirkan J dengan selamat, tapi saya menangis terus dan tidak bisa diam, suami saya marah dan membentak saya supaya diam…"

Diskriminasi layanan melahirkan juga dialami perempuan yang hamil tanpa ikatan perkawinan. *"Biasanya di sini kalau ada yang melahirkan, istri koordinator bantu cari bidan. Waktu adik saya B melahirkan, tidak ada yang mau bantu. Mereka bilang, B bergaul bebas. Memang adik saya tidak punya suami tapi dia anak yang baik… Akhirnya saya bantu B melahirkan dengan cara kami saja yaitu ikat tali di tiang tengah rumah dan B gantung untuk "muku" (usaha sendiri untuk mendorong bayi keluar dari kandungan)".* (J, Kamp Nain)

"Dulu pernah ada makanan tambahan seperti susu, bubur kacang hijau untuk ibu hamil atau menyusui, tetapi tidak lama. Kalau anak-anak sering dapat terus… sekarang ini ada posyandu, ibu hamil biasa datang untuk kontrol berat badan saja…" (J, Kamp Tuapukan).

2. 1. 5. Layanan Pendidikan

Pada sejumlah sekolah dasar, khususnya kelas 1 sampai 4, ada pembagian waktu sekolah. Anak lokal bersekolah pada pagi hari dan anak pengungsi bersekolah pada sore hari. Demikian juga dengan jadwal guru. Kebijakan ini dibuat oleh pihak sekolah karena ada kendala bahasa untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak pengungsi. Akibat kebijakan ini, anak perempuan pengungsi sering alpa sekolah karena harus membantu orang tua antri mengambil air dan mencari kayu bakar di hutan. Banyak dari mereka yang kemudian tidak naik kelas, menjadi malu dan akhirnya memilih untuk berhenti sekolah. M, 12 tahun, siswi SD GMIT mengatakan bahwa ia tidak bisa ke sekolah karena pada sore hari ia harus membantu orang tua bekerja di kebun. Ketika ia protes, orang tuanya memukulnya dan mengatakan ia pemalas. *"Bapa suruh saya berhenti sekolah saja karena dia tidak punya uang dan ibu saya cuma diam..",* ujar M.

2. 1. 6. Layanan Hukum

Hingga saat ini belum ada lembaga bantuan hukum yang bekerja di daerah pengungsian. Penyelesaian kasus kekerasan juga lebih sering mengandalkan hukum adat. Keputusan hukum adat berupa denda adalah urusan laki-laki. Tidak ada perempuan yang dianggap layak untuk duduk bersama untuk memutuskan denda. Denda adat untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa adalah 1 ekor babi, uang 1 juta rupiah untuk kekerasan terhadap istri dan 1 ekor sapi dan uang 5-10 juta rupiah untuk kasus pemerkosaan. Kebanyakan putusan dapat dikompromi dan ada aturan cicil bagi pelaku. Sementara itu pihak korban harus menanggung semua biaya konsumsi selama proses adat berlangsung.

2. 1. 7. Layanan Administrasi dan Kependudukan

Walaupun sudah 7 tahun tinggal di tempat pengungsian, belum ada penetapan RT/RW atau lingkungan bagi wilayah domisili pengungsi. Pihak desa mengandalkan koordinator kamp dan tokoh adat yang semuanya adalah laki-laki untuk kendali sosial. Sebagian banyak anak pengungsi yang lahir di kamp belum memiliki Akta Kelahiran. Karena tidak terdaftar sebagai warga lingkungan, pengungsi harus membayar calo Rp. 40.000 s.d. Rp. 50.000 lebih mahal atau bahkan sampai dua kali lipat dari harga resmi. Seorang ibu mengaku pernah membayar Rp. 100.000 karena ia sangat membutuhkan KTP untuk pengurusan paspor.

2. 1. 8. Fasilitas Bersama

Semua fasilitas seperti jalan masuk, saluran air, tempat sampah, barak dan lain-lain dibangun pada saat pengungsi mulai masuk. MCK dibangun terbatas jumlahnya. Cuma ada 3 atau 4 WC bagi 10 rumah tangga, bahkan ada yang bagi 20 rumah tangga. Jumlah barak yang disediakan juga tidak cukup menampung semua pengungsi.

Pengungsi yang tidak bisa mengakses fasilitas barak dan MCK adalah mereka yang datang kemudian setelah barak penuh dihuni. Kebanyakan pengungsi yang menghuni barak adalah TNI, PNS dan pensiunan. Penduduk sipil mendapatkan tenda untuk membangun pemukiman sementara dan membuat kamar mandi darurat.

Penerangan masih gratis bagi yang berada dalam lokasi kamp, namun tidak ada penerangan jalan. Mereka yang tinggal di dekat warga lokal, khususnya di Kamp Tuapukan, harus membayar Rp.15.000/bulan pada tuan rumah di mana mereka menarik aliran listrik. Di malam hari jarang terlihat perempuan berjalan sendiri atau berdua di luar rumah. Perempuan pengungsi hanya keluar beramai-ramai jika ada pesta atau kegiatan gereja. Para lelaki berkumpul main judi dan minum-minum alkohol.

2. 1. 9. Pengambilan Keputusan: *Suara Perempuan Belum Didengarkan*

Jenis pertemuan yang tidak pernah diadakan adalah pertemuan yang membicarakan tentang penggunaan fasilitas bersama dan keamanan lingkungan. Kalaupun ada pertemuan, perempuan jarang diundang karena mereka dianggap hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga, bukan kepala keluarga dan tidak bisa bicara di depan umum. Biasanya, perempuan hanya diminta untuk mendukung jalannya pertemuan dengan menyiapkan konsumsi. Para lansia dan janda sipil tidak pernah diundang dalam pertemuan apapun karena mereka dianggap tidak dapat mengambil keputusan dan hanya mengikuti saja. Selain itu, perempuan yang bersuara keras dalam forum pertemuan seringkali dinilai sebagai perempuan yang suka banyak omong.

Dalam aktivitas sehari-hari, perempuan pengungsi sering berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting sehubungan dengan persoalan sosial yang mereka rasakan, misalnya tentang distribusi bantuan yang adil dan berpihak pada yang lebih membutuhkan seperti janda, lansia dan anak yatim piatu; tentang koordinator yang mengkorupsi bantuan; tentang layanan kesehatan dan pendidikan; tentang pelaku kekerasan yang harus di penjara; tentang pulang ke Timor Leste, pengungsian dan rekonsiliasi para elit politik.

Alasan perempuan jarang didengarkan:

- *"…kita bukan pemimpin"* (O, Tuapukan)
- *"…kita perempuan yang dianggap cerewet dan suka omong kosong"* (A, Noelbaki)
- *"…kita belum banyak pengalaman…"* (R, Tuapukan)
- *"mungkin dianggap hanya banyak protes"* (C, pengungsian Raknamo)
- *"…takut berbeda dengan laki-laki dan biasanya membuat orang tidak suka kita"* (C, Tuapukan)

Perempuan pengungsi yang sering ikut pertemuan adalah mereka yang aktif di gereja, mahasiswi, atau pernah jadi pemimpin regu persit atau kader posyandu. Untuk menyikapi pembatasan partisipasi perempuan, mereka mempengaruhi atau mengajak sesama perempuan untuk lebih banyak hadir dalam setiap pertemuan. Hanya saja, prakarsa ini sering berbenturan dengan persoalan perempuan tidak punya waktu karena harus terus bekerja sepanjang hari.

2. 1. 10. Keterlibatan Perempuan dalam Kegiatan di Pengungsian

Kegiatan yang dilakukan di pengungsian antaranya pembagian bantuan bagi pengungsi, layanan bagi pengungsi, penggunaan fasilitas bersama, pemilihan koordinator pengungsi atau ketua lingkungan, keamanan lingkungan, penanganan kasus kekerasan atau kejahatan, penyebarluasan informasi, perkumpulan warga, pilihan dan pengaturan pemulangan atau pemindahan pengungsi, bepergian ke luar pengungsian, dan urusan keluarga. Bantuan dan layanan yang diberikan tidak lagi berupa bantuan dasar, tapi lebih kepada dorongan untuk kemandirian lewat pemberian informasi, sosialisasi dan pemberdayaan bagi mereka yang telah berada di lokasi pengungsian.

Perempuan menjabat posisi strategis pada kegiatan pelayanan kesehatan, pembagian bantuan makanan tambahan, bepergian ke Timor Leste untuk kunjung keluarga dan memantau aset keluarga serta sebagai agen rekonsiliasi aras bawah. Untuk kegiatan yang lain mereka hanya terlibat secara praktis seperti membantu konsumsi, menghadiri undangan dan sebagai pembawa acara.

2. 1. 11. Rasa Aman atau Nyaman Perempuan di Pengungsian

Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab berkurangnya rasa aman dan nyaman perempuan pengungsi. Pertama, konstruksi barak dan MCK yang rapuh dan berhimpitan kadang-kadang membuat perempuan, khususnya perempuan muda, merasa tidak nyaman jika harus tidur siang saat rumah sepi. C, 23 tahun, di Kamp Tuapukan, terpaksa harus rela berkeringat jika harus tidur siang karena ia perlu memakai kain/selimut untuk menutupi sekujur tubuhnya atau ia harus menggunakan celana panjang. Kalau mau mengganti pakaian, M, 21 tahun, di Kamp Noelbaki, selalu merasa was-was ada laki-laki yang mengintip atau sekedar lewati pinggir kamarnya.

Kedua, rasa aman perempuan pengungsi juga terkait dengan ada tidaknya penerangan. Menurut M, 17 tahun, Kamp Noelbaki, *"lampu di rumah selalu dinyalakan sampai pagi… kalau listrik mati (padam) saya selalu memeluk adik perempuan atau tidur dengan tante di sebelah rumah"*; O, Tuapukan, *"tidak ada perempuan yang berani jalan malam sendirian, kalau ada pasti dia lari-lari saja…"*. Berpergian sendiri, bahkan berdua dengan perempuan lain, juga tidak dilakukan bila hendak ke kebun atau mencari kayu api. Menurut S, di Kamp Tuapukan, hal ini kerena, *"…pernah ada kasus seorang janda tua hampir diperkosa ketika pulang dari kebun. Sebaiknya kita pergi rame-rame…"*

Ketiga, rasa nyaman perempuan pengungsi juga terkait dengan peran gender perempuan. Karena perempuan bekerja untuk mengambil air, hampir setiap hari mereka harus berhadapan dengan omelan dari warga lokal pemilik sumur. Ini sering terjadi pada musim panas karena debit air yang berkurang.

Keempat, sering terjadinya pencurian di tempat pengungsian. Misalnya O, seorang janda pensiunan, mengaku bahwa rumahnya sering kecurian, mulai dari burung nuri peliharaannya, uang sampai perhiasan. Kejadian ini terjadi setiap kali ia bepergian ke Kabupaten Atambua untuk mengambil uang pensiun. *"…Saya tidak pernah tahu siapa pelakunya dan para tetangga pun tidak tahu…"*

Kelima, tidak adanya informasi yang memadai. Misalnya saja terkait dengan isu tsunami pasca bencana serupa di Aceh. Pada tanggal 4 Januari 2005 sekitar jam 8 malam dan listrik sedang padam, ada yang berteriak *"air laut naik, air laut datang!"* Pengungsi berlarian sambil berteriak panik padahal tidak terjadi apapun.

Keenam, adanya orang yang suka mengganggu, mengancam atau mengintimidasi perempuan, terutama bila perempuan jalan sendiri. Di Kamp Tuapukan, salah satu pelaku adalah germo yang menjalankan kegiatan prostitusi di rumahnya. Bahkan dengan beramai-ramai pun perempuan tidak akan lewat rumahnya.

Ketujuh, terkait kebijakan atau peraturan yang berdampak langsung pada perempuan pengungsi. Pada tahun 2003, perempuan pengungsi yang berdagang sayur di sepanjang Kamp Tuapukan harus berhadapan dengan sekelompok tentara yang menghancurkan jualan mereka. Tindakan ini dilakukan pada sekitar jam 10 pagi karena ada perintah dari Danrem untuk merobohkan bangunan apapun dalam radius 10 meter dari pinggiran ruas jalan Timor Raya. Tentara itu sama sekali tidak peduli dengan tangisan dan teriakan para perempuan itu. Sebanyak 30 perempuan pengungsi berdemonstrasi menuntut ganti rugi di depan gedung Korem. Mereka kemudian mendapatkan Rp. 100.000 dan disuruh bubar. Banyak dari mereka yang tidak merasa puas tapi tidak berdaya.

Kebijakan lainnya adalah tentang bantuan bahan bangunan rumah dan terminasi pengungsian. Kebijakan ini berhubungan dengan pengurusan surat-surat untuk pemenuhan prosedur penerimaan bantuan. Dalam proses pengurusan surat, seringkali terjadi pungli oleh para koordinator karena perempuan tidak tahu letak kantor pemerintahan dan bagaimana cara mengurusnya, selain juga karena mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Beberapa janda mengaku harus membayar Rp. 10.000 per-hari sebagai uang transport untuk pengurusan surat. Belum lagi jika ada yang harus difotokopi. Setelah itu mereka terikat perjanjian dengan koordinator untuk membayar komisi dari bantuan yang diterima. Pada tahun 2003 beberapa perempuan mengorganisir diri untuk mengurus bantuan bagi pasangan kawin campur (pengungsi dan warga asli NTT). Ketika bantuan akan cair, beberapa tokoh warga lokal dan pengungsi membubarkan mereka karena dituduh berencana korupsi.

Kedelapan, terkait dengan lokasi kamp yang rawan bencana. Sejak tahun 2003, Kamp Tuapukan yang terletak di wilayah Kabupaten Kupang sering dilanda banjir pada musim hujan. Pada tahun itu, sekitar lebih dari 150 keluarga harus mengungsi karena rumah mereka terendam lumpur, bahkan ada sekitar 50 rumah yang roboh. Kejadian ini membuat para pengungsi yang masih tinggal di kamp merasa kuatir pada musim penghujan. Bencana lain yang terjadi adalah angin topan yang sering merobohkan rumah-rumah mereka. Dalam tiga tahun terakhir ini, pengungsi juga dihadapkan dengan bencana gagal panen akibat kurangnya curah hujan. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan pangan di pengungsian semakin terpuruk.

Faktor lainnya adalah konstruksi barak yang berhimpitan dan hanya terbuat dari kayu membuat lokasi pengungsian ini rentan dengan bahaya kebakaran. Pada tahun 2004, terjadi kebakaran yang melahap rumah dan harta benda 67 keluarga pengungsi di Viqueque, Kecamatan Lacluta. Karena jumlah korbannya sedikit atau kurang dari 500 rumah tangga, penanganannya menjadi lebih mudah. Secara khusus perempuan korban bencana ini memperoleh bantuan khusus seperti pembalut,

pakaian dalam, mukena dan sajadah, dan para ibu hamil yang akan melahirkan langsung mendapatkan pertolongan medis. Penanganan darurat yang efektif ini juga karena adanya data yang akurat tentang pengungsi, misalnya jumlah perempuan hamil, terdesak untuk segera melahirkan, ibu menyusui, balita, orang sakit dan orang cacat.

Pasca kerusuhan Januari 2000 di Kamp Noelbaki dan kerusuhan Mei 2000 di Tuapukan, kecuali keamanan lingkungan, kegiatan keamanan langsung diprakarsai oleh tentara. Hal ini berlangsung selama satu tahun. Hingga kini situasi cenderung aman. Hanya saja, jika ada pesta/acara gereja yang berlangsung hingga malam hari, dibentuk panitia keamanan dan sangat jarang perempuan dilibatkan. Dalam hal keamanan, perempuan pengungsi sering ke daerah perbatasan Timor Leste untuk memantau perkembangan bahaya.

2. 2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam realitas masyarakat yang masih berideologi patriarki, perempuan pengungsi di Timor Barat, rentan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi, apalagi pada situasi konflik. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan perempuan menjadi berlipat ganda. Ia harus terus bekerja keras setiap hari untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menjembatani banyaknya tantangan untuk bertahan hidup. Pada saat bersamaan, ia juga harus menanggung penderitaan akibat dilecehkan kemanusiaannya sebagai seorang perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di lokasi pengungsian sampai sejauh ini masih didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, selanjutnya berturut-turut disusul perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual dalam bentuk ingkar janji menikah. Bentuk kekerasan lainnya adalah yang terkait dengan praktek adat, misalnya dipaksa menikah atau tidak diijinkan menikah karena persyaratan adat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak calon suaminya. Pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di pengungsian Timor Barat menunjukkan betapa perempuan menjadi sasaran pelampiasan kemarahan, stres, ketidakpuasan, buruknya kondisi ekonomi, nafsu dan lain-lain oleh suami, paman, ayah, kakak laki-laki dan pemuda tak dikenal.

Kasus *Incest*

L, 15 thn, pelajar kelas II SMP, adalah anak perempuan tertua dan mempunyai sembilan saudara kandung yang kesemuanya adalah laki-laki. Ketika kehamilannya tak bisa lagi disembunyikan, dan tetangga mulai menggunjingkannya, L yang periang berubah menjadi murung dan tidak mau keluar rumah, termasuk ke sekolah.

L kemudian menceritakan pengalaman kekerasan kepada ibunya. Karena ada tiga adik kecil, L dan ibunya selalu bergantian keluar rumah, termasuk untuk pergi ke gereja pada hari minggu. Setiap kali sang ibu berada di kebun atau berada di luar rumah, ayah L memerkosanya. *"Bapa kasih hamil saya,"* kata L kepada ibunya. Mereka hanya menangis sambil berpelukan, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kejadian ini didiamkan saja, karena L dan ibunya tidak ingin pelaku yaitu ayah dan suaminya mendapat sanksi adat yang berat. *(Diceritakan pada tanggal 23 Desember 2006)*

KDRT di pengungsian dilakukan oleh laki-laki dalam kapasitas sebagai suami, ayah atau saudara, antara lain dengan alasan perbedaan pilihan politik antara suami-istri, istri tidak dapat memberikan anak laki-laki, dan istri tidak mau melayani suami. Mabuk, judi, terlilit utang dan pengangguran adalah faktor-faktor pemicu yang juga seringkali dijadikan alasan. Perempuan sering dimaki, dimarahi di depan umum dan dianiaya. M, 40 tahun, mengatakan sudah lama ia ingin kembali ke Timor Leste tetapi suaminya malah menuduh keinginannya itu karena ia juga mempunyai suami di sana. M dipukuli dan dianiaya karena tidak bisa memberikan anak laki-laki. Ia juga hanya bisa menangis melihat 4 anak perempuan sering dipukul oleh suaminya tanpa alasan yang jelas. Penderitaannya semakin bertambah karena suaminya ternyata diketahui berselingkuh dengan tetangganya yang sudah bersuami. Ia bertahan dengan bekerja keras, berdagang di pasar sepanjang hari, untuk menghidupi 4 anaknya. Belakangan suaminya mulai terlihat sering membantunya di pasar.

Lain lagi kisah K, 35 tahun, ibu tiga anak di salah satu kamp di Kab. TTU. K adalah pencari nafkah utama bagi keluarganya, yang ia lakukan dengan mencuci pakaian orang. Ia sering menjadi sasaran amukan suami dengan alasan-alasan sederhana, misalnya makan tidak enak atau karena suaminya cemburu. Setiap kali dianiaya, suaminya mengancam akan membunuh K bila ia mengadu kepada orang lain. Awalnya karena takut, K mengaku memar di wajahnya akibat jatuh di kamar mandi atau terbentur batu. Karena kejadian ini terus berulang, K akhirnya memilih mengungkapkan kasus ini untuk mengakhiri penderitaannya. Pada malam 31 Desember 2006, K dianiaya lagi. Keesokan pagi, dengan alasan membawa cucian ke sungai, K keluar dari rumah. Ia lalu pergi menitipkan cucian di rumah tetangga dan pergi mencari perlindungan pada masyarakat lokal yang tinggal berdekatan dengan lokasi pengungsian. Keluarga yang menerimanya melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke polisi untuk diproses secara hukum.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kamp, tetapi juga terus berlangsung ketika mereka telah tinggal di lokasi pemukiman bagi pengungsi. Di TTU, salah satu korban KDRT mengatakan bahwa ia sering dipukuli dengan kayu oleh suaminya. *"Dulu waktu kami masih di kamp, dia sering pukul saya pakai senjata; dia suka ancam mau tembak saya. Saya pikir mungkin dia stres dengan kehidupan di kamp yang darurat… tapi ternyata saya salah! Kami sudah pindah di rumah baik begini juga, bapak masih melakukan kebiasaannya memukul saya dan anak-anak.."* Begitu pula dengan kasus perkosaan, seperti yang dikemukakan ibu dari korban pemerkosaan oleh tetangganya di pengungsian Kabupaten Kupang, *"Saya pikir hidup di pengungsian akan jauh lebih tenang, tapi ternyata tidak… kami perempuan ternyata harus lebih hati-hati…"*

3. OPSI BAGI PEREMPUAN PENGUNGSI

Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi SATKORLAP dan bekerja sama dengan pihak UNHCR, IOM dan UNDP memberikan tawaran *solusi layak* kepada pengungsi, yaitu (a) integrasi sosial dengan penduduk Indonesia atau (b) repatriasi atau kembali ke Timor-Timor yang kini menjadi RDTL. Tawaran ini sudah dimulai sejak tahun 2000 dan sebagian besar pengungsi telah mengambil keputusan untuk menjadi warga negara RDTL. Tidak sedikit pula pengungsi bertahan tinggal di kamp. Sampai saat ini ada sekitar 6.811 keluarga yang masih hidup di 71 kamp pengungsian terkonsentrasi yang tersebar di wilayah Timor Barat. Lima diantaranya dihuni antara 2.500 dan 3.000 jiwa (data hasil pemantauan umum Cis Timor, tahun 2006).

Tabel 2
Pilihan Bagi Perempuan Pengungsi

Pilihan perempuan	Repatriasi	Integrasi sosial	Bertahan di kamp
Faktor pendukung pilihan	◦ Banyak keluarga di Timor Leste yang tidak mengungsi ◦ Lebih aman tinggal di tanah sendiri ◦ Suami dan keluarga besar mendukung pilihan ◦ Tidak terlibat dalam konflik 1999 ◦ Pemerintah dan lembaga-lembaga PBB memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan selama masa perjalanan dan jaminan uang sebesar Rp.750.000/jiwa	◦ Kehidupan di kamp pengungsian yang tidak pasti ◦ Ingin tinggal di rumah dan tanah sendiri ◦ Diusir oleh pemilik tanah, baik itu pemerintah maupun masyarakat lokal ◦ Konflik dengan warga lokal karena perebutan air dan tanah ◦ Anggota keluarga mau pindah ke tempat pemukiman bagi pengungsi/*settlement* ◦ Kamp pengungsi rentan bencana ◦ Persamaan karakteristik budaya ◦ Kebijakan pemerintah yang menjamin pada pilihan ini ◦ Persiapan masa depan ◦ Memanfaatkan BLT	◦ Tanah/bangunan pemerintah ◦ Kebaikan pemilik tanah ◦ Letaknya strategis; akses transportasi, sekolah, layanan kesehatan & pasar ◦ Dampak kenaikan BBM ◦ Kebijakan dan implementasi bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran ◦ Tidak tegasnya pemerintah dalam kebijakan penutupan kamp ◦ Kesempatan usaha ◦ Perubahan pola hidup dari desa ke kota ◦ Banyak keluarga yang berada di kamp ◦ Kekuatiran untuk melanjutkan hidup di tempat baru ◦ Tidak punya tanah ◦ Kesadaran hidup mandiri masih bersifat parsial
Faktor penghalang	◦ Pilihan perempuan tidak didukung oleh suami dan keluarga ◦ Faktor ekonomi dan keamanan di Timor Leste ◦ Menunggu anak selesai sekolah ◦ Suami PNS/TNI aktif ◦ Trauma masa lalu ◦ Dukungan repatriasi oleh IOM berhenti tahun 2004 dan UNHCR keluar dari Timor Barat tahun 2005	◦ Pilihan perempuan tidak didukung oleh suami dan keluarga ◦ Tidak tersedianya air bersih yang cukup dan jasa transportasi yang memadai ◦ Jauh dari sekolah dan puskesmas ◦ Harga tanah yang mahal, pengungsi harus membeli tanah sendiri dan pemerintah akan membantu pembangunan rumah dan layanan lainnya	◦ Bantuan dihentikan ◦ Tanah milik negara dan masyarakat lokal dan setiap waktu bisa diusir
Kebutuhan perempuan agar dapat memilih dan kuat dengan pilihannya	◦ Rasa aman ◦ Informasi yang akurat	◦ Informasi yang akurat ◦ Penerimaan oleh masyarakat lokal ◦ Air bersih yang mudah dijangkau ◦ Rumah yang nyaman ◦ Didukung oleh suami dan keluarga ◦ Tersedianya lahan usaha ◦ Jaminan kebutuhan pokok pada 3 bulan pertama ◦ Akses sekolah dan prasarana jalan serta alat transportasi yang memadai ◦ Penerangan ◦ Bantuan pemberdayaan	



Berjualan di pasar.



Menenun untuk nafkah.

Dalam situasi terbatasnya kebutuhan hidup di kamp, perempuan adalah yang pertama-tama mencari alternatif pekerjaan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Laki-laki, di sisi lain, tidak dapat langsung bekerja karena sebagian banyak dari mereka adalah petani dan buruh yang harus menunggu musim tanam dan peluang proyek. *"Saya bosan dengan berkelahi untuk meminta Bapak cari pekerjaan. Anak-anak saya sudah bisa ditinggal sendiri. Oleh karena itu saya berpikir lebih aman saya yang pergi mencari pekerjaan untuk makan minum kami setiap hari,"* ujar J, di Kamp Nain.

2. 3. 1. Peran Perempuan Pengungsi dalam Integrasi Sosial

Syarat mutlak untuk menindaklanjuti pilihan integrasi adalah memiki tanah sendiri. Perempuan pengungsi kemudian membangun strategi *tabungan kelompok* untuk membeli tanah. Banyak perempuan di pengungsian yang menjadi tulang punggung keluarga, terutama dengan mengandalkan pengalaman berdagang sejak di daerah asal. Tiga kamp besar yang terletak di Kabupaten Kupang, yaitu Kamp Noelbaki, Kamp Tuapukan dan Kamp Naibonat awalnya hanyalah lokasi terminal yang sepi, hutan dan jalanan luar kota yang lengang, serta daerah Yonif 743 yang juga tidak ramai. Sekarang, lokasi ini menjadi seperti pasar yang ramai dikunjungi pembeli yang kebetulan lewat dan masyarakat lokal. Hal yang sama juga terjadi di TTU dan Belu. Selain bekerja menjadi pedagang, ada juga yang menjadi tukang cuci, tukang kebun atau penata halaman pada penduduk lokal, karyawan toko, dan pembantu rumah tangga. Ada pula yang memiliki usaha produktif sehingga mereka menjadi andalan keluarga dalam memperlancar kegiatan menabung untuk pembelian tanah. Misalnya, dengan menitipkan kue-kue di lepek jualan perempuan pengungsi atau dengan menenun. Di TTU, hasil tenunan ditukar dengan ternak babi, sapi, ayam dan kambing sebagai modal untuk membeli tanah. Gerakan membeli tanah sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2001 oleh pengungsi yang tinggal di Belu.

4. REKOMENDASI

1. Pemerintah di setiap level, khususnya instansi yang terkait langsung dengan penanganan pengungsi, serta LSM internasional, nasional dan lokal harus memberi perhatian khusus dan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berpihak pada kepentingan khusus perempuan dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan kenyamanan perempuan di pengungsian (misalnya, desain barak atau kamp yang sensitif gender)
2. Pemerintah Daerah perlu menjadi pusat koordinasi bantuan supaya tidak terjadi penumpukan dan penyianyiaan bantuan. Dana bantuan yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan layanan dasar yang masih terasa kurang. Mekanisme perencanaan dan koordinasi bersama harus dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, secara simultan, berbasis lokal kabupaten, memastikan adanya keterlibatan *multistakholder* dan adanya ketegasan peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu melakukan pemutakhiran data pengungsi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin pada setiap tahunnya untuk memastikan jumlah akhir pengungsi di tiap wilayah.
4. Perlu ada kerjasama yang bersinergis dari semua pihak untuk memastikan para pelaku kekerasan terhadap perempuan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses hukum ini diharapkan akan dapat menghentikan bertambahnya jumlah korban.
5. Pihak-pihak yang mendampingi pengungsi perlu memastikan proses konseling sebagai bagian dari intervensi awal dalam masa tanggap darurat sejalan dengan bantuan yang bersifat karitatif.
6. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data aset setiap tahunnya untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan darurat ketika terjadi pengungsian dan penanganan lanjutan bagi pengungsi.
7. Perlu ada penyeragaman pemahaman dan integrasi kajian sosial dalam rencana penanganan pengungsi. Gerakan pemukiman spontan harus menjadi 'titik masuk' dalam rencana penanganan setelah masa tanggap darurat.

Skenario TERBAIK

- Dukungan PBB, lembaga donor dan pemerintah untuk persiapan hunian bagi pengungsi di Timor Barat dengan melakukan pembangunan rumah dan fasilitas pemukiman besar-besaran.
- Pemda bersama masyarakat proaktif mendukung negosiasi lahan sehingga tersedia lahan pemukiman yang cukup dan penerimaan positif masyarakat lokal.
- Pengungsi bersedia pindah ke lokasi pengungsian secara sadar dan partisipatif karena fasilitas dan jaminan integrasi sosial ekonomi tersedia.
- Koordinasi antar *stakeholder* terbangun secara positif dan sinergis, serta terbangunnya visi integrasi lokal yang kuat diantara mereka.
- Kabupaten Belu dan Kupang akan jadi pusat pembangunan pemukiman lokal, didukung oleh kerjasama positif Pemda, TNI, tokoh informal dan masyarakat.

Pengungsian THR-Waihaong, Waringin, Gunung Nona, Kec. Nusaniwe, Ahuru, Belakang Goa dan Gonsalo/Kebun Bunga, Belakang Kota, Kec. Sirimau, dan Waiheru-Belakang BIP, Kec Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon.

PEREMPUAN MENDERITA YANG MENGHIDUPKAN: POTRET PARAMPUANG BACARITA TENTANG PERSOALANNYA

* Baihajar Tualeka, Sr. Brigitta Renyaan PBHK & Rosa Pentury

1. PENDAHULUAN

1. 1. Konteks/Latar Belakang Pengungsian

Sejak konflik sosial terjadi di Maluku, khususnya di Ambon pada 19 Januari 1999, ribuan orang menjadi pengungsi selain kehilangan harta benda, lapangan pekerjaan dan nyawa. Dalam situasi kalut masyarakat berupaya pindah ke tempat yang lebih aman, dan terutama menyelamatkan lansia, anak-anak dan perempuan hamil, orang cacat, serta kelompok perempuan lainnya. Kebanyakan mereka mengungsi dengan transportasi darat dan laut dengan bantuan TNI/POLRI. Ada juga yang mengungsi dengan berjalan kaki menuju Pos Polisi/TNI, asrama-asrama Polisi/TNI dan tempat lainnya terdekat dan yang dianggap aman ketika situasi sudah berbahaya. Mereka menempati bangunan pemerintah, barak TNI/Polisi, sekolah, rumah warga, pertokoan, dan juga rumah ibadah. Ada pula yang eksodus ke Sulawesi, Jawa, Sumatra dan sebagian lagi ke Papua.



Potret ibu-ibu di pengungsian Waiheru.

Jenis tempat pengungsian sangat beragam. Misalnya Gunung Nona yang menjadi tempat pengungsi dari Talake (Tanah Lapang Kecil) Kecamatan Nusaniwe. Sekitar 87 KK mengungsi ke sana akibat konflik April 2004. Sejak itu mereka tinggal di barak yang dibangun oleh pemerintah. Sebagian tidur di bale-bale, tapi lebih banyak yang tidur di lantai. Saat ini, masih tersisa 9 KK yang belum kembali ke tempat asal karena pemerintah belum membangun rumah bagi mereka di lokasi asal.

Tempat pengungsian lainnya adalah THR/Taman Hiburan Rakyat (bangunan pemerintah). Akibat kontak senjata tahun 1999 dan 2004, pengungsi asal Waringin mengungsi 2 kali ke THR, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004. Sejak Agustus 2005, 278 KK pengungsi Waringin sudah kembali ke lokasi asal. Namun, masih ada 17 KK pengungsi yang tetap menempati THR, mereka berasal dari Nusaniwe, Ganemo, Air Salobar, dan Benteng yang sampai sekarang belum mendapatkan hak-haknya sebagai pengungsi meskipun sudah menempati THR sejak tahun 1999. Mereka menginginkan relokasi karena merasa tidak nyaman untuk kembali ke lokasi asal. Sejak tahun 2003, mereka sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan BBR (Bantuan Bangunan Rumah) melalui kordinator kamp yang bekerjasama dengan oknum instansi terkait tetapi pengungsi justru diminta untuk membuat data kolektif dan memberi uang jaminan Rp. 300.000/KK dan mereka yang tertinggal adalah yang tidak bisa membayar sehingga harus mengurus secara individu.

Pemerintah menetapkan bulan Maret-April 2006 sebagai tenggat waktu bagi penyelesaian persoalan pengungsi Ambon. Pada tahun 2007, Dinas Sosial menyatakan status pengungsian di THR selesai sehingga pengungsi harus meninggalkan THR karena gedung tersebut akan digunakan untuk perkantoran. Kelompok perempuan paling merasakan akibat dari keputusan ini. Mereka mengalami depresi dan stres karena tidak tahu akan tinggal di mana. Oleh karenanya, mereka mendatangi Dinas Sosial untuk menanyakan hak-hak mereka. Dinas Sosial tidak memberi penjelasan apapun. Upaya lainnya adalah mendatangi KOMNAS HAM daerah Maluku dan Koalisi Pengungsi Maluku untuk meminta dukungan dalam upaya pengurusan bahan bangunan rumah. Selain itu, kelompok perempuan pengungsi juga melakukan *hearing* dengan POKJA pengungsi DPRD Provinsi Maluku, dan berjejaring dengan media lokal ataupun nasional.

Hal yang sama dialami oleh 23 KK pengungsi Waiheru-BIP Kec. Teluk Ambon Baguala. Sebelum pindah ke Waiheru BIP pada Juli 2005, mereka mengungsi dari Waitatiri ke Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah pada tahun 1999. Mereka pindah karena merasa diusir dari tanah masyarakat lokal Tuhelu, misalnya lewat stigma terhadap pengungsi dan larangan bermain bersama anak pengungsi. Di sana, fasilitas juga sangat minim- MCK di sungai dan tidak ada sarana air bersih dan jalan raya. Perempuan pengungsi juga merasa tidak nyaman karena selalu diancam dan diintip oleh laki-laki dari masyarakat lokal. Sering pula terjadi konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal dalam hal pengambilan kayu bakar dan bahan bangunan rumah seperti pasir dan batu kali. Konflik tersebut selalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib namun tidak pernah dimediasi untuk diselesaikan.

Pengungsi Weiharu merasa ditipu berkali-kali oleh oknum pemerintah dalam pengurusan bahan bangunan rumah. Karena itu, saat ini mereka mengupayakan relokasi mandiri untuk membangun rumah dengan bahan-bahan dari pohon sagu (atap rumbia dan gaba-gaba atau batang daun sagu untuk dinding). Sejumlah pengungsi laki-laki menjadi buruh pelabuhan, buruh kasar, petani, nelayan, tukang becak, ojek, dan sopir. Sedangkan sebagian besar perempuan pengungsi menjadi *papalele* (pedagang asongan) di atas kapal, pedagang kelontongan dan petani sayur-mayur.






Ibu-ibu Pengungsi THR; Rumah-rumah relokasi yang jauh dari akses transportasi; Demo pengungsi di DPRD Provinsi Maluku; Tak ada MCK di pengungsian Waiheru.

Kelompok pengungsi lainnya berasal dari Pulau Buru dan mengungsi di Halong. Saat ini, sebanyak 300 KK dari mereka sudah di tempat relokasi baru yaitu di lembah Agro. Relokasi ini difasilitasi oleh Yayasan Rinamakana (Yayasan milik Katholik) dan Pemerintah. Ada pula pengungsi Desa Ahuru dan Desa Air Besar yang mengungsi di Gonzallo dan Barak Kebun Bunga. Saat ini, 150 KK telah kembali ke Kampung Andreas Belakang Goa, dan sebagian lagi menunggu pembangunan perumahan di samping Gereja Yakobus, Desa Ahuru. Di tempat relokasi, mereka masih harus berhadapan dengan persoalan transportasi, sarana publik yang kurang tersedia seperti air bersih, jalan, dan listrik.

1. 2. Tantangan Melakukan Pemantauan

Format ini diujicobakan hanya dengan kelompok dampingan yang berproses bersama lembaga dokumentator. Ujicoba dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi terfokus (FGD) dengan kelompok perempuan. Sementara ada banyak hal yang hendak dipantau tetapi informasi yang didapatkan dari responden hanya terbatas, hal ini terutama karena perempuan pengungsi yang menjadi responden tidak memiliki waktu yang banyak untuk berdiskusi. Selain mengurus keluarga, mereka juga masih harus mencari nafkah, misalnya dengan bertani, dan juga karena mengikuti kegiatan organisasi.

2. HASIL PEMANTAUAN

2. 1. Kondisi Umum

2. 1. 1. Akses pada Bantuan Pokok dan Fasilitas Dasar

Kecuali di Kamp Waiheru BIP, pengungsi merasa bahwa kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi dengan adanya bantuan dari pemerintah, LSM Lokal, LSM Internasional, lembaga agama, dan juga dari individu. Untuk Kamp Waiheru, pengungsi hanya sekali di tahun 1999 memperoleh bantuan dari individu, ACF dan Dinas Sosial. Kesulitan utama yang dirasakan oleh kelompok perempuan di Waiheru BIP adalah tidak adanya bantuan khusus bagi perempuan untuk menstruasi dan melahirkan.

Di semua kamp, perempuan pengungsi mengeluhkan tidak adanya kamar pribadi untuk suami istri. Meski sering dianggap sepele, ketiadaan ruang privat ini memberikan tekanan psikologis yang besar bagi perempuan. Sejumlah suami menjadi marah, memukul dan memaksa untuk dilayani ketika mereka tidak bisa menahan kebutuhan seksualnya bahkan ada yang sampai melakukan perselingkuhan. Karenanya, meski merasa tidak nyaman, malu, dan tidak bebas karena dilihat semua orang, perempuan terpaksa melayani suaminya. Kekhawatiran lain yang dihadapi perempuan adalah bila anak-anak melihat hubungan seksual yang mereka lakukan dan menirunya.

Pembagian bantuan adalah persoalan lain yang dihadapi pengungsi. Tidak seperti di Weiharu BIP dimana pembagian bantuan dilakukan secara merata untuk semua pengungsi, di Kamp THR, Waringin, Waiheru dan Gonsalo, bantuan diberikan melalui koordinator. Mekanisme ini dirasakan perempuan pengungsi kurang memperhatikan janda, duda, dan perempuan orang tua tunggal. Alasan pengabaian kelompok ini adalah karena mereka tidak terdata. Khusus di THR-Waringin, pemberian bantuan sering menimbulkan kecemburuan sosial antar pengungsi karena ada pengungsi yang telah dapat bantuan beberapa kali sementara ada yang tidak pernah mendapat bantuan sama sekali.

Pembagian bantuan juga menjadi sumber konflik antara pengungsi dengan masyarakat lokal di sekitar THR dan Waringin. Konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal mulai sering terjadi sejak tahun 2001, berawal dengan insiden pelemparan dan percobaan membakar barak-barak pengungsi oleh orang mabuk yang bermula dari pesta kampung. Bentuk pertikaian lainnya adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap pengungsi.

2. 1. 2. Akses pada Layanan Dasar

Layanan kesehatan yang tersedia di kamp pengungsi terbatas jenis dan waktunya. Layanan kesehatan bagi pengungsi yang disediakan oleh pemerintah hanya berlangsung kurang lebih 2 bulan pertama pengungsian dan hanya berbentuk pemeriksaan rutin. Selanjutnya, pengungsi Waiheru-BIP memperoleh bantuan layanan dasar dari laskar jihad (khusus pengungsi muslim), disamping bantuan air bersih oleh MSF (*Medecins San Frontieres*/Dokter Lintas Batas), sebuah organisasi internasional sejak 2002 sampai 2005. Di THR dan Waringin, MSF pada kurun 2002-4004 juga membuka klinik dan *mobile clinic* untuk melayani pengungsi terutama perempuan dan penderita TBC yang dikuatirkan akan mewabah. Hanya saja, perhatian layanan lebih pada penyembuhan daripada upaya pencegahan penyakit.

Penanganan trauma pasca konflik bersenjata juga terbatas karena hanya mengandalkan pendamping kamp yang terlatih dan siap untuk melakukannya. Sebagai contoh, MSF pasca konflik April 2004 memberikan layanan konseling bagi pengungsi di Waringin tetapi layanan serupa tidak pernah



Potret ibu-ibu relokasi.



Penyuluhan KB buat ibu-ibu Waringin.

tersedia bagi pengungsi Gonsalo, Gunung Nona, dan Waiheru. Mereka bahkan tidak pernah diberi tahu bahwa layanan konseling dapat mereka peroleh di *trauma centre* yang disediakan pemerintah sejak tahun 2002.

Layanan pengembangan ekonomi diperoleh pengungsi Waringin dari MSF pada tahun 2003 dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pendampingan psikososial. Organisasi lokal, LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak), juga melakukan pendampingan serupa sejak tahun 2003 melalui diskusi penguatan kelompok perempuan *(talking group)* untuk bertahan hidup *(survive)* dan bantuan modal usaha produktif, terutama bagi perempuan pengungsi di THR, Waringin, Belakang Kota, dan Waiheru-BIP. Hal serupa dilakukan oleh Yayasan Rinamakana dalam bentuk bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan pengungsi di Gonsalo.

Sebagai bagian dari proses penguatan perempuan pengungsi, ada program pendidikan ketrampilan dan penguatan kelompok perempuan. Program ini menjadi penting karena perempuan pengungsi dituntut untuk mencari cara mempertahankan hidup akibat rusaknya lahan pekerjaan mereka, misalnya pertanian atau peternakan. Lewat program penguatan ini perempuan pengungsi memperoleh ketrampilan kewirausahaan seperti membuka warung dan berjualan kue.

2. 1. 3. Akses pada Fasilitas Bersama

Pengelolaan MCK menjadi salah satu perhatian kelompok perempuan pengungsi di Waiheru BIP dan THR-Waringin. Mereka merasa tidak nyaman menggunakan fasilitas bersama seperti MCK yang dibangun oleh MSF karena pada saat mandi, termasuk perempuan hamil dan menyusui, mereka sering diintip laki-laki. Begitu juga pada saat menstruasi, mereka kesulitan untuk mengganti pembalut. Selain itu, dalam hal perawatan dan kebersihan fasilitas bersama, perempuanlah yang selalu melakukannya, sedangkan laki-laki tidak pernah merawatnya, sebaliknya selalu mengotori dan merusak.

Persoalan terkait relokasi

- Kesulitan yang dialami oleh pengungsi untuk mengurusi KTP, karena tidak diakui sebagai warga setempat oleh RT atau Kepala Desa *(Waiheru BIP)*.
- Konflik komunitas yang direlokasi ke tempat tersebut *(Waiheru BIP)*.
- Sengketa tanah antara pengungsi yang sudah membayar dan pihak lain yang menyatakan diri sebagai pemilik sah *(Ahuru-THR II)*.

2. 1. 4. Akses pada Pembuatan Keputusan

Akses perempuan pada pembuatan keputusan dirasa kurang. Di Waringin misalnya, bahkan ada ketua RT yang mendominasi semua informasi dan tidak memberikan kesempatan bagi kelompok perempuan untuk terlibat dalam rapat kecuali untuk menyediakan konsumsi. Ada pula kesan umum bahwa perempuan tersebut cari muka, sok mengatur dan cerewet jika ia gigih memperjuangkan aspirasinya. Namun, sedikit demi sedikit kesan tersebut luntur dan hal ini tak lepas dari inisiatif kelompok perempuan untuk selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan pertemuan kampung. Di THR dan Waiheru BIP, pertemuan pengungsi sudah mulai melibatkan perempuan dan mengadopsi ide-ide perempuan ke dalam kegiatan kampung.

Menyikapi keterbatasan akses dalam pengambilan keputusan, perempuan pengungsi di Waringin mengambil sikap aktif dan kreatif dalam melobi bantuan dengan pihak-pihak yang terkait serta membangun jaringan dalam upaya mendapatkan informasi. Perempuan di Waiheru BIP beberapa kali mendatangi Dinas Sosial untuk mengurusi Bahan Bantuan Rumah (BBR). Untuk bantuan ini, kelompok perempuan melakukan pendataan rumah, memfasilitasi pertemuan antara pemerintah dengan warga, melakukan diskusi dengan pemerintah dan melakukan pengawasan dalam realisasi bantuan termasuk saat membangun rumah dan menyiapkan masyarakat untuk kembali ke tempat asal. Dalam proses pengurusan bantuan ini, terbukti kelompok perempuan cekatan dan memiliki pola pendekatan penyelesaian persoalan yang obyektif, cepat dan efektif.

2. 1. 5. Akes pada Kegiatan Bersama

Perempuan pengungsi juga terlibat aktif dalam memajukan kampnya, misalnya dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga dan membangun perdamaian lewat interaksi sosial sesama pengungsi. Di THR, perempuan aktif menggerakkan kelompok olahraga dan kelompok pengajian. Sementara kelompok olahraga beberapa kali mengikuti lomba, kelompok pengajian juga mengisi acara pada berbagai kesempatan. Di Waringin, perempuan pengungsi memperkuat unit-unit perempuan di gereja, membentuk kelompok majelis taklim dan menjalankan posyandu komunitas. Mereka selalu melakukan diskusi kesehatan reproduksi dan Keluarga Bencana, dan mendorong warga pengungsi lainnya untuk melakukan kerja bakti mingguan, misalnya dengan gerakan peduli lingkungan dan penghijauan kampung.

Potensi perempuan pengungsi sebagai agen transformasi sosial dalam komunitas juga menguat karena didorong oleh semangat memperjuangkan perubahan kondisi tertekan, diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Di Waringin, THR dan Waiheru, perempuan membentuk kelompok diskusi dan *support group* untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibu-ibu pengungsi di THR, Waringin, dan Belakang Kota juga aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan mengadvokasikan hak-hak perempuan pengungsi yang tidak terpenuhi. Mereka juga memiliki banyak ide dalam melakukan aktivitas di kamp seperti lomba karaoke menjelang 17 Agustus dan merayakan Hari Perempuan International.

2. 1. 6. Rasa Aman Perempuan di Pengungsian

Rasa aman perempuan di pengungsian selalu dianggap hal yang kurang begitu penting. Padahal, perempuan pengungsi tidak saja merasa tidak aman akibat kondisi pengungsiannya, misalnya karena diintip, tingginya tingkat perselingkuhan dan kekerasan oleh suami. Di THR, rasa aman perempuan juga terusik dengan hadirnya orang mabuk dan pencuri, serta ancaman bom. Ancaman rasa aman juga hadir akibat THR dinyatakan sebagai markas teroris setelah pasukan Detasemen 88 menangkap

seorang perempuan pengungsi dalam operasi senjata tajam tahun 2005 di pengungsian tersebut. Perempuan itu dituding ikut menyembunyikan salah satu buronan Polisi. Di Waiheru BIP, perempuan pengungsi juga merasa tidak aman karena adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah yang mereka tempati. Perempuan pengungsi di Waringin merasa takut, terutama menjelang bulan April (HUT RMS) apalagi bila ada isu akan pecahnya kembali konflik. Belajar dari pengalaman konflik, perempuan pengungsi selalu berupaya berpikir positif dan membangun hubungan antara sesama pengungsi guna menciptakan ketahanan diri warga untuk lebih *survive.*

2. 2. Kasus Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan Pengungsi

2. 2. 1. Kasus Kekerasan

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil didokumentasikan adalah terutama yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perkosaan (lihat tabel 1). Sumber informasi tentang kasus kekerasan adalah dari korban sendiri.

Tabel 1
Daftar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Pengungsi

No	Korban (status, pekerjaan, usia)	Bentuk Kekerasan	Pelaku (hub. dengan korban, pekerjaan)	Lokasi Pengungsian
1.	Istri, pedagang, 35 thn	Fisik, seksual	Suami, buruh	THR
2.	Istri, pedagang, 50 thn	Selingkuh/psikis, fisik	Suami, buruh	THR
3.	Istri, pedagang, 24 thn	Selingkuh, fisik	Suami, buruh	THR
4.	Anak perempuan, 15 thn	Perkosaan/seksual, selain fisik, psikis	Ayah, buruh	THR
5.	Anak perempuan, 14 thn	Perkosaan	Laki-laki dewasa, tak dikenal	THR
6.	Anak perempuan, 16 thn	Dipaksa aborsi	Laki-laki dewasa, tak dikenal	THR
7.	Anak perempuan, 13 thn	Perkosaan/seksual, selain fisik, psikis	Laki-laki dewasa, tak dikenal	THR
8.	Istri, pedagang, 35 thn	Fisik, psikis	Suami, PNS	Waringin
9.	Istri, pedagang, 28 thn	Fisik, psikis	Suami, Buruh	Waringin
10.	Istri, 25 thn	Fisik dan ekonomi	Suami, tukang becak	Gonsalo- Belakang Goa
11.	Istri, 25 thn	Fisik, seksual	Suami, buruh kasar	Gonsalo- Belakang Goa
12.	Perempuan janda, 31 thn	Fisik, psikis	Tetangga, ibu rumah tangga	Gonsalo- Belakang Goa
13.	Istri, 33 thn	Selingkuh/psikis, fisik, ekonomi	Suami	Gonsalo- Belakang Goa
14.	Perempuan janda, 40 thn	Fisik, selingkuh/psikis	Mantan suami	Kebun bunga
15.	Istri, 30 thn	Fisik, psikis	Suami	Kebun bunga

Catatan : kasus ini diambil ketika wawancara *try-out* instrumen Desember 2006–Maret 2007

Diskusi dengan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memetakan sejumlah pemicu kekerasan, antara lain:

1. Kondisi suami yang depresi dan stres sebagai akumulasi akibat dari konflik. Karena tidak mampu mengelola masalahnya, sejumlah suami melampiaskannya lewat minuman keras dan ketika mabuk, ia melakukan kekerasan terhadap istri.

2. Suami kalah judi atau mempunyai masalah dengan orang lain dan kemudian melampiaskan kemarahannya pada istri.
3. Tidak tersedianya ruang privat bagi suami-istri menyebabkan istri tidak nyaman untuk berhubungan seksual. Kondisi ini dijadikan alasan bagi suami untuk berselingkuh.
4. Warga pengungsi menganggap pemukulan terhadap istri, atau perempuan pada umumnya, sebagai hal yang biasa saja. Demikian juga penghinaan terhadap perempuan lewat teriakan dan makian. Insiden pemukulan dan penghinaan seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari perempuan pengungsi.
5. Persepsi bahwa seluruh pekerjaan dalam rumah tangga adalah tugas dan tanggungjawab perempuan. Laki-laki pengungsi tidak mau untuk turut berbagi peran, seperti mengangkat air, mengambil kayu bakar dan mengurus anak. Ketika perempuan dianggap tidak becus menjalankan tugasnya itu, sementara perempuan tak berdaya melakukan negosiasi pembagian tugas, maka suami menjadikan kondisi ini sebagai alasan melakukan kekerasan.

Selain menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan juga harus bertahan dengan kekerasan yang terjadi di tempat kerja seperti ejekan dan juga pelecehan seksual. Pasca konflik bersenjata di Maluku, banyak perempuan pengungsi yang menjadi *papalele* (pedagang asongan), penjual ikan, membuka usaha kelontong, untuk kelangsungan hidup keluarga karena suami kehilangan lapangan pekerjaan. Sebagian dari mereka berjualan di pelabuhan dan berebutan naik kapal yang bersandar di pelabuhan untuk menjajakan dagangannya. Dalam kondisi seperti inilah pelecehan seksual seringkali mereka alami, baik itu yang dilakukan oleh petugas-petugas di kapal maupun oleh buruh kapal dan penumpang.

2. 2. 2. Kasus Diskriminasi

Beberapa perempuan bertutur mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka alami terutama berkaitan dengan akses pada bantuan, antara lain:

1. Sebagian besar perempuan pengungsi merasa dipersulit untuk mendapatkan hak-haknya terhadap bantuan sembako, bantuan bahan rumah, dan bantuan peningkatan ekonomi perempuan. Beberapa perempuan janda di Waringin menuturkan bahwa bantuan yang mereka dapat selalu dipotong oleh pihak pemberi bantuan dalam hal ini Dinas Sosial, lurah dan koordinator pengungsi.
2. Perempuan janda di THR selalu mendapat tekanan dari pihak Dinas Sosial dalam proses pengurusan Bantuan Bahan Rumah. Misalnya, pada saat survei titik rumah, mereka diinterogasi dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Kepala Dinas Sosial bahkan menuduh mereka melakukan penipuan tempat tinggal dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Menanggapi tuduhan tersebut, para ibu ini mendatangi ketua RT lama (sebelum mereka mengungsi) yang kemudian memberikan konfirmasi bahwa mereka memang dulu penduduk setempat dan mendiami rumah-rumah tersebut. Konfirmasi ini tidak ditanggapi oleh Kepala Dinas Sosial.
3. Perempuan pencari nafkah utama, khususnya perempuan orang tua tunggal dan janda, di pengungsian Waringin seringkali tidak diberikan informasi tentang bantuan yang tersedia dan tidak didata sebagai calon penerima bantuan. Lebih lanjut, pendataan yang dilakukan oleh ketua RT selalu memprioritaskan keluarganya sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap ketua RT dan menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Perempuan pengungsi juga berhadapan dengan unsur penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan iming-iming memberikan bantuan, tetapi bantuan tersebut tidak pernah mereka terima.

2. 2. 3. Penanganan Kasus Kekerasan dan Diskriminasi

Dalam penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi, kelompok perempuan aktif melakukan penguatan perempuan korban dan perempuan pengungsi pada umumnya agar mereka bisa tahu tentang hak-haknya, mencari akses untuk perlindungan diri dan bisa keluar dari jerat kekerasan yang mereka alami selama ini. Penguatan dilakukan dengan mengembangkan dan mengasah potensi perempuan untuk menjadi subjek yang mandiri dan berperan aktif dalam perdamaian dan transformasi sosial. Potensi ini sudah tampak jelas lewat kenyataan di lapangan; perempuan yang selama ini dianggap hanya mampu berkarya di ranah domestik juga memiliki ketangguhan dan kreativitas untuk mengupayakan kelangsungan hidup keluarga dengan menggunakan cara-cara tanpa kekerasan untuk memperjuangkan perdamaian.

Sebagai bagian dari program penguatan ini, diskusi tentang kekerasan dan diskriminasi perempuan diselenggarakan oleh lembaga pendamping pengungsi. Dalam diskusi ini, perempuan korban berbagi pengalaman kekerasan yang dialami-bagaimana tangan-tangan suami dengan keras memukul dan menendang mereka disertai dengan hinaan dan cacian; bagaimana mereka merasa malu dengan para tetangga dan anak-anak bila kekerasan tersebut terjadi; bagaimana mereka hanya bisa pasrah dengan kekerasan dan ketidakadilan ini karena tidak ada keberanian dan keyakinan untuk melapor pada penegak hukum.

Berangkat dari diskusi ini, lembaga pendamping melakukan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Tujuan sosialisasi adalah memberikan informasi hukum yang dapat bermanfaat bagi korban untuk memperjuangkan keadilan. Hasil yang diperoleh sangat membesarkan hati, sebagaimana yang disampaikan oleh lima orang perempuan pengungsi berikut ini:

Sekilas Potensi Perempuan Pengungsi

- Inisiatif perempuan cepat dan efektif dalam proses pengurusan bahan bangunan rumah *(Kamp Waringin)*
- Perempuan menjadi kordinator kamp yang adil dan bijaksana dalam proses pembagian bantuan *(THR)*
- Perempuan berperan dalam melakukan mediasi kasus kekerasan dalam kamp *(Belakang Kota)*
- Perempuan berinisiatif dalam mengurus tanah untuk relokasi, berpartisipasi dalam membangun rumah, *hearing* dengan instansi pemerintah untuk menyerukan hak-hak perempuan *(Waiheru, THR)*
- Perempuan merawat perdamaian dengan penguatan kelompok perempuan lewat majelis taklim, unit-unit kebaktian perempuan, arisan, kerja bakti, olahraga dan apresiasi seni bersama *(THR, Waringin, Waiheru)*
- Sebagai besar perempuan pengungsi berperan sebagai pencari nafkah utama *(semua kamp)*
- Perempuan menjadi agen mandiri dalam pengupayakan akses keadilan bagi dirinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi agen transformasi sosial *(baca bagian 2.2.3)*

Ibu AA, 33 tahun, adalah seorang pengungsi yang bertempat tinggal di Gunung Malintang dan mencari nafkah dengan berdagang. Ketika ia dianiaya oleh suaminya, ibu AA melaporkan kasusnya ke polisi. Laporan tersebut tidak dilayani dengan alasan bahwa kasusnya bukan kekerasan. Ibu AA membaca kembali

UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang ia peroleh dalam sebuah kegiatan sosialiasi di pengungsian. Setelah itu, dia kembali ke Polisi dan mengatakan "dalam UU No. 23 Tahun 2004, polisi akan dianggap sebagai pelanggaran HAM apabila korban datang melaporkan pelaku kekerasan tetapi dalam waktu 1x24 jam polisi tidak memberikan perlindungan untuk korban." Lebih lanjut, korban menjelaskan haknya sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, polisi langsung bertindak dengan menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum.

Ibu BB, 28 tahun, pekerjaan pedagang, bercerita tentang suaminya yang selalu menggunakan tindak kekerasan terhadap dirinya. Hampir setiap hari ia dipukul oleh suaminya yang tukang becak karena mabuk. Ibu BB mengambil inisiatif untuk memfotokopi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kemudian menempelkannya di dinding rumah. Bagian yang ia fotocopy adalah tentang pidana atas tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan terhadap korban. Ibu BB kemudian memanggil suaminya dan menjelaskan kepada suaminya tentang isi UU tersebut. Tidak percaya dengan penjelasan istrinya itu (karena suami ibu BB buta huruf), suami Ibu BB memanggil anaknya untuk membacakan isi dari UU. Setelah mendapat konfirmasi tentang isi UU tersebut, suami ibu BB secara bertahap tidak lagi melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.

Ibu CC, 45 tahun, pedagang, bercerita bahwa suaminya berselingkuh dan melakukan tindak kekerasan fisik dan psikologis terhadap dirinya. Setelah membaca isu UU PKDRT, ia mengadukan suaminya ke polisi. Ibu CC tidak menginginkan suaminya di penjara. Ia hanya ingin suaminya berubah. Untuk itu, penyelesaian yang ditempuh adalah dengan jalan kekeluargaan dimana suami harus menaati sanksi sosial yang diberikan, yaitu untuk ikut melakukan kegiatan domestik. Untuk memastikan bahwa sanksi ini ditaati, seorang pendamping dijadikan pengawas. Selama proses menjalankan sanksi tersebut, sikap suami mulai berubah; ia tidak lagi melakukan tindak kekerasan bahkan membantu istrinya dalam pekerjaan domestik secara sukarela.

Ibu DD, 50 tahun, sudah mengalami kekerasan dari suaminya cukup lama. Ibu DD berkata ".. kadang-kadang beta seng [tidak] tahu harus bagaimana. Beta rasa sebagai parampuang seng ada harga diri lagi. Untunglah beta tahu tentang adanya UU. No. 23 Tahun 2004… beta lebih berani melawan suami… merasa ada kekuatan baru di beta pung [punya[diri. Bahkan sekarang, suami sudah tidak menekan, memukul beta lagi."

Ibu EE,39 tahun, adalah korban kekerasan fisik dari suaminya yang juga berselingkuh. Ia mengaku bahwa selama ini tidak memiliki keberanian untuk melaporkan suaminya ke polisi. Setelah beberapa kali mendapat penguatan, Ibu EE merasa lebih berdaya dan mengenal diri sendiri. Berbekal kekuatan ini, ia memilih untuk meninggalkan suaminya dan memulai kehidupan baru.

3. POLA PENANGANAN PENGUNGSI

3. 1. Keterlibatan Perempuan dan Hambatan

Penanganan pengungsi yang tersebar di kota Ambon diupayakan oleh pemerintah, LSM maupun masyarakat umum. Upaya penanganan seringkali berhadapan dengan hambatan yang tidak lepas dari dinamika konflik di Maluku dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2005.

Dalam dinamika konflik inilah perempuan pengungsi dan kelompok perempuan lainnya bahu-membahu memperjuangkan hak perempuan dan menjalin perdamaian. Perjuangan ini antara lain diperlihatkan dalam gerakan solidaritas perempuan untuk pendampingan korban, advokasi kasus kekerasan dan upaya perdamaian sejak awal pecah konflik di tahun 1999. Sementara pemerintah



Diskusi kelompok perempuan tentang UU PKPRT



Sharing pendapat antara perempuan pengungsi.

mengupayakan perdamaian lewat perjanjian Malino, kegiatan perempuan seperti GPP (Gerakan Perempuan Peduli) dan JTMM (Jaringan Tabaos Mahina Maluku), menjadi bagian dari motor gerakan masyarakat sipil untuk perdamaian, berdampingan dengan LSM dan jaringan solidaritas lainnya, termasuk Maluku Baku Bae dalam menggelar aksi damai.

Selain berhadapan dengan hambatan yang terkait dengan dinamika konflik, gerakan perjuangan hak perempuan, khususnya di pengungsian, berhadapan dengan hambatan budaya. Walaupun perempuan telah membuktikan kepemimpinannya dalam menghadapi berbagai kesulitan, ada banyak situasi dimana kebebasan perempuan untuk beraktivitas di ranah publik justru dibatasi. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, dengan mengabaikan keterwakilan perempuan dan selalu mempertanyakan kapasitas perempuan.

Peminggiran perempuan cenderung tampak dalam pola penanganan pengungsi. Dengan alasan situasi darurat, aspirasi perempuan dipinggirkan. Akibatnya, seluruh fasilitas yang dibangun dan pengelolaannya tidak memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan perempuan, bahkan memberikan beban tambahan. Misalnya, MCK yang jauh dari tempat tinggal dan mudah diintip, pintu barak yang susah dikunci dan penerangan yang tidak tersedia yang menyebabkan perempuan merasa tidak aman. Ataupun, lokasi pengungsian yang jauh dari sumber air bersih dan pasar sehingga perempuan harus berjalan jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam perkembangannya, aspirasi perempuan juga tidak didengarkan untuk memformulasikan kebutuhan bantuan bagi pengungsi dan proses pengelolaan bantuan. Perempuan dengan status janda atau orang tua tunggal serta lansia seringkali justru menjadi pihak yang terlupakan dalam distribusi bantuan. Seluruh situasi ini menyebabkan perempuan pengungsi menjadi tak berdaya.

Menghadapi situasi tersebut, aktivis perempuan berjuang untuk memberikan penguatan bagi perempuan pengungsi lewat program-program pendampingan dan bantuan modal usaha. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok perempuan juga mengadakan *hearing* ke DPRD dan pemerintah disamping advokasi kasus dan pendampingan korban. Upaya ini dilakukan baik secara individu maupun lembaga. Walaupun berskala kecil karena keterbatasan SDM, upaya ini penting bagi perjuangan kepentingan perempuan. Sayangnya, upaya ini seringkali tidak terdokumentasi dan diapresiasi, bahkan seringkali dilecehkan, sebagai hal yang kurang penting dan akhirnya, dilupakan.

3. 2. Perempuan Pengungsi Bangkit

Sebagaimana yang disampaikan di atas, akibat peminggiran perempuan dalam proses penanganan pengungsi, perempuan menanggung beban tambahan akibat kebutuhan mereka diabaikan. Lebih lanjut, akibat dibuat menjadi tidak berdaya, sejumlah perempuan pengungsi mengalami depresi, hilang kepercayaan diri, menjadi tergantung dengan orang lain dan bahkan apatis terhadap kehidupannya. Selain itu, perempuan pengungsi juga harus berhadapan dengan kekerasan yang terus meningkat baik intensitasnya maupun jenisnya, di dalam keluarga maupun di komunitas.

Meskipun masih dalam kapasitas yang terbatas, perjuangan terus-menerus kelompok perempuan dalam mendampingi dan memberikan penguatan terhadap perempuan pengungsi mulai memperlihatkan hasil. Semakin banyak perempuan pengungsi yang bangkit, menjadi sosok yang mandiri, kreatif dan tangguh dalam mempertahankan hidup, keluarga dan komunitasnya. Perempuan pengungsi tidak saja menjadi penyokong ekonomi keluarga, tapi dengan kemampuan mengelola konflik, mereka juga memainkan peran sosial dalam memperbaiki kondisi pemukiman, merawat perdamaian, dan menjadi agen transformasi sosial sebagaimana yang mereka tunjukkan dalam upaya penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pengungsi.

4. REKOMENDASI

Rekomendasi ini disampaikan bagi semua pihak yang berjuang untuk pemenuhan hak perempuan pengungsi, baik itu aktor di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan juga internasional. Dalam melakukan penanganan pengungsi, hendaknya:

- melakukan penguatan kapasitas perempuan untuk mengelola proses dan hasil dalam penanganan pengungsian,
- melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil penanganan pengungsi secara simultan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, terutama perempuan,
- membuka akses bantuan bagi perempuan, terutama untuk penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,
- mengadvokasi kebijakan penanganan yang lebih baik, misalnya lewat perumusan peraturan daerah,
- menyusun database pengungsian yang akurat dengan memastikan tidak terjadinya manipulasi data pengungsi,
- menyediakan fasilitas umum bagi pengungsi seperti jalan, air bersih, penerangan, MCK dan sarana kesehatan, pendidikan, termasuk kesehatan reproduksi, baik di tempat pengungsian maupun di tempat relokasi,
- menyediakan layanan terintegrasi bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
- memberikan fasilitas visum gratis bagi perempuan pengungsi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- menyediakan layanan KB gratis bagi perempuan pengungsi,
- memberikan bantuan ekonomi bagi perempuan pengungsi.

Laporan Poso, Sulawesi Tengah

Pengungsian di Later dan Malewa, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso

POSO DALAM POTRET KEHIDUPAN PEREMPUAN PENGUNGSI

* Heidy M & Alex Patambo

1. PENDAHULUAN

1. 1. Konteks/Latar Belakang Pengungsian

Desember 1998 merupakan awal pecahnya konflik Poso. Perseteruan pemuda yang kebetulan berbeda agama dipakai sebagai alat provokasi konflik sesama anggota masyarakat. Ratusan rumah terbakar maupun hancur akibat konflik. Karena tidak ada penanganan yang serius terhadap akar konflik, benturan-benturan di masyarakat Kota Poso selama satu tahun berikutnya terus dikaitkan dengan konflik Desember 1998. Memasuki awal tahun 2000, isu agama kembali digemboskan terkait dengan proses penggantian Sekretaris Kabupaten Poso. Birokrat, politisi dan media sangat berperan dalam menghidupkan isu agama lewat pernyataan tentang *sharing*/pembagian kekuasaan antar kelompok agama, dan ancaman pecahnya konflik bila kandidat tertentu tidak berhasil menjabat posisi tersebut.[1]

1. Dalam perdebatan tentang pergantian SEKAB (Sekretaris Kabupaten) Poso, sebagian birokrat dan politisi menginginkan SEKAB Poso beragama Kristen. Alasannya adalah pembagian kekuasaan *(power sharing)* karena Bupati Poso saat itu, Muin Pusadan, beragama Islam. Sebagian lagi dari birokrat dan politisi menginginkan SEKAB Poso tetap beragama Islam. Perdebatan memanas, antar lain dengan pernyataan di media oleh anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Haelani Umar. Dalam pernyataan itu disampaikan bahwa jika Damsyik Ladjaelani (sekarang Bupati Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Poso) tidak menjadi SEKAB Poso maka akan terjadi konflik yang eskalasinya lebih besar dari konflik Desember 1998.



Ibu dan anak, Limbue, Poso.

Seolah ancaman terbukti, konflik bersenjata kembali meletus di Poso pada April 2000; kali ini dengan eskalasi yang lebih besar. Sekali lagi, perkelahian anak muda yang berlainan agama kembali memicu meletusnya konflik. Massa yang berlainan agama (Islam dan Kristen) saling menyerang. Massa menggunakan ikon agama sebagai tanda pengenal kelompok. Selain sarana ibadah, tempat tinggal masyarakat pun menjadi target serangan.

Akibat konflik itu, terjadi pengungsian besar-besaran masyarakat kota Poso. Ketika eskalasi konflik makin tinggi, pengungsian terjadi di daerah seputar kota Poso. Mereka mengungsi karena desa mereka diserang massa dan rumah mereka habis terbakar. Kalaupun tidak semua rumah terbakar, seluruh warga desa tetap harus mengungsi karena mereka diteror oleh kelompok tak dikenal. Warga mengungsi dengan berjalan kaki melewati hutan atau diangkut truk dengan kawalan aparat keamanan.

Hampir semua tempat di Sulawesi Tengah yang tidak menjadi daerah konflik dan bisa dijangkau dengan perjalanan mobil, perahu tradisional, maupun jalan kaki menjadi sasaran pengungsian. Bahkan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa serta beberapa daerah lain menjadi sasaran pengungsian masyarakat Poso asal daerah yang dituju. Tempat yang dipilih para pengungsi adalah daerah yang dianggap mewakili agama mereka. Pemilihan ini didasari oleh kebutuhan akan rasa aman, karena konflik yang berlangsung terus menciptakan trauma dan kecurigaan pada komunitas yang berbeda agama. Palu dan Pamona Utara merupakan tempat sebaran terbesar pengungsi. Palu, Parigi, beberapa daerah di Sulawesi Selatan didominasi oleh pengungsi yang beragama Islam sedangkan Pamona Utara, Sulawesi Utara dihuni oleh sebagian besar pengungsi yang beragama Kristen.

Pada awalnya, pengungsi ditampung di gedung sekolah atau fasilitas publik lainnya. Ada juga yang ditampung di rumah penduduk yang masih memiliki tempat kosong dan masih memiliki hubungan kerabat dengan pengungsi. Setelah penyediaan barak maupun *shelter* oleh Pemerintah dan NGO, pengungsi pun disebar ke tempat-tempat pengungsian berdasarkan desa asalnya.[2] Arus pengungsian besar-besaran mulai terjadi pada tahun 2000 sampai 2003.

1. 2. Kondisi Umum

Dari 12 lokasi pengungsian yang tersebar di Kecamatan Pamona Utara, lokasi pengungsian yang menjadi sasaran pemantauan adalah lokasi pengungsian Later dan lokasi pengungsian Malewa.[3] Di lokasi pengungsian Later masih tinggal 360 KK dan di Malewa 98 KK, karena hanya pada lokasi-lokasi inilah keberadaan pengungsi masih cukup terorganisir dan itu yang memudahkan pemantau untuk mendapatkan informasi. Di kedua lokasi, pengungsi diberikan bantuan bangunan rumah tinggal sederhana dalam bentuk barak dan rumah kecil yang sederhana. Masing-masing bangunan mempunyai 2 kamar yang dihuni oleh 2 sampai 3 keluarga.

Sebagian besar profesi para perempuan pengungsi adalah buruh harian dan ibu rumah tangga. Beberapa dari pengungsi, dan dalam jumlah yang sangat sedikit, adalah pegawai negeri, pedagang kecil, sopir angkutan, petani dan petugas kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebanyakan perempuan pengungsi juga menawarkan jasa untuk membantu pekerjaan rumah tangga

2. Hingga tahun 2007, jumlah pengungsi terbesar terdapat di wilayah Pamona Utara, sebanyak 5000-an jiwa. Di lokasi pengungsian Muslim di Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir, hampir semua pengungsi telah direlokasi ke wilayah-wilayah sekitar, meskipun masih ada kantong-kantong pengungsi dalam jumlah kecil yang tersebar di beberapa tempat di Palu dan Poso Kota.
3. Pemilihan lokasi ini sangat erat dengan akses dokumentator pada wilayah pantauan.

ke masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi pengungsian. Ada juga yang ke pasar untuk membeli sayuran dan dijual kembali dengan keuntungan yang sangat kecil.

Ketika konflik agak mereda, para pengungsi sedikit terbantu dengan adanya bantuan dana dari pemerintah dan beberapa NGO. Sayangnya, seringkali bantuan tersebut justru mengakibatkan konflik baru di kalangan para pengungsi. Hal ini terjadi karena bantuan tidak merata, bahkan ada keluarga yang sama sekali tidak pernah mendapat bantuan. Yang paling sering terjadi adalah pemotongan atau pungutan liar dengan alasan sebagai biaya administrasi. Akibatnya, muncul konflik antara pengungsi yang menjadi pengurus atau penyalur dana dengan penerima bantuan.

Penggunan fasilitas bersama pun sering menimbulkan persoalan di antara pengungsi. Fasilitas yang tersedia hanya sedikit sementara penggunanya banyak sehingga menyebabkan pengungsi sering berebutan. Misalnya, data penggunaan MCK umum dan air bersih. Ketegangan juga muncul ketika pengurus/koordinator pengungsi mengklaim bantuan yang berupa fasilitas bersama sebagai milik pribadi. Akibatnya, masyarakat pengungsinya tidak berani memakai fasilitas tersebut. Bahkan di lokasi pengungsian Later, air bersih pun harus dibayar karena koordinator mengklaim bahwa bantuan air bersih adalah miliknya. Karena tidak mempunyai uang, perempuan dan anak-anaknya pengungsi harus pergi menimba air di danau yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka.

Lokasi yang disediakan untuk para pengungsi sebagian besar berada di tengah masyarakat lokal. Dalam interaksi keseharian pengungsi dengan masyarakat lokal sering terjadi hal-hal yang memicu konflik di antara mereka, misalnya, keluhan masyarakat lokal bahwa anak-anak pengungsi yang bermain sangat berisik atau menimbulkan kebisingan.

1. 3. Tantangan dalam Melakukan Pemantauan

Pendokumentasian dan advokasi di tempat pengungsian adalah inisiatif mandiri aktivis perempuan, NGO lokal dan lembaga agama seperti GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah). Apalagi karena belum ada perhatian dari pemerintah setempat terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat pengungsi. Namun, sambutan dari masyarakat pengungsi tidak selalu positif.

Dalam sebuah kasus penganiayaan suami terhadap isteri, korban babak belur dan pingsan, mengalami depresi dan sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih sebulan. Korban menolak kasusnya didokumentasikan karena takut kepada suaminya (kuatir akan mengalami kekerasan lagi) dan karena korban merasa bahwa hal itu adalah aib keluarganya yang tidak perlu diketahui orang lain. Dengan alasan tersebut, korban menolak kehadiran dokumentator. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan begitu banyaknya kekerasan terhadap perempuan di lokasi pengungsian sulit didokumentasikan dan tidak terselesaikan.[4]

Kesulitan lain dalam melakukan pemantauan di lokasi pengungsian lebih berkaitan dengan format isian. Sebagian besar kondisi di lapangan bertolak belakang dengan kondisi ideal yang menjadi acuan penyusunan format. Selain itu sejumlah pertanyaan format sulit dipahami oleh orang-orang yang baru bekerja di lokasi pengungsian.

4. Komnas Perempuan juga menemukan bahwa komunitas korban juga menolak memberikan informasi pada kasus yang dianggap telah diselesaikan secara adat. Dalam pemahaman budaya Pamona, jika kasus kekerasan telah diselesaikan dengan mekanisme adat, semua pihak dalam komunitas tersebut dilarang membahas kasus tersebut lagi sekalipun korban merasa dirugikan atas penyelesaian itu. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan.

2. HASIL PEMANTAUAN

2. 1. Kondisi HAM Perempuan

2. 1. 1. Akses pada Bantuan Pokok

Ada kejanggalan dan penyelewenangan dalam distribusi bantuan pokok dalam masa tanggap darurat, padahal bantuan tersebut sangat penting dan mendesak bagi pengungsi, terlebih bagi perempuan pengungsi. Karena selalu dianggap sebagai bukan penanggung jawab utama di lingkungan sosial, akses perempuan pada bantuan selalu terabaikan. Hal ini terutama dialami perempuan yang cacat anggota tubuhnya dan lansia karena selalu dianggap akan diwakili oleh anggota keluarganya yang lain.

Akses bantuan lebih sulit lagi terutama bagi perempuan yang menurut pandangan lingkungannya adalah seseorang yang "cacat" secara sosial, misalnya perempuan yang ditinggalkan tanpa diceraikan oleh suaminya yang telah menikah dengan orang lain, dan perempuan yang hamil atau melahirkan anak tetapi tidak menikah. Selain itu, jenis bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun dari non pemerintah juga tidak sensitif dengan kebutuhan perempuan di pengungsian, misalnya, kebutuhan akan pembalut dan alat KB tidak tersedia pada masa tanggap darurat.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perempuan, misalnya di tempat pengungsian Palapa (juga berada di Kec. Pamona Utara) mencoba bangkit dengan bersama-sama mencari penghasilan dengan menyadap getah pohon pinus yang dijual dengan harga Rp. 2.000/kg. Satu kilogram getah pinus didapatkan dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu. Untuk pekerjaan ini, perempuan pengungsi meresikokan kesehatannya dengan tidak mengenakan masker (alat pelindung pernafasan) saat membersihkan getah pinus. Akibatnya, mereka rentan mengalami gangguan pernafasan. Disamping itu, mereka juga harus berhadapan dengan masyarakat lokal pemilik kebun tempat tumbuhnya pohon-pohon pinus tersebut. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika getah yang disadap dan sudah siap dipanen justru dibuang dan dibakar oleh pemilik lahan tersebut sebelum para perempuan pengungsi tersebut sempat memanennya.

Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan bantuan dana untuk penguatan ekonomi bagi masyarakat miskin, baik pengungsi maupun masyarakat pada umumnya yang bukan pengungsi tapi terkena dampak konflik.[5] Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, tidak adanya ketrampilan untuk membuat proposal, dan tidak adanya kejelasan kategori masyarakat yang pantas menerima bantuan menjadikan program ini tidak begitu memberi manfaat bagi pengungsi. Masyarakat, kaya maupun miskin, beramai-ramai membuat proposal. Dalam survei kelayakan, hanya orang-orang yang sudah memiliki usaha yang cukup maju yang dilirik petugas survei. Perempuan pengungsi yang memasukkan proposal bingung mengapa mereka tidak disurvei. Bahkan ada yang proposalnya dikembalikan dengan alasan sudah terlambat. Padahal, pada waktu yang bersamaan petugas menerima proposal dari masyarakat lokal yang sudah memiliki usaha yang cukup maju. *"Ada apa sebenarnya dengan pemerintah kita?"* demikian tanya seorang ibu di pengungsian.

5. Pemerintah Pusat menyalurkan dana sebesar Rp. 58 miliar untuk pemulihan pasca konflik Poso dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Dari jumlah tersebut, hanya Rp. 10 miliar yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Sisanya Rp. 48 miliar diberikan dalam bentuk proyek. Pola ini dinilai banyak kalangan tidak tepat sasaran (Kompas, 30 Mei 2007).

2. 1. 2. Akses pada Layanan Dasar

Akses bantuan bagi perempuan terhadap layanan dasar selalu dipinggirkan atau bahkan tidak menjadi perhatian sama sekali. Alasan pengabaian cenderung klasik, bahwa pemenuhan hak perempuan bukan bagian dari kebutuhan besar dari komunitas yang harus menjadi perhatian utama dan bukan pula kebutuhan dasar yang diprioritaskan. Kurangnya ketersediaan layanan publik di beberapa lokasi pengungsian hanya dengan alasan jumlah pengungsi yang tidak seimbang dengan budget yang dimiliki untuk membangun sarana publik.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diterima pengungsi adalah jauh dari standar pemenuhan HAM bagi perempuan. Beberapa lokasi pengungsian belum pernah mendapat layanan kesehatan dasar bagi perempuan, termasuk kesehatan reproduksi. Kalaupun ada, bantuannya hanya sekali, seperti pembalut. Hal ini berimplikasi pada minimnya pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap kesehatan tubuh mereka. Alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi hanya tersedia dalam jumlah yang sangat kecil. Ironisnya, orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pengurus pengungsi malah menjual bantuan pil KB dengan harga yang sulit dijangkau oleh perempuan pengungsi.

2. 1. 3. Akses pada Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan sangat minim. Beberapa sarana umum seperti gedung SD dan gereja dibangun hanya dari hasil swadaya masyarakat pengungsi setempat. Tenaga pengajar yang tersedia juga sangat terbatas jumlahnya dan dengan kemampuan yang sangat rendah karena tidak memiliki latar belakang sebagai pengajar. Akibatnya, muatan pengajaran yang diterima oleh anak didik memprihatinkan. Sempat pula ada program beasiswa yang berlangsung selama 2 tahun.

2. 1. 4. Akses pada Bantuan Hukum

Dalam kondisi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di pengungsian yang sangat sulit, layanan yang menyangkut hak-hak hukum pengungsi adalah sebuah kemewahan, misalnya untuk hak-hak keperdataan, pendampingan dan penyuluhan hukum. Keberpihakan pihak penegak hukum terhadap perempuan korban kekerasan pun masih sangat kurang. Hanya mereka yang mempunyai pengaruh yang kuat yang akan mendapat penanganan serius. Kasus-kasus KDRT sangat kurang mendapat perhatian dari pihak penegak hukum, apalagi kalau korbannya adalah seorang pengungsi yang tidak paham akan hak-hak hukumnya. Di samping itu, tidak adanya lembaga bantuan hukum di sekitar tempat pengungsian, minimnya informasi dan pengetahuan tentang hukum, dan budaya yang menganggap kekerasan oleh suami sebagai aib yang harus ditutupi merupakan hambatan bagi akses perempuan korban terhadap keadilan.

Berbagai kasus hukum yang tidak terselesaikan lewat jalur hukum kemudian berakhir dengan penyelesaian lewat mekanisme adat melalui mediasi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penyelesaian tersebut sebenarnya tidak memberikan keadilan pada masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Pihak yang paling dirugikan dalam penggunaan mekanisme adat tersebut adalah perempuan. Hal ini terutama karena aturan adat cenderung bersifat patriarkis dan karenanya, pemihakan pada laki-laki sangat kuat. Misalnya saja dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Hampir semua kasus tersebut diselesaikan dengan melibatkan para tokoh komunitas dan mediasi keluarga. Korban, karena ketidaktahuan akan hak-hak mereka, hanya bisa menerima meskipun merasa sangat tidak adil.

Sebagai contoh adalah penyelesaian kasus KDRT di lokasi pengungsian Malewa. Dalam kasus ini, suami menganiaya istrinya sampai babak belur ketika suami ketahuan berselingkuh. Penganiayaan itu dilakukan di depan anak-anak mereka dan kemudian pelaku meninggalkan rumah untuk tingggal dengan perempuan selingkuhannya. Penganiayaan tersebut mengakibatkan korban depresi berat dan harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih sebulan. Ketika korban kembali, anak-anak mereka dalam keadaan tidak terurus. Mereka juga tidak lagi bersekolah karena korban tidak memiliki uang untuk membayar uang sekolah. Bahkan untuk makan pun korban kesulitan sebab pelaku tidak pernah memberi nafkah lagi. Peristiwa ini sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Penanganan yang diberikan polisi hanya sebatas pembuatan BAP. Menyikapi kasus ini, dewan adat bersama pejabat kelurahan memutuskan pelaku harus membayar denda kepada korban sebesar Rp. 1 juta. Pelaku membayar denda tersebut dengan menjual satu-satunya tanah milik mereka yang telah diatasnamakan pada anak mereka. Sampai sekarang, pelaku masih tinggal dengan perempuan selingkuhannya. Terkadang, pelaku datang untuk menjenguk anak-anaknya. Korban masih trauma dengan peristiwa tersebut dan hanya bisa pasrah sambil mengurus anak-anaknya yang masih kecil-kecil.

Peran lembaga agama dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan juga masih sangat kurang. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), para tokoh agama hanya memberi bimbingan rohani untuk menjaga keutuhan keluarga. Solusi yang ditawarkan adalah bagi perempuan korban untuk bersabar. Solusi ini dianggap langkah yang paling penting tanpa peduli dengan perasaan sakit dan tidak adil yang dirasakan korban dengan penganiayaan yang dialaminya. Pendekatan seperti inilah yang membuat banyaknya persoalan perempuan, khususnya di wilayah pengungsian, terbungkam, tanpa ada penanganan yang serius dan tuntas.

2. 1. 5. Akses pada Pembuatan Keputusan

Dalam proses pengambilan kebijakan di pengungsian seringkali perempuan dipinggirkan. Ini karena perempuan dianggap sebagai kelompok yang tidak mewakili kepentingan pengungsi, dan juga karena adanya pandangan bahwa sebagai istri, perempuan seharusnya menerima apa pun keputusan dari suami. Kalaupun ada perempuan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, biasanya perempuan tersebut adalah tokoh di dalam masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat. Sayangnya, mereka belum tentu bisa berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan yang ada di lokasi pengungsian.

2. 1. 6. Rasa Aman Perempuan di Pengungsian

Di pengungsian, perempuan jauh dari rasa aman. Perempuan tidak nyaman akibat tidak tersedia ruang pribadi untuk pasangan suami istri; sehingga sejumlah anak menyaksikan orang tua mereka berhubungan seksual. Sarana umum seperti MCK tersedia dengan pintu yang tidak bisa dikunci. Bahkan ada kamar mandi yang tidak memiliki pintu dan dindingnya tidak rapat/jarang-jarang dan saat malam hari, tidak ada penerangan di kamar mandi. Semua faktor ini menyebabkan banyaknya kasus pengintipan oleh orang tidak dikenal saat perempuan sedang mandi. Dampak psikologis sangat jelas terlihat; perempuan dalam pola hidup sehari-hari selalu merasa tidak tenang dan sering curiga pada orang.

2. 2. Kasus

2. 2. 1. Kekerasan[6]

Selain kekerasan seksual dalam bentuk pengintipan, seperti yang dijabarkan dalam pembahasan tentang rasa aman, kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya oleh suami kepada istri. Dalam kasus KDRT, bentuk kekerasan yang dilakukan mulai dari kekerasan verbal seperti makian sampai pemukulan dan penganiayaan. Kekerasan tersebut berlanjut pada pembenaran atau toleransi dari orang-orang terdekat korban atas perilaku suami sebagai perwujudan dari stres karena berada dalam himpitan ekonomi setelah kehilangan atau tidak memiliki pekerjaan akibat konflik. Akibat stres tersebut, pengungsi laki-laki jadi mabuk-mabukan atau cepat marah pada hal-hal remeh, seperti ketika merasa istri tidak melayaninya dengan baik atau ketika anak menangis ketika pelaku hendak tidur siang. Disamping tidak mendapat pembelaan, beberapa korban justru menjadi tontonan dan bahan gunjingan. Ini terutama terjadi pada korban pemukulan dan penganiayaan akibat rasa cemburu suami.

Jenis kekerasan lainnya yang juga ditemukan adalah kasus perkosaan. Tercatat satu kasus perkosaan pada lokasi pengungsian yang menjadi wilayah pemantauan. Penempatan aparat keamanan di daerah konflik juga berkontribusi pada tingkat kekerasan terhadap perempuan pengungsi. Jenis kekerasan yang paling mengemuka adalah penelantaran pelaku terhadap korban yang hamil akibat hubungan seksual mereka. Korban sebelumnya dirayu atau ditipu dengan janji akan dinikahi agar mau berhubungan seksual dengan pelaku. Bila korban menuntut untuk dinikahi, beberapa pelaku justru meninggalkan korban begitu saja, ataupun hanya menikahi secara siri atau tidak tercatat. Ada pula pelaku yang menggunakan mekanisme adat untuk menghindari tanggungjawabnya.[7] Lewat mekanisme adat yang sama sekali tidak berpihak kepada perempuan, pelaku melakukan kompromi dengan cara membayarkan uang 1-2 juta rupiah kepada keluarga korban. Jenis kekerasan lain yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah menjadikan perempuan di tempat pengungsian sebagai buruh tanpa bayaran, dimana mereka harus memasak dan memberi makan atau menyediakan makanan untuk aparat keamanan yang bertugas. Mereka tidak sanggup menolak, bukan saja karena kuatir kehilangan jaminan keamanan lewat kehadiran aparat tetapi juga tidak ada jaminan bahwa penolakan tersebut akan berbuah sanksi kekerasan terhadap dirinya atau anggota keluarganya.

2. 2. 2. Diskriminasi

Tindakan diskriminatif terhadap perempuan adalah perilaku yang menonjol di pengungsian. Perlakuan diskriminatif terutama terlihat dalam proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam komunitas pengungsi. Dalam kegiatan-kegiatan pertemuan, kehadiran suami sudah dianggap mewakili istrinya. Kalaupun ada perempuan yang hadir, pendapatnya jarang didengarkan.

Tindakan diskriminatif juga terjadi pada proses distribusi bantuan. Jenis bantuan yang tersedia tidak memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Disamping itu, ada beberapa perempuan yang selalu kesulitan mengakses bantuan, yaitu perempuan dengan status sebagai istri kedua,

6. Laporan ini khusus membicarakan keadaan perempuan pengungsi di tempat pengungsian. Hal ini tidak berarti pada masyarakat lokal non pengungsi tidak terjadi kekerasan pada perempuan.

7. Pemantauan Komnas Perempuan di lokasi non pengungsian di Poso menemukan bahwa pola penanganan yang serupa ini juga digunakan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan aparat keamanan dan militer.

perempuan janda yang ditinggal pergi oleh suaminya, perempuan orang tua tunggal atau perempuan yang melahirkan tanpa dinikahi, perempuan yang cacat tubuhnya, perempuan janda yang ditinggal mati suaminya, dan perempuan lansia yang janda.

2. 3. Pola Penanganan Pengungsi

Selain pemerintah, gerakan solidaritas untuk penanganan korban juga dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat maupun individu. Pada lokasi pengungsian yang menjadi tempat pemantauan, lembaga-lembaga yang memberi bantuan kepada pengungsi adalah CWS, CARE, IMC dan Dinas Sosial. Bantuan diberikan selama tahun 2000–2003. Bantuan terutama berupa kebutuhan pokok umum (sandang, pangan, tenda, alat tidur), layanan dasar (kesehatan, termasuk beasiswa pendidikan, dan penerangan) dan fasilitas bersama (rumah ibadah, MCK). Salah satu alat ukur keberhasilan penanganan adalah tidak terdapat kasus kematian karena kelaparan. Hanya saja, tidak ada program khusus yang menangani kesehatan reproduksi, seperti pelayanan KB dan pengadaan alat-alat kontrasepsi. Kebutuhan dasar yang spesifik perempuan pun selalu terabaikan.

2. 3. 1. Advokasi Perempuan

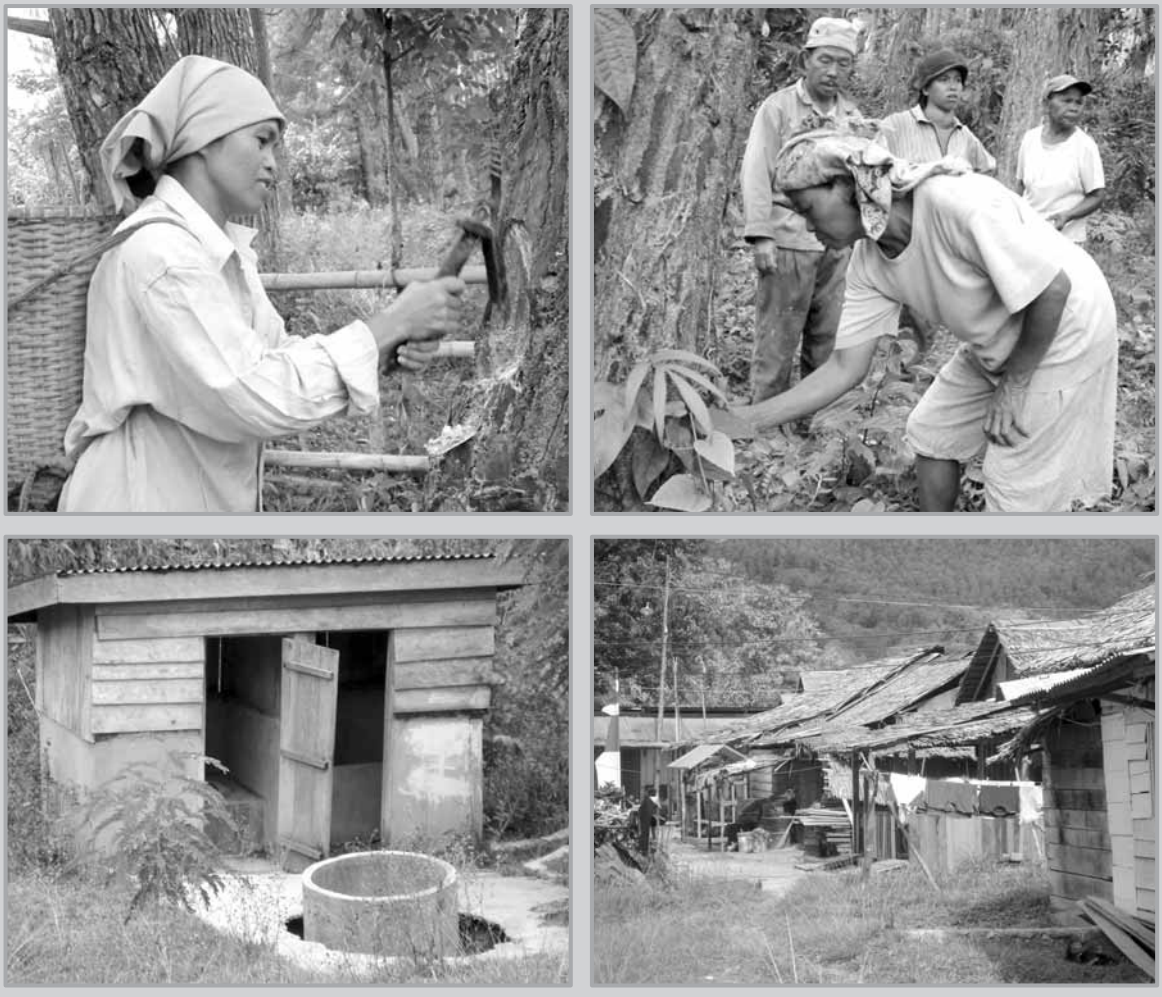
Lembaga lokal yang bekerja untuk penguatan perempuan pengungsi adalah KPKP-ST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan – Sulawesi Tengah) dalam bentuk pendampingan korban, pendidikan gender, diskusi komunitas, pendokumentasian kasus kekerasan dan advokasi. Selain membangun kesadaran perempuan, lembaga ini juga melibatkan laki-laki dalam diskusi-diskusi untuk mendorong penerimaan masyarakat pada keberadaan perempuan sebagai mitra. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mempertegas bahwa hak perempuan dilindungi oleh undang-undang. Walaupun kerja ini belum maksimal, tetapi sudah mulai terbangun kesadaran di dalam kelompok perempuan bahwa kekerasan yang terjadi pada mereka adalah bukan aib yang harus disembunyikan.

Selain KPKP-ST, juga ada Komisi Wanita Sinode GKST yang melakukan pendampingan kepada perempuan pengungsian, mengadakan penyuluhan dan bantuan pangan. Ada pula tokoh agama yang melakukan pendampingan secara individual kepada perempuan pengungsi yang mengalami trauma akibat konflik.

2. 3. 2. Mengeliminir Potensi Konflik Pengungsi dan Masyarakat Lokal

Upaya memperkecil kemungkinan konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal dimotori oleh CC-GKST (*Crisis Centre* – Gereja Kristen Sulawesi Tengah) dengan mencermati kemungkinan-kemungkinan konflik, misalnya pemberian bantuan yang hanya untuk pengungsi, dan pemakaian tanah yang diklaim sebagai milik masyarakat lokal untuk kebun pengungsi.

Untuk mencairkan situasi akibat kecemburuan sosial dan kesalahan komunikasi, dibuat pertemuan antara masyarakat lokal dan pengungsi. Forum tersebut membicarakan kesepakatan tentang pembuatan dan penggunaan fasilitas umum secara bersama oleh pengungsi dan penduduk lokal. Dalam sengketa tanah, masyarakat dan pengungsi dipertemukan untuk mencari solusinya bersama-sama, antara lain dengan meminta penduduk lokal menunjukkan tempat berkebun bagi pengungsi. Pertemuan informal juga diadakan antara komunitas anak muda dengan membuat kegiatan bersama dalam bidang musik maupun pagelaran seni yang lain. Lewat pertemuan-pertemuan tersebut, pengungsi dan masyarakat lokal diharapkan dapat lebih menyatu dan bisa menyelesaikan persoalan secara mandiri ketika ada ketegangan di antara mereka.



(Searah jarum jam): Menyadap karet; Perempuan pengungsi bekerja di kebun karet; Perkampungan pengungsi di Later; MCK rusak di Malewa.

2. 4. Analisis dan Pembelajaran

Temuan-temuan di atas jelas memperlihatkan bahwa perempuan di tempat pengungsian belum mendapat tempat atau belum dilihat sebagai seseorang yang harus dihargai dan dihormati eksistensinya. Sosok perempuan lebih sering diteropong dari keberadaan laki-laki yang ada disampingnya. Seorang perempuan yang belum menikah akan terus dianggap anak yang selalu diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Jika perempuan sudah menikah maka kehadiran mereka dianggap sudah terwakili oleh suami. Pendekatan perwakilan ini selalu dilandasi dengan alasan bahwa perempuan bukan penanggung jawab utama dalam keluarga.

Sementara eksistensi perempuan sebagai individu yang merdeka dan bertanggung jawab tidak diberikan, perempuan yang terus-menerus menjadi penanggung yang lebih berat dampak konflik. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi pemenuhan HAM perempuan pengungsi. Data di atas terkait menunjukkan bagaimana perempuan pengungsi hampir-hampir tidak memiliki akses untuk pemenuhan HAM-nya. Pola penanganan pengungsi yang tersedia tidak berperspektif gender dimana aktor-aktor pemberi bantuan belum melihat perempuan sebagai subjek yang memiliki kebutuhan yang khas terkait dengan kehakikiannya sebagai perempuan.

Berlangsungnya tindak kekerasan dan penyelesaian kasus yang ditawarkan, khususnya pada kasus kekerasan seksual, membuktikan kalau perempuan berada pada posisi yang dilemahkan. Kasus kekerasan suami pada istri selalu dilihat sebagai persoalan di ranah privat yang tidak boleh dicampuri orang lain walaupun korban sudah meminta bantuan. Penyelesaian perkosaan dan ingkar janji oleh aparat memprioritaskan opsi untuk menikahkan korban dengan pelaku atau dengan membayar denda adat.

Dalam kasus kekerasan yang dilakukan aparat, belum pernah ada kasus yang ditangani oleh kesatuan pelaku yang berakhir dengan hukuman pemecatan atau melalui proses hukum yang sebenarnya. Sebaliknya, pelaku dipindahtugaskan untuk menghindar dari tanggung jawab pada kasus yang dilaporkan. Hal ini dapat terjadi karena negara tidak punya konsep jelas dan tegas terhadap perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

3. REKOMENDASI

a. Evaluasi menyeluruh semua program bantuan bagi pengungsi yang pernah diberikan baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah.

b. Baik pemerintah daerah maupun pusat harus memiliki SOP (protap) tentang penanganan pengungsi baik karena bencana sosial maupun bencana alam, termasuk didalamnya adalah penetapan status pengungsi dan program relokasi untuk pengungsi yang memilih tidak kembali ke desa asalnya.

c. Pelibatan pengungsi maupun masyarakat lokal dalam setiap penyiapan program bantuan bagi pengungsi terutama untuk program-program pemulihan. Seluruh program tersebut seharusnya melibatkan komunitas pengungsi dan porsi keterlibatan perempuan harus seimbang dengan laki-laki.

d. Perlunya sosialisasi hukum di lokasi pengungsian, antara lain tentang UU PKDRT, KUHP. Disamping itu, perlu ada upaya mendekatkan pelayanan hukum di lokasi pengungsian dengan mendorong peran LSM untuk masuk lewat program penyuluhan dan pendidikan.

e. Pemulangan pengungsi terkait erat dengan kondisi keamanan yang kondusif. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu menciptakan sistem keamanan yang komprehensif di seluruh wilayah Poso.



LAMPIRAN

Aceh,
Jogjakarta,
Nusa Tenggara Timur,
dan Maluku.

Perempuan Pengungsi Di Barak Lhong Raya

Kec. Banda Raya, Kotamadya Banda Aceh
Januari 2007

Latar Belakang

Dua tahun lebih setelah bencana, kondisi di pengungsian Aceh saat ini sangat memprihatinkan. Dalam kondisi serba keterbatasan fasilitas, pengungsi harus mampu bertahan untuk tetap hidup di pengungsian. Tempat untuk mereka tinggal selamanya (rumah permanen) tidak kunjung tiba. Bahkan banyak dari mereka belum jelas kemana mereka akan direlokasikan. Apalagi bagi sebagian pengungsi yang dulunya adalah penyewa rumah- untuk kembali ke desa asal juga tidak mungkin karena mereka tidak memiliki tanah untuk mendirikan sebuah bangunan. Saat ini mereka hanya menunggu kabar yang tidak pasti, apakah mereka akan mendapatkan rumah atau tidak, atau mungkinkah selamanya mereka akan tinggal di tempat pengungsian.

Gambaran Umum

Barak Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kotamadya Banda Aceh adalah salah satu tempat pengungsian di Banda Aceh. Pengungsi di daerah tersebut berasal dari desa yang berlainan, yaitu dari Desa Ulee Lheu, Jeulingke, Calang, Kampung Mulia, Lampaseh, Punge, Kampung Jawa, Kampung Keuramat, dan dari beberapa desa lainnya. Saat ini, jumlah pengungsi di barak tersebut tidak begitu banyak lagi karena sebagian besar pengungsi sudah pindah. Ada banyak yang kembali ke desa asal mereka. Bagi pengungsi yang tanahnya sudah menjadi laut, mereka direlokasikan ke tempat lain. Jumlah pengungsi yang tertinggal di Barak Lhong Raya saat ini berjumlah 318 jiwa, 60 KK, diantaranya 9 orang janda, 5 orang duda, 4 perempuan lansia, dan 4 laki-laki lansia. Mayoritas pengungsi laki-laki bekerja sebagai penjual ikan, buruh bangunan, sedangkan pengungsi perempuan mayoritas bekerja sebagai pencuci pakaian, penjual kue, dan berjualan di kios.

Akses Perempuan Pengungsi pada Bantuan Pokok

Saat ini, jenis bantuan pokok yang diterima pengungsi Barak Lhong Raya hanya beras 10 kg/jiwa/bulan dan minyak goreng 6 ons/jiwa/bulan. Jenis bantuan pokok lainnya, seperti sandang/pakaian, alat sanitasi dan kesehatan, dan pakaian khusus untuk perempuan tidak tersedia lagi. Bantuan seperti itu hanya mereka terima sekali pada saat masa tanggap darurat dahulu.

Air bersih dari PDAM hanya hidup pada saat malam hari sedangkan siang hari hanya sekali-sekali saja. Karena persediaannya sedikit, para pengungsi perempuan harus mengantri cukup lama hanya mendapatkan dua ember air untuk memasak setiap harinya. Untuk mendapatkan air bersih, para perempuan harus menyedot pipa air dengan mulut. Ini sangat melelahkan. Untuk mandi dan mencuci, pengungsi menggunakan sumur milik warga setempat yang kondisi airnya tidak bersih.

Ruang privat untuk suami istri tidak tersedia. Untuk membuat ruang privat tersebut, para pengungsi menyekat sendiri kamar barak mereka dengan menggunakan tripleks bagi yang memiliki uang atau hanya dengan selembar kain bagi yang tidak memiliki cukup uang.

Akses Perempuan Pengungsi pada Layanan Dasar

Perempuan pengungsi tetap memiliki akses perempuan pada layanan dasar seperti layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga medis, bidan, dan perawat. Meskipun ruang pemeriksaan khusus untuk perempuan tidak tersedia, layanan kesehatan reproduksi seperti pilihan alat kontrasepsi, tempat pelayanan, dan tenaga ahli juga masih tersedia. Hanya saja, layanan tersebut tidak tersedia di sekitar pengungsian melainkan di Puskesmas setempat. Karenanya, pengungsi harus mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju tempat layanan itu.

Layanan pendidikan formal secara gratis untuk tikat SD tersedia dan lokasinya berada di sekitar Barak Lhong Raya. Untuk SMP dan SMU tidak tersedia dan untuk itu, mereka harus menggunakan kendaraan untuk menjangkau sekolah dan harus membayar. Layanan bantuan hukum dan layanan administrasi sama sekali tidak tersedia.

Akses Perempuan Pengungsi pada Fasilitas Bersama

Fasilitas barak yang disediakan berukuran 4 x 4 m setiap kamarnya. Saat ini, banyak barak yang sudah tidak tempati lagi dan banyak juga barak yang sudah dihancurkan. Bagi barak yang tidak ditempati lagi, pemerintah setempat memberi tanda silang warna merah.

MCK juga disediakan, tetapi ukurannya sangat kecil, yaitu 1x1 m. Banyak MCK yang pintunya sudah rusak dan pembuangan airnya tidak mengalir. Sebagian besar MCK tidak dipergunakan lagi karena di MCK tersebut tidak ada air. Pengungsi menggunakan sumur warga untuk mandi dan mencuci, dan ada juga yang membuat kamar mandi darurat di depan baraknya.

Dapur umum disediakan dengan kondisi tidak tertutup. Akibat banyak angin, pengungsi tidak dapat mempergunakan dapur umum itu untuk memasak. Mereka menggunakan dapur umum sebagai tempat menjemur pakaian yang memang tidak disediakan, tempat parkir kendaraan, atau bahkan sebagai gudang.

Penerangan, balai pertemuan, tempat ibadah, papan pengumuman dan sarana hiburan seperti TV juga disediakan dan pengungsi dapat menggunakannya secara gratis. Demikian pula dengan fasilitas olah raga; lokasi Barak Lhong Raya memang berada di sekitar stadion olah raga. Tempat sampah juga tersedia, tetapi karena sampah diambil hanya setiap 1 kali dalam 1 minggu maka sampah menjadi bertumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi sekelilingnya.

Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Setiap kali dalam rapat pengambilan keputusan, perempuan tidak pernah diajak. Yang diundang hanya laki-laki saja, baik pertemuan untuk membahas bantuan rumah, cara pembagian bantuan maupun masalah keamanan lingkungan. Ada pula pertemuan yang tidak pernah diselenggarakan di dalam pengungsian, seperti pertemuan untuk membahas penggunaan fasilitas bersama.

Keterlibatan Perempuan dalam Kegiatan di Pengungsian

Kegiatan advokasi kebijakan yang berpihak pada pengungsi dan penanganan kasus kekerasan/kejahatan adalah dua contoh dari kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan di pengungsian. Kalaupun ada kegiatan, selama ini banyak yang tidak melibatkan perempuan; hanya laki-laki saja yang dilibatkan. Akibatnya, perempuan merasa dirinya tidak dibutuhkan atau tidak berguna dalam kegiatan tersebut.

Rasa Aman dan/atau Nyaman Perempuan di Pengungsian

Kondisi bangunan di barak yang tidak bagus menjadikan pengungsi perempuan merasa tidak aman berada di dalam barak. Misalnya, kondisi MCK yang tidak tertutup rapat menyebabkan perempuan gampang diintip. Kondisi kamar barak yang tidak tertutup sampai ke atas juga menyebabkan perempuan merasa tidak nyaman bila berada sendirian di dalam kamar. Saat ini mereka mengambil inisiatif untuk menutupnya dengan tripleks.

Sari Afrianti
Pemantau

Laporan Pemantauan

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Di Pidie, Aceh

I. Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang

Selama dua tahun terakhir, masyarakat Aceh bergeliat cepat untuk bangkit dari dampak konflik bersenjata dan bencana tsunami. Apalagi dengan adanya pemimpin-pemimpin baru di masyarakat Aceh menyusul perdamaian antara RI-GAM. Namun jejak dampak terlihat, khususnya bagi perempuan, anak-anak dan kaum rentan, di lokasi-lokasi pengungsian akibat tsunami.

Setelah dua tahun pasca bencana, kondisi di pengungsian Aceh saat ini sangat memprihatinkan. Dalam kondisi serba keterbatasan fasilitas, pengungsi harus mampu bertahan untuk tetap hidup di sana. Hal ini karena selain di tempat pengungsian, tempat untuk mereka tinggal sudah tidak ada lagi.

Laporan berikut ini adalah tentang kondisi di Barak Musa, Desa Musa, Kecamatan Bandar Baru, Pidie. Saat ini jumlah pengungsi di Barak Musa adalah sebanyak 137 KK. Jumlah keseluruhan pengungsi sudah tidak terdata lagi karena banyak pengungsi sudah kembali ke daerah asal. Ada juga yang sudah keluar dari pengungsian dengan alasan menikah atau mencari pekerjaan di daerah lain.

1. 2. Kondisi Umum

Kondisi perekonomian di pengungsian Barak Musa diperkirakan sudah mulai membaik karena 35% dari kepala keluarga yang tertinggal sudah mulai bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Namun, sebagian besar pengungsi belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, sebagian pengungsi belum bisa melakukan aktivitas perekonomian karena tempat mereka mengungsi jauh dari tempat mereka bekerja, atau lahan pertanian mereka sudah tidak ada lagi akibat terendam air akibat tsunami.

1. 3. Tantangan Melakukan Pemantauan

Kehidupan pengungsi Aceh sangat tergantung dengan bantuan. Karena Barak Musa bukan daerah dampingan lembaga dokumentator, maka ketika akan dilakukan pendokumentasian, pengungsi beranggapan akan mendapatkan bantuan materi. Anggapan ini sempat membuat dokumentator kuatir diusir pengungsi setelah mereka diberi penjelasan bahwa pendokumentasian ini tidak serta merta berujung pada bantuan. Selain itu, koordinator pengungsi sulit ditemui. Akibatnya, dokumentator kesulitan untuk mendapatkan informasi, baik informasi tentang jumlah pengungsi maupun informasi tentang kondisi lapangan.

II. Hasil Pemantauan Kondisi HAM Perempuan Pengungsi

II. 1. Akses pada Bantuan Pokok

Akses pada bantuan pokok saat ini sudah tidak banyak terpenuhi lagi. Pemerintah hanya mengalokasikan bantuan pokok untuk waktu dua tahun meskipun pada kenyataannya masih ada pengungsian di Aceh setelah

dua tahun bencana dan mereka masih membutuhkan bantuan pokok. Bantuan yang masih tersedia sampai sekarang hanya beras 10 kg/jiwa/bulan, mi instan 5 bungkus/jiwa/bulan, dan minyak goreng 6 ons/jiwa/bulan. Air bersih yang tersedia hanya cukup untuk memasak dan untuk mendapatkannya sangat sulit. Pengungsi harus mengantri kira-kira 30 menit per orang untuk mendapatkan satu ember kecil dan yang harus melakukan hal tersebut adalah perempuan. Air sumur memang tersedia, tetapi menurut pengungsi air tersebut tidak bisa untuk diminum.

Barak tempat pengungsi tinggal saat ini masih tersedia tetapi kondisinya sudah tidak layak. Banyak papan barak yang sudah rapuh dan dinding sudah berlubang. Kondisi ini sangat dikhawatirkan oleh perempuan pengungsi karena mereka lebih sering berada di barak daripada laki-laki. Perempuan pengungsi juga mengeluhkan kekuatiran mereka diintip orang saat berganti pakaian atau tidur di dalam kamar baraknya.

II. 2. Akses pada Layanan Dasar

Di Barak Musa masih tersedia layanan kesehatan tetapi pelayanannya tidak maksimal, seperti tidak adanya pelayanan untuk ibu melahirkan dan ibu menyusui dan ruang khusus pemeriksaan untuk perempuan. Ketika waktunya melahirkan, mereka harus mencari pertolongan dari luar dan harus membayar biaya layanan yang mahal. Karena obat-obatan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, pengungsi harus mencari layanan kesehatan di luar pengungsian. Pelayanan kesehatan reproduksi khususnya alat kontrasepsi sama sekali tidak tersedia. Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengungsi harus mencari keluar lokasi pengungsian dengan menggunakan alat transportasi umum dan harus membayar.

Layanan pendidikan yang tersedia di Barak Musa hanya tingkat SD karena lokasi pengungsian dekat dengan sebuah SD. Untuk tingkat SMP dan SMU, pengungsi harus bersekolah di luar pengungsian dan harus mengeluarkan biaya untuk dapat menggunakan transportasi umum. Pendidikan non formal sampai saat ini tidak tersedia meskipun pemerintah pernah berjanji untuk menyelenggarakan program tersebut. Sementara itu, layanan ekonomi bagi perempuan baru dimulai dengan perdataan dari lembaga lokal, misalnya oleh PASKA Pidie.

II. 3. Akses pada Fasilitas Bersama

Seluruh fasilitas yang tersedia dapat digunakan perempuan pengungsi. Hanya saja, kondisinya sudah tidak memadai seperti barak, MCK, dan dapur umum.

II. 4. Akses pada Pembuatan Keputusan

Pada umumnya, perempuan pengungsi yang ada di Barak Musa kabupaten aktif dan punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dalam rapat misalnya tentang cara pembagian bantuan, prioritas penerima bantuan, dan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Pada umumnya, yang cepat mendapatkan rumah adalah perempuan kepala keluarga.

II. 5. Keterlibatan dalam Kegiatan di Pengungsian

Perempuan pengungsi aktif terlibat dalam segala aktivitas di pengungsian, seperti pengajian, rapat gotong royong dan kegiatan PKK. Secara khusus, ada dua perempuan di Barak pengungsi Musa yang aktif menyuarakan kepentingan perempuan.

Keterlibatan aktif perempuan juga terlihat di berbagai lokasi barak di Pidie. Bahkan di beberapa barak, yang melakukan pembongkaran barak adalah perempuan. Hal ini karena menurut pengungsi perempuan mereka lebih mampu dalam menghadapi persoalan yang datang dari luar terkait dengan proses pembongkaran barak.

II. 6. Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Karena kondisi bangunan di barak tidak lagi baik, pengungsi perempuan merasa tidak aman dalam menggunakan sejumlah fasilitas. Kondisi MCK yang kurang tertutup menyebabkan perempuan rawan diintip, dan kondisi kamar barak yang tidak tertutup sampai ke atas menyebabkan perempuan merasa tidak nyaman bila berada sendirian di dalam kamar. Saat ini mereka mengambil inisiatif untuk menutupnya dengan tripleks.

II. 7. Kekuatan Perempuan

- Perempuan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
- Perempuan terlibat dalam segala aktivitas di pengungsian

III. Pola Penanganan

Selama ini, rehabilitasi dan rekonstruksi difasilitasi oleh BRR dan lembaga lainnya. Meskipun sebagian besar persoalan tertangani, bantuan diberikan belum maksimal dan belum memenuhi standar kemanusiaan.

IV. Rekomendasi

- Pemeritah harus mendata kembali jumlah pengungsi yang ada di pengungsian.
- Pemerintah harus jeli melihat kebutuhan dari pengungsi sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengungsi.
- Pelibatan perempuan pada keseluruhan masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan sampai selesai. Pelibatan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menggunakan pendekatan untuk memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat mengeluarkan pendapatnya dengan leluasa.
- Perbaikan persiapan pemerintah dalam menghadapi masa tanggap darurat, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.
- Setiap rehabilitasi dan rekonstruksi harus memenuhi kebutuhan perempuan dan anak seperti penyediaan air bersih, MCK dan dapur.
- Adanya kejelasan dan transparansi dari pemerintah tentang bantuan yang disalurkan untuk pengungsi.

Safiah T. A.
Pemantau

Pemantauan

Kondisi HAM Perempuan di Pengungsian

Pengambilan data mulai tgl **29/Mei/2007** s/d **5/Juni/2007.**
Waktu Pemantauan Sebelumnya (bila ada), tgl **28/Juni/2006.**
Nama Dokumentor : **Bonnie Kertaredja.** Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Organisasi : **Solidaritas Perempuan Kinasih.**
Tempat Tinggal Dokumentor : **bukan di pengungsian.**

I. Informasi Dasar

1. Data Lokasi Pengungsian			
Nama Lokasi : ***Lapangan Jejeran***		Kabupaten/kota	: ***Bantul***
Desa/Kelurahan	: ***Wonokromo***	Propinsi	: ***Daerah Istimewa Yogyakarta***
Kecamatan	: ***Pleret***	Kode Area Pengungsi	: (diisi kemudian saat *entry* data)

2. Penyebab terjadinya pengungsian: ***gempa***
3. Lama mengungsi ***15 hari***, atau sejak tanggal ***28 Mei – 10 Juni 2006***
4. Bentuk Hunian Sementara (Huntara) :

a. Tanah Milik sendiri	***b. Bukan Tanah Milik sendiri***
✓ Tenda	✓ Tenda
✓ Rumah darurat/dibuat dari puing² sisa rumah	✓ Barak

5. Asal Pengungsi (desa, kec, kab)
   ✓ dari satu daerah, yaitu : ***Wonokromo, Pleret, Bantul.***

6. Jumlah Pengungsi

Jumlah KK ***3.505*** unit
Pasangan menikah : ***475*** orang
Duda/orang tua tunggal : ***234*** orang
Perempuan Kepala Keluarga : ***79*** orang
Janda karena meninggal : ***37*** orang
Janda cerai : ***12*** orang
Orang tua tunggal : ***56*** orang

Unit ukur	*Dewasa*		*Anak-anak*	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
> 65 thn	467	320		
>18 – 65 thn	425	325		
> 5 – 17 thn			1354	352
≤ 5 thn			575	293
Berkebutuhan khusus (fisik)	33	44	-	-
Berkebutuhan khusus (mental)	-	-	-	-
Penyakit kronis	-	-	-	-
Stigma sosial	-	-	-	-
Hamil & melahirkan	136		-	
Menyusui	339		-	

7. Profesi/Pekerjaan Pengungsi

Jenis	*Perempuan*	*Laki-laki*
Petani	102	106
Pedagang	267	186
Pengrajin	195	-
Tukang	124	254
Industri/kerajinan/jualan di rumah	256	389
Buruh	359	597
Karyawan swasta	216	417
Pegawai Negeri Sipil / PNS	56	105
Sopir/Ojek, Kernet	-	35
Dukun Beranak	5	-
Tukang Pijit	17	23
TNI/Polri	5	45
Mocok-mocok/serabutan	57	66

8. Identifikasi Potensi Pengungsi		
Budaya lokal yang menguatkan komunitas (misal: gotong-royong, arisan)	*Tokoh pengungsi yang dipercaya komunitas dan terbuka pada upaya penegakan HAM*	*Perempuan pengungsi yang aktif & artikulatif/bisa menyuarakan kepentingan perempuan*
Di hampir semua wilayah di Jogyakarta pada umumnya masyarakat terutama di pedesaan masih memiliki rasa kekeluargaan dan tepo-seliro (toleransi) yang cukup tinggi sehingga budaya gotong-royong masih sangat tinggi bahkan dengan kejadian bencana gempa budaya ini semakin terlihat meningkat, kesadaran bermasyarakat akan hidup bersama dan saling tolong-menolong terdongkrak oleh peristiwa ini.	***Di beberapa posko pengungsian yang biasanya diurus oleh pemuda yang bukan dari kalangan pemerintah seperti kepala dukuh atau kepala RW, tokoh pengungsi cukup dapat dipercaya dan bahkan sangat gigih memperjuangkan hak-hak korban gempa, seperti mencari bantuan logistik saat keadaan darurat, kemudian memperjuangkan dana rekontruksi dengan menagih janji pemerintah, melalui* hearing *aksi masa dll.***	***Umumnya pengungsi yang aktif adalah kaum laki-laki. Akan tetapi banyak juga perempuan yang juga aktif, meskipun belum ada yang mampu menyuarakan kepentingan perempuan karena kesadaran politiknya masih lemah.***

II. Kondisi Pemenuhan HAM

1. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN POKOK				
Jenis Bantuan	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Jenis Bantuan Pokok:				***1. Pada awal gempa, tidak ada bantuan dari pemerintah dan lembaga bantuan.***
Jadup				***a. Bantuan hanya berasal dari keluarga dan pihak-pihak yang perduli. Bantuan yang dibutuhkan seperti kebutuhan spesifik perempuan, susu balita, pakaian, air bersih, obat, tenda dan kebutuhan pokok lainnya.***
Pangan/Sembako, a.l:			Pemerintah	***b. Karena bantuan yang minim, kondisi kesehatan pengungsi terganggu, misalnya dengan menderita batuk dan demam. Hal ini terutama dipicu oleh kondisi tempat mengungsi yang tidak memadai, khususnya bagi balita, anak-anak, dan perempuan.***
- beras/sejenisnya	✓			***c. Apalagi dengan tempat istirahat untuk laki-laki dan perempuan yang jadi satu, perempuan tidak merasa nyaman dalam pengungsian karena tidak bebas beristirahat.***
- mi instan	✓			
- minyak goreng	✓			
- gula	✓			
- garam	✓			
- susu	✓			
- lauk pauk	✓		SP Kinasih	
- bumbu dapur	✓			
- alat-alat dapur	✓			
Air (bersih-minum)	✓		Pemerintah Oxfam	***2. Ketika bantuan dibagikan, tidak ada penjelasan yang menyertainya. Hal ini karena pada umumnya para pengungsi sudah dapat menggunakan/memanfaatkan bantuan yang diberikan.***
Papan/Tempat Berlindung/ Shelter, a.l:				***3. Bantuan tersedia tetapi tidak bisa/sulit diperoleh adalah kebutuhan spesifik perempuan lainnya, seperti pembalut, celana dalam dan BH. Lembaga yang memberikan Solidaritas Perempuan Kinasih yang peduli terhadap kebutuhan perempuan.***
- bangunan/tenda/ terpal dan tali	✓		Pemerintah, IOM,	***a. Secara khusus, perempuan lansia kesulitan memperoleh pakaian kebaya dan jarit. Juga, tidak tersedianya bantuan khusus bagi* difabel.**
- alas tidur/tikar	✓		SP Kinasih	***b. Bantuan tersebut di atas tidak tersedia karena tidak ada yang jual, dan karenanya harus dicari di luar kota, namun transportasi saat itu sangat sulit.***
- bantal	✓			***c. Akibat tidak tersedianya bantuan ini, kelompok yang membutuhkan merasa tidak nyaman.***
- selimut	✓			***d. Secara umum, perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap akses segala bentuk bantuan maupun kekerasan. Namun sebaliknya kaum laki-laki bebas untuk mengakses segala bentuk bantuan maupun informasi.***
- kelambu/obat nyamuk	✓			
- Ruang Privat untuk Pasangan Suami Istri		✓		
Sandang/Pakaian				
- pakaian untuk semua usia	✓		SP Kinasih	
- pakaian dalam	✓			
- pakaian lainnya yang relevan, seperti baju hangat, jilbab	✓			

1. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN POKOK (Lanjutan)				
Jenis Bantuan	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Alat Sanitasi & Kesehatan - alat mandi, sikat gigi &odol, dll. - sabun cuci - sapu, sikat & alat untuk kebersihan lainnya	✓ ✓ ✓		SP Kinasih	***4. Pengungsi biasanya menerima saja segala bentuk bantuan:*** ***a. Bila tidak cocok bantuan itu dialihkan atau diberikan kepada yang membutuhkan.*** ***b. Inisiatif tersebut diambil ketika bantuan tersebut tidak bisa dipakai dalam pengungsian atau tidak dibutuhkan. Pembagian bantuan yang tidak sesuai kebutuhan ini dirasakan sangat mengganggu/kurang nyaman.***
Paket Khusus Perempuan - baju dalam (bh) - pembalut - perlengkapan ibu hamil, melahirkan - makanan tambahan untuk ibu hamil & menyusui	✓ ✓ ✓		SP Kinasih	***5. Bantuan yang sama sekali tidak ada tapi sebetulnya dibutuhkan adalah dapur umum yang memadai dan ruang khusus perempuan di pengungsian.*** ***6. Ada sebagian perempuan yang ikut proses dalam melakukan pendistribusian bantuan.***
Informasi lain yang terkait: ***Tidak tersedianya ruang privat untuk suami-istri dikarenakan pengungsi mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Pemerintah juga tidak sempat berpikir ke arah kebutuhan suami-istri sebab lebih memikirkan kebutuhan umum para pengungsi.***				

2. AKSES PEREMPUAN PADA LAYANAN DASAR				
Jenis Layanan Dasar	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Layanan Kesehatan - obat-obatan - tempat pelayanan, termasuk ruang pemeriksaan khusus perempuan, klinik yang gampang dijangkau pengungsi perempuan - tenaga medis, seperti dokter laki-laki maupun perempuan, bidan dan perawat - waktu pelayanan	 ✓ ✓ ✓ ✓		Pemerintah, PKBI, PMI	***1. Layanan yang tidak ada sejak terjadinya gempa :*** ***a. Layanan bantuan hukum, terutama sekali untuk kekerasan terhadap perempuan. Sebelum gempa, lembaga yang melayani adalah pemerintah. Selain itu, fasilitas pengembangan perekonomian seperti tempat usaha juga tidak tersedia, khususnya di jaringan yang terputus.*** ***b. Akibat tidak adanya layanan hukum, terjadi pembiaran terhadap kasus-kasus pelecehan dan kekerasan. Pembiaran ini berdampak pada persoalan psikologis bagi perempuan.***
Layanan Konseling - tempat pelayanan - tenaga konselor - waktu pelayanan	 ✓ ✓ ✓		Pemerintah, PKBI, PMI	***2. Layanan yang tersedia tetapi tidak bisa atau sulit diperoleh pengungsi :*** ***a. Layanan pengobatan penyakit kronis dan melahirkan.*** ***b. Lembaga yang memberikan layanan Pemerintah, PKBI, PMI.*** ***c. Alasannya, peralatan tidak tersedia, dan harus dirujuk kerumah sakit, disamping birokrasi yang berbelit-belit dan persediaan yang terbatas, khususnya obat-obatan bagi* difabel.** ***d. Akibat yang dirasakan oleh perempuan pengungsi adalah rasa tidak nyaman dan sangat dirugikan karena terhambat aktivitasnya, terutama bagi pengungsi perempuan* difabel *karena selalu membutuhkan bantuan orang lain bila ingin melakukan kegiatan rutin kesehariannya.***
Layanan Kesehatan Reproduksi - pilihan alat kontrasepsi - tempat pelayanan - tenaga ahli - program penyuluhan, baik bagi perempuan maupun laki-laki	 ✓ ✓ ✓ ✓		Pemerintah, PKBI	
Layanan Pendidikan (formal & nonformal, termasuk pendidikan agama) : - tempat kegiatan belajar-mengajar - alat & materi kegiatan belajar-mengajar - tenaga pendidik - waktu kegiatan	 ✓ ✓ ✓ ✓		Pemerintah, NU, Muhammadiyah	
Layanan/Bantuan Hukum, seperti mendampingi korban kekerasan; pengurusan hak milik, waris, perwalian anak		✓		***3. Layanan tersedia, tetapi tidak cocok bagi kebutuhan perempuan pengungsi :*** ***a. Pelayanan alat KB yang diberikan PKBI.***

2. AKSES PEREMPUAN PADA LAYANAN DASAR (Lanjutan)				
Jenis Layanan Dasar	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Layanan Administrasi Kependudukan - KTP - akte kelahiran - pencatatan perkawinan/ perceraian - sertifikat tanah/bangunan	 ✓ ✓ ✓ ✓		Pemerintah	***b. Alasannya, layanan diberikan di tempat terbuka dan pengungsi tidak terbiasa pakai alat kontrasepsi.*** ***c. Akibatnya, perempuan pengungsi merasa tidak nyaman untuk mengakses layanan tersebut.***
Layanan Pengembangan Ekonomi Keluarga: - pendidikan ketrampilan - layanan modal - tempat usaha - jaringan pemasaran	 ✓ ✓ ✓ ✓		Pemerintah SP Kinasih	***4. Prakarsa/inisiatif yang diambil perempuan pengungsi mengatasi keterbatasan layanan:*** ***a. Secara berkelompok maupun individu, perempuan pengungsi meminta pendampingan dari LSM, Ormas, maupun Pemerintah untuk dapat mengakses kepentingan serta hak mereka.***
Informasi lain yang terkait: ***a. Di pengungsian juga terdapat tempat khusus untuk menangani* trauma healing *bagi para pengungsi yang membutuhkan, yang dilakukan oleh para mahasiswa psikologi UGM, UII, dll.*** ***b. Pelayanan* emergency *kesehatan keliling kurang menjangkau sasaran.*** ***c. Tidak ada pelayan bantuan hukum dalam menangani kasus.***				

3. AKSES PEREMPUAN PADA FASILITAS BERSAMA				
Jenis Fasilitas Bersama	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Barak	✓		Pemerintah, PMI, TNI, BRIMOB	***1. Fasilitas yang tidak tersedia:*** ***a. MCK khusus perempuan.*** ***b. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan perempuan pengungsi sangat rentan terhadap terjadinya pelecehan. Akibatnya, perempuan merasa tidak bebas atau tidak nyaman untuk melakukan kegiatan kesehariannnya.*** ***2. Semua fasilitas yang ada dapat diakses dengan mudah.*** ***3. Hanya saja, ada fasilitas yang tidak cocok dengan kebutuhan perempuan pengungsi.*** ***Salah satunya adalah MCK yang memberi UNICEF. MCK tersebut terbuka dan sering kehabisan air. Akibatnya, perempuan pengungsi merasa kenyamanan menggunakannya berkurang.***
MCK	✓		UNICEF	
Dapur (umum)	✓		Pemerintah	
Sumur/Sumber Air	✓		Pemerintah, Oxfam	
Penerangan	✓		PLN	
Tempat Pertemuan	✓		Pemerintah	
Tempat Ibadah	✓		Pemerintah, Pengungsi	
Tempat Jemuran	✓		TNI, Pengungsi	
Tempat Sampah	✓		Pengungsi, DPU	
Saluran Pembuangan Air		✓		
Limbah		✓		
Tempat Fasilitas Olahraga	✓		Pemerintah	
Pasar/Tempat serupa		✓		
Fasilitas Informasi Bersama, seperti papan pengumuman, HT, *megafon*, radio komunitas, koran/selebaran komunitas	✓		TNI, LSM, Ormas	
Fasilitas Transportasi Bersama, seperti jalan, jembatan atau pun rakit/sampan sehingga tempat pengungsian dapat dijangkau untuk penyaluran bantuan	✓		Pemerintah, IOM	
Sarana hiburan bersama(TV), dll	✓		RCTI, SCTV, INDOSIAR, TPI, TRASN, ANTV, Seniman Peduli	
Informasi lain yang terkait: ***a. Program Samsung Peduli menyediakan mesin cuci gratis bagi para pengungsi selama satu bulan.*** ***b. Telkomsel, Indosat, Exel, menyediakan sarana komunikasi gratis bagi para pengungsi selama sebulan.*** ***c. Tidak tersedia saluran dan tempat pembuangan limbah, dikarenakan keterbatasan lokasi pengungsian.*** ***d. MCK yang digunakan/yang tersedia dari DPU merupakan MCK berjalan untuk umum.***				

4. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
Jenis Rapat/Pertemuan/Proses Pengambilan Keputusan untuk menentukan, a.l: Jenis dan Cara Pembagian Bantuan. Jenis dan Jadwal Layanan. Jenis dan Cara Pengaturan Fasilitas Bersama. Koordinator Pengungsi/Ketua Lingkungan. Keamanan Lingkungan. Penanganan Kasus Kekerasan/Kejahatan Penyebarluasan Informasi. Pilihan & Pengaturan Pemulangan Pengungsi. Urusan Keluarga, termasuk waris dan perwalian anak.	***1. Pertemuan yang tidak diselenggarakan:*** ***a. Pertemuan warga untuk membahas kondisi kampung, termasuk keamanannya.*** ***b. Sejak terjadinya gempa, pertemuan ini tidak lagi berlangsung karena warga sibuk dengan dirinya sendiri.*** ***c. Akibatnya, pengungsi secara umum merasa akses dan kontrol terhadap lingkungannya melemah.*** ***d. Bagi laki-laki pengungsi mereka merasa informasi yang diperoleh berkurang, sementara yang perempuan semakin termarjinalkan.*** ***2. Pertemuan yang tidak melibatkan semua pengungsi:*** ***a. Pertemuan untuk membahas keamanan kampung, kerja bakti dan rapat-rapat politik lainnya.*** ***b. Kelompok rentan tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan/rapat-rapat tersebut. Termasuk di dalamnya kelompok perempuan.*** ***c. Khusus untuk kelompok perempuan, alasan untuk tidak mengundang adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan sehingga mereka dianggap tidak mampu.*** ***d. Akibat tidak pernah diundang, mereka sangat dirugikan karena tidak memiliki akses dan kontrol atas isu-isu yang dibahas itu.*** ***3. Menyikapi ketiadaan pertemuan dan tidak terwakilinya perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggakan; kelompok perempuan:*** ***a. Menyelenggarakan kegiatan penyadaran hak-haknya sebagai perempuan.*** ***b. Berorganisasi.*** ***c. Bersuara/berpendapat.***

5. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN di PENGUNGSIAN	
Jenis Kegiatan/Jabatan Strategis untuk Pengelolaan: Pembagian Bantuan bagi Pengungsi Layanan bagi Pengungsi Fasilitas Bersama Lingkungan Pengungsi Keamanan Lingkungan Penanganan Kasus Kekerasan/Kejahatan Penyebarluasan Informasi Perkumpulan Warga Pemulangan Pengungsi Urusan Keluarga Berpergian ke Tempat di Luar Pengungsian Advokasi kebijakan yang berpihak pada pengungsi.	***1. Kegiatan yang tidak pernah diselenggarakan adalah :*** ***a. Pembagian logistik.*** ***b. Pendistribusian tidak lagi dilakukan sejak terjadinya gempa. Padahal, sebelumnya pernah diselenggarakan.*** ***c. Akibat yang dirasakan adalah lemahnya akses dan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan logistik.*** ***d. Hal ini mempengaruhi rasa keamanan perempuan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya.*** ***2. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan distribusi bantuan:*** ***a. Sangat terbatas, khususnya dalam kondisi darurat.*** ***b. Mereka dianggap tidak mampu dan akhirnya tidak diundang, karena dianggap memiliki keterbatasan pengetahuan, atau keadaan psikis yang lemah.*** ***c. Akibatnya, perempuan semakin terpuruk/terpinggirkan. Padahal, ada kebutuhan perempuan yang berbeda.*** ***3. Kalaupun ada perempuan yang terlibat dalam kegiatan pengungsi:*** ***a. Tidak pernah mendapatkan posisi yang strategis. Apalagi dalam birokrasi di tingkat pemerintahan dan pengelolaan dana rekontruksi.*** ***b. Kondisi ini juga dialami oleh pengungsi yang* difabel, *pendidikan rendah, atau tidak sekolah.*** ***c. Mereka dianggap tidak memiliki kemampuan memimpin atau mengelola.*** ***d. Akibatnya, perempuan dan kelompok-kelompok tersebut semakin termarjinalkan atau semakin terpuruk.***

6. A. RASA AMAN dan/atau NYAMAN PEREMPUAN di PENGUNGSIAN		
Lokasi Keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di:	**Kapan** dan **alasan** perempuan merasa tidak aman dan/atau nyaman bila sendirian di lokasi tersebut	**Prakarsa/inisiatif** apa yang sudah dikembangkan oleh warga, khususnya kelompok perempuan, untuk menyikapi kondisi tersebut?
Kamar/Tenda/Barak (saat berada di dalam maupun saat meninggalkan lokasi)	***Ada rasa was-was dan takut saat menunggu di tenda atau pergi sendirian karena kuatir terjadi gempa susulan padahal dirinya kurang mampu untuk menghadapi permasalahan itu sendirian.***	***Membuat kesepakatan untuk menjaga tenda bersama dan dibuat jadwal piket jaga agar tercipta suasana kebersamaan dalam menghadapi musibah, sehingga merasa nyaman dan aman.***
MCK (saat menggunakannya ataupun pergi ke/kembali dari MCK)	***Saat menggunakan MCK, merasa tidak nyaman karena pintunya terbuka dan tidak dapat dikunci sehingga orang lain dapat mengganggunya atau nyelonong masuk.***	***Selalu mengajak perempuan lain untuk menjaga pintu MCK secara bergantian baik di malam hari maupun siang hari, agar dapat merasa aman dan nyaman.***
Dapur/Dapur Umum (saat menggunakannya ataupun pergi ke/kembali dari dapur/dapur umum)	***Merasa kurang nyaman ketika akan mengambil makanan yang tersedia tetapi tinggal sedikit karena takut dikira rakus dan mementingkan diri sendiri.***	***Menyiapkan bahan makanan secukupnya dan diadakan jadwal untuk memasak selama berada di pengungsian.***
Fasilitas Umum seperti pos kesehatan, sarana pendidikan, tempat bermain, dll.	***(a) Saat menjalankan ibadah merasa kurang khusuk karena suasana ramai dan keterbatasan tempat. (b) Tempat bermain kurang aman bagi anak-anak karena berserakan sisa-sisa paku dan bambu.***	***(a) Mengajak teman-teman untuk menjalankan ibadah dalam suasana tenang dan saling mendukung agar terbangun suasana yang aman dan nyaman. (b) Mengajak para pengungsi membersihkan tempat bermain agar anak-anak bisa bermain dengan aman.***
Sumber Air (bersih-minum)	***Sumber air bersih sangat jauh letaknya, sehingga harus mengambil air dulu baru bisa masak.***	***Membuat jadwal untuk mengambil air secara bergiliran sehingga kebutuhan air terpenuhi dengan baik.***
Tempat Sampah Bersama (bila relevan)	***Tempat sampah sempit dan terbatas serta digunakan orang banyak, sehingga orang buang sampah sembarangan.***	***Meminta kepada DPU untuk menyediakan tempat pembuangan sampah, dan mengangkut serta membuangnya di tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga akan tercipta kebersihan yang aman dan nyaman.***
Tempat Kegiatan Warga, termasuk pasar	***Di pengungsian tidak terdapat kegiatan jual beli/pasar, karena penjual dan pembeli menjadi korban gempa.***	***Setelah bantuan berkurang, kelompok perempuan berinisiatif untuk membuka pasar darurat untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.***
Perjalanan ke luar dari Tempat Pengungsian	***Karena ada jalan yang sulit untuk dilalui sebab banyak reruntuhan yang berserakan serta suasana yang gelap, maka pengungsi masih takut untuk keluar dari tempat pengungsian sendirian.***	***Mengajak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan bekas reruntuhan agar mudah dan enak untuk dilewati di malam hari.***

Informasi khusus tentang penerimaan masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi pengungsian yang cenderung tidak memberikan rasa nyaman bagi perempuan pengungsi.

Masyarakat lokal di lokasi pengungsian cenderung memberikan rasa aman terhadap pendatang pengungsi. Masyarakat lokal mempunyai rasa toleransi dan rasa kemanusiaan tinggi. Jadi, tidak ada penolakan di sekitar lokasi pengungsian oleh masyarakat lokal. Bahkan masyarakat lokal turut membantu para pengungsi yang menjadi korban gempa.

Informasi lain yang terkait, khususnya mengenai ada tidaknya alat pewarta keamanan seperti kentongan atau sirene, dan bagaimana mekanisme mewartakan keamanan:

- ***Di tempat pengungsian, tersedia alat pewarta berupa kentongan dan sirine. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang membunyikan sirine, memukul kentongan atau menyiarkannya lewat menara siaran yeng tersedia di lokasi pengungsian/ lewat menara masjid. Informasi yang terkait dengan kepentingan pengungsi selalu dinformasikan agar tidak terjadi salah paham/tafsir diantara para pengungsi dengan pemberi warta.***
- ***Di lokasi pengungsian tersedia komunikasi gratis dari Telkomsel, Indosat, dan Exelcomindo. Ada juga yang melayani pencucian gratis bagi para pengungsi dari Samsung.***

6. B. RASA AMAN dan/atau NYAMAN PEREMPUAN di PENGUNGSIAN			
Aspek Keamanan	**Daftar Kejadian** (jenis kasus, waktu, lokasi kejadian & pihak yang terlibat)	**Mekanisme Penyelesaian** Bagaimanakah mekanisme penyelesaiannya? Apakah perempuan dilibatkan dalam proses penyelesaian?	**Dampak** Dampak kejadian & cara penyelesaiannya bagi perempuan pengungsi secara umum. Apakah perempuan merasa memperoleh jaminan keamanan dengan penyelesaian itu? Mengapa?
1. Kejadian kejahatan/kriminalitas/gangguan sosial dalam komunitas pengungsi, a.l: - pencurian/perampokan, dst. - pemerasan/pungli, dst. - perkelahian/pemukulan, dst. - orang mabok yang menjadi agresif. - prostitusi bawah umur/paksa - perjudian. - hamil luar nikah. - perselingkuhan. - lainnya_____	***Saat ada bantuan datang terjadi rebutan bantuan antar pengungsi.*** ***Ada juga kejadian penjarahan bantuan yang belum sempat diamankan atau didata.***	***Mekanisme penyelesaiannya dengan memberikan penyadaran dan pengertian terhadap para penjarah yang tertangkap, bahwa bantuan tersebut untuk kepentingan bersama dan harus dibagi rata.*** ***Diadakan pengawasan dan pendataan terhadap bantuan secara bergantian sesama tim pengawas.*** ***Perempuan dilibatkan dalam pendataan barang bantuan dan pendistribusiannya.***	***Kurang mampu dan tidak merasa aman karena tidak dapat membantu sepenuhnya serta keterbatasan perempuan.***
2. Kejadian kekerasan/kerusuhan di komunitas pengungsi secara umum, a.l.: - penyerangan oleh komunitas lain - razia dengan kekerasan oleh aparat/kelompok bersenjata lainnya - pembakaran tempat pemukiman - isu/teror bom - lainnya_____			
3. Kejadian kekerasan terhadap perempuan pengungsi di komunitas, a.l.: - pengintipan dan pelecehan seksual lainnya. - razia/pemaksaan penggunaan atribut/ pakaian tertentu. - perdagangan perempuan. - perkosaan. - penyerangan seksual lainnya. - pencegahan, gangguan dan/atau pembubaran kegiatan perempuan. - lainnya_____	***Pembubaran kegiatan kelompok perempuan yang dianggap menggganggu birokrasi yang ingin memanfaatkan bantuan.***	***Mengikuti kegiatan perempuan di tempat lain agar tetap dapat menyerap informasi-informasi yang ada dan tidak ketinggalan wawasan sehingga tidak mudah diperalat/dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.***	***Sedikit banyak terusik oleh birokrasi dan aktor-aktor yang memanfaatkan kelemahan perempuan, sehingga merasa tidak aman dalam menjalankan kegiatannya.***
4. Kejadian kekerasan terhadap perempuan pengungsi di dalam keluarga, a.l.: - KDRT. - Kawin/cerai paksa. - incest/perkosaan - lainnya_____			

Pemantauan

Kondisi HAM Perempuan di Pengungsian

Pengambilan data mulai tgl **1/Feb/2007** s/d **8/Maret/2007.**
Waktu Pemantauan Sebelumnya (bila ada), tgl **seminggu paska gempa sampai Februari 2007**
Nama Dokumentor : **Tim Teratai.**
Organisasi : **Yayasan Teratai Indonesia**
Tempat Tinggal Dokumentor : **Yogyakarta**

I. Informasi Dasar

1. Data Lokasi Pengungsian			
Nama Lokasi : ***Caben***		Kabupaten/kota	: ***Bantul***
Desa/Kelurahan	: ***Sumbermulyo***	Propinsi	: ***Daerah Istimewa Yogyakarta***
Kecamatan	: ***Bambanglipuro***	Kode Area Pengungsi	: (diisi kemudian saat *entry* data)

2. Penyebab terjadinya pengungsian: ***Gempa 27 Mei 2006***
3. Lama mengungsi : ***sejak gempa***
4. Bentuk Hunian Sementara (Huntara) : ***di tanah milik sendiri***
   - ✓ Tenda
   - ✓ Rumah darurat/dibuat dari puing^2 sisa rumah
5. Asal Pengungsi (desa, kec, kab) : ***dari satu daerah, yaitu Caben***

6. Jumlah Pengungsi

Jumlah KK ***238*** unit
Pasangan menikah : ***231*** orang
Duda/orang tua tunggal : ***30*** orang
Perempuan Kepala Keluarga : ***8*** orang
Janda karena meninggal : ***71*** orang
Janda cerai : ***0*** orang
Orang tua tunggal : ***3*** orang

Unit ukur	*Dewasa*		*Anak-anak*	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
> 65 thn	80	63		
>18 – 65 thn	276	291		
> 5 – 17 thn			82	108
≤ 5 thn			53	39
Berkebutuhan khusus (fisik)	6	0	0	0
Berkebutuhan khusus (mental)	2	0	0	0
Penyakit kronis	2	0	0	0
Stigma sosial	0	0	0	0
Hamil & melahirkan	5		0	
Menyusui	12		0	

7. Profesi/Pekerjaan Pengungsi

Jenis	*Perempuan*	*Laki-laki*
Petani:	23	14
Pedagang	31	18
Buruh	110	104
Karyawan swasta	17	4
Pegawai Negeri Sipil / PNS	17	9
Guru swasta/honorer	4	10
TNI/Polri	1	13
Mocok-mocok/serabutan	1	4
Tidak punya penghasilan	307	307

8. Identifikasi Potensi Pengungsi		
Budaya lokal yang menguatkan komunitas (misal: gotong-royong, arisan)	*Tokoh pengungsi yang dipercaya komunitas dan terbuka pada upaya penegakan HAM*	*Perempuan pengungsi yang aktif & artikulatif/bisa menyuarakan kepentingan perempuan*
Gotong royong masih menjadi wujud kebersamaan masyarakat dalam menghadapi segala persolan sebagai media untuk berinteraksi dengan sesama warga.	**-**	**-**

1. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN POKOK				
Jenis Bantuan	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Jenis Bantuan Pokok:				***1. Ketika bantuan tidak tersedia:***
Jadup				***a. Tidak berdampak ekstrim, karena pengungsi menyikapinya dengan inisiatif atau karena bantuan yang tidak diberikan memang tidak diperlukan (ada di lokasi seperti: air dari sumur) atau kurang diperlukan. Tetapi ada juga yang diperlukan namun tidak mendapat bantuan seperti kebutuhan air bersih seminggu paska bencana sehingga berdampak pada kurangnya kualitas hidup seperti pangan yang tidak sehat, kebersihan yang kurang serta terjangkit penyakit seperti diare.***
Pangan/Sembako, a.l:				***b. Pada umumnya, beban perempuan menjadi berlebih, sama halnya dengan kebanyakan para duda.***
- beras/sejenisnya	X		Pemda	
- mi instan	X		Kpi	
- minyak goreng	X		Kpi	
- gula	X		Kpi	
- garam	X		Kpi	
- susu	X		Kpi	
- lauk pauk	X		Kpi	
- bumbu dapur	X		Kpi	
- alat-alat dapur	X		Kpi	***2. Ketika bantuan tersedia:***
Air (bersih-minum)	-	X		***a. Pendistribusian bantuan tidak disertai penjelasan. Ada asumsi bahwa pengungsi sudah mengetahui kegunaan bantuan yang didistribusikan itu.***
Papan/Tempat Berlindung/Shelter, a.l:	-	X		***3. Bantuan tersedia tetapi tidak bisa/sulit diperoleh:***
- bangunan/tenda/terpal dan tali	X		Pemda & Satkorlak	***a. Terutama dirasakan oleh pengungsi saat mereka membutuhkan terpal dan tenda. Kesulitan ini muncul karena pengungsi tindak dapat menuhi persyaratan administratif. Misalnya, satkorlak dan pemerintah mensyaratkan banyak hal, antara lain surat pengantar, KTP, tanda tangan RT setempat.***
- alas tidur/tikar	-	X		
- bantal	-	X		***b. Kelompok/individu pengungsi yang sulit atau tidak memperoleh bantuan adalah para pengungsi yang tidak terorganisir, pengungsi yang miskin, informasi atau pengungsi yang tidak mempunyai alat transportasi untuk mengakses bantuan ke pihak-pihak tertentu seperti tenda ke kompleks Pemda DIY.***
- selimut	X		Kpi	
- kelambu/obat nyamuk	X		Kpi	
- Ruang Privat untuk Pasangan Suami Istri	-	X		***c. Berdampak langsung pada ketidakpemilikan pengungsi pada tempat lindungan. Mereka menyikapi dengan membuat lindungan dari puing-puing dan sisa-sisa bangunan runtuh lainnya.***
Sandang/Pakaian				***d. Secara umum, dampak tidak memiliki tempat lindungan ini lebih dirasakan oleh perempuan, khususnya ibu hamil.***
- pakaian untuk semua usia	X		Kpi	
- pakaian dalam	X		Kpi	
- pakaian lainnya yang relevan, seperti baju hangat, jilbab	X		Kpi	***4. Prakarsa/inisiatif yang dikembangkan pengungsi, khususnya kelompok perempuan, ketika bantuan tidak tersedia, terbatas ataupun tidak cocok;***
Alat Sanitasi & Kesehatan				***a. Pangan: rata-rata mengaku harus menghemat, hutang atau untuk barang yang tidak mahal meminta ke tetangga atau keluarga dekat atau mengusahakan sendiri, misalnya dengan menanam sayuran.***
- alat mandi, sikat gigi & odol, dll	X		Kpi	***b. Papan: karena distribusi tenda dan atau terpal tidak merata atau terlambat diterima, pengungsi membangun hunian dari puing-puing.***
- sabun cuci	X		Kpi	***c. Sandang dan paket khusus perempuan: memakai yang tersisa.***
- sapu, sikat & alat untuk kebersihan lainnya	-	X		***d. Sanitasi dan kesehatan: memakai yang ada/seadanya.***
Paket Khusus Perempuan				
- baju dalam (bh)	X		Kpi	***5. Keterlibatan perempuan dalam pemantauan, rencana pendistribusian serta pendistribusian hanya pada bantuan-bantuan tertentu..***
- pembalut	X		Kpi	
- perlengkapan ibu hamil, melahirkan	X		Kpi	***6. Tentang ruang privat bagi suami isteri:***
- makanan tambahan untuk ibu hamil & menyusui	X		Kpi	***a. hanya disediakan di rumah baru.***
				b. belum ada keluhan meskipun ruang privat bagi suami-istri di tenda tidak disediakan.

2. AKSES PEREMPUAN PADA LAYANAN DASAR				
Jenis Bantuan	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Layanan Kesehatan; - obat-obatan, tempat pelayanan, termasuk ruang khusus pemeriksaan untuk perempuan, klinik keliling atau klinik yang gampang dijangkau, tenaga medis, (dokter laki-laki maupun perempuan, bidan dan perawat), waktu pelayanan	X		Merlin	***1. Layanan kesehatan yang tersedia:*** ***a. Secara umum sama dengan wilayah di sekitarnya, yaitu layanan kesehatan dari pemerintah dan lembaga lain yang peduli.*** ***b. Tenaga medis mencukupi untuk kebutuhan masyarakat terutama perempuan dan anak-anak.***
Layanan Konseling; - tempat pelayanan, tenaga konselor, waktu pelayanan	X		MSF	
Layanan Kesehatan Reproduksi; - pilihan alat kontrasepsi, tempat pelayanan, tenaga ahli, program penyuluhan, baik bagi pengungsi perempuan maupun laki-laki	X		Merlin	
Layanan Pendidikan (formal & nonformal, termasuk pendidikan agama); - tempat kegiatan belajar-mengajar, alat & materi kegiatan belajar-mengajar, tenaga pendidik, waktu kegiatan	X		Sanata Dharma	***2. Prakarsa/ inisiatif untuk menyikapi layanan yang tidak tersedia atau terbatas:*** ***a. Pengungsi mengusahakan sendiri atau bertahan dengan kemampuan yang dimiliki.*** ***b. Untuk aktivitas ekonomi, beberapa pengungsi mencoba kembali menekuni pekerjaan semula jika pekerjaan mengurus tempat tinggal selesai dan tidak kelelahan, misal usaha atau pergi ke sawah.***
Layanan/Bantuan Hukum, seperti; mendampingi korban kekerasan; pengurusan hak milik, waris, perwalian anak	-	X		
Layanan Administrasi Kependudukan; - KTP, akte kelahiran, pencatatan perkawinan/perceraian, sertifikat tanah/bangunan	-	X		
Layanan Pengembangan Ekonomi Keluarga: - pendidikan ketrampilan, layanan modal, tempat usaha, jaringan pemasaran.	-	X		

2. AKSES PEREMPUAN PADA FASILITAS BERSAMA				
Jenis Fasilitas Bersama	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Barak.		X		***1. Hampir semua fasilitas tidak tersedia kecuali penerangan dan ruang informasi bersama:*** ***a. Fasilitas lainnya tidak ada dan belum pernah dibantu. Khusus untuk pasar, fasilitas ini memang terkonstrasi di desa atau kecamatan.*** ***b. Pengungsi beraktivitas dengan fasilitas seadanya.***
MCK.		X		
Dapur (umum).		X		
Sumur/Sumber Air.		X		
Penerangan.	X		PLN	
Tempat Pertemuan.		X		
Tempat Ibadah.		X		
Tempat Jemuran.		X		
Tempat Sampah & Saluran Pembuangan Air Limbah.		X		
Pasar/Tempat serupa.		X		
Fasilitas Informasi Bersama, seperti papan pengumuman, HT, *megafon*, radio komunitas, koran/selebaran komunitas.	X			
Fasilitas Transportasi Bersama, seperti jalan, jembatan atau rakit/sampan sehingga tempat pengungsian dapat dijangkau untuk penyaluran bantuan.		X		
Sarana hiburan bersama(TV), dll.		X		

4. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
Jenis Rapat/Pertemuan/Proses Pengambilan Keputusan untuk menentukan, a.l: Jenis dan Cara Pembagian Bantuan Jenis dan Jadwal Layanan Jenis dan Cara Pengaturan Fasilitas Bersama Koordinator Pengungsi/Ketua Lingkungan Keamanan Lingkungan Penanganan Kasus Kekerasan/Kejahatan Penyebarluasan Informasi Pilihan & Pengaturan Pemulangan Pengungsi Urusan Keluarga, termasuk waris dan perwalian anak	***1. Pada pertemuan yang tidak diselenggarakan:*** ***a. Khususnya mengenai penerima dana pembangunan rumah.*** ***b. Akibat tidak adanya pertemuan dengan pengungsi, persoalan-persoalan seperti kerentanan, kemiskinan, kemendesakan tidak menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas penerima bantuan dana pembangunan rumah. Akibat ini terlihat dalam terpinggirkannya pengungsi yang tidak punya akses pengambilan keputusan dan yang miskin.*** ***c. Sejumlah janda dan duda miskin tidak diprioritaskan.*** ***2. Ketika ada pertemuan dengan pengungsi, ada kelompok/individu tertentu yang tidak pernah atau sulit mengikutinya:*** ***a. Khususnya dalam pembahasan isu dana rekonstruksi dari pemerintah.*** ***b. Pertemuan itu hanya hanya untuk pemuka masyarakat atau lelaki saja karena kehadiran perempuan diwakilkan atau dianggap sudah diwakilkan. Kelompok pemuka masyarakat juga sering dianggap sudah mewakili seluruh pengungsi.*** ***c. Kelompok perempuan yang paling sering ditinggalkan atau dianggap tidak menjadi prioritas untuk diundang adalah janda-janda.*** ***3. Pertemuan yang selalu mengikutsertakan dan menanyakan pertimbangan perempuan adalah tentang layanan kesehatan untuk anak dan ibu.*** ***4. Menyikapi pertemuan yang tidak diselenggarakan ataupun tidak pernah mengundang perempuan, maka:*** ***a. Sejumlah perempuan mendatangi langsung pejabat pemerintah yang bersangkutan, meski pada akhirnya juga tidak mempengaruhi kebijakan.***

5. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN di PENGUNGSIAN	
Jenis Kegiatan/Jabatan Strategis untuk Pengelolaan: Pembagian Bantuan bagi Pengungsi Layanan bagi Pengungsi Fasilitas Bersama Lingkungan Pengungsi Keamanan Lingkungan Penanganan Kasus Kekerasan/Kejahatan Penyebarluasan Informasi Perkumpulan Warga Pemulangan Pengungsi Urusan Keluarga Berpergian ke Tempat di Luar Pengungsian Advokasi kebijakan yang berpihak pada pengungsi	***1. Pada pembagian sejumlah bantuan, tidak pernah diselenggarakan pertemuan yang melibatkan perempuan*** ***a. Perempuan tidak menjadi prioritas undangan. Pertemuan hanya untuk pemuka masyarakat atau lelaki saja, kadang perempuan diwakilkan atau dianggap diwakilkan atau dianggap sudah mewakili seluruh pengungsi.*** ***2. Kelompok/individu tertentu yang tidak pernah atau sulit mengikuti pertemuan untuk pembagian bantuan adalah janda, duda, lansia:*** ***a. Pertemuan hanya untuk pemuka masyarakat atau lelaki saja, kadang perempuan diwakilkan atau dianggap diwakilkan atau dianggap sudah mewakili seluruh pengungsi.*** ***3. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan adalah terbatas karena posisinya dalam struktur pelaksana kegiatan:*** ***a. Terutama pada kelompok masyarakat untuk rekonstruksi rumah.*** ***b. Pembatasan ini dialami oleh semua perempuan, karena kepentingan mereka kurang diperhatikan atau diprioritaskan.*** ***c. Pemilihan posisi-posisi kunci dilakukan lebih di antara laki-laki saja.***
Prakarsa/inisiatif yang dikembangkan oleh warga, khususnya kelompok perempuan, untuk menyikapi kondisi tersebut di atas adalah ***mendatangi langsung pejabat pemerintah yang bersangkutan, meski pada akhirnya juga tidak mempengaruhi kebijakan.***	

6. A. RASA AMAN dan/atau NYAMAN PEREMPUAN di PENGUNGSIAN		
Rasa aman dan/atau nyaman perempuan seringkali terkait dengan, a.l.: a. Konstruksi fasilitas yang menyebabkan perempuan tidak mudah diintip atau diserang, baik karena jenis bahan bangunan ataupun kondisinya yang berlubang atau tidak dapat dikunci. b. Kepadatan tempat pengungsian dan apakah pengungsi saling mengenal satu dengan lainnya. c. Penerangan yang cukup. d. Informasi yang akurat dan dapat dipercaya. e. Adanya fasilitas komunikasi bila dibutuhkan. f. Jalan yang gampang dilalui dan adanya kepastian alat transportasi bila dibutuhkan. g. Adanya individu atau kelompok bersenjata/penuh kekerasan yang mengganggu, mengancam atau mengintimidasi perempuan yang sendirian. h. Kebijakan/peraturan yang membatasi gerak atau ekspresi perempuan. i. Penerimaan masyarakat lokal di sekitar lokasi pengungsian terhadap pengungsi.		
Lokasi Keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di:	**Kapan** dan **alasan** perempuan merasa tidak aman dan/atau nyaman bila sendirian di lokasi tersebut	**Prakarsa/inisiatif** apa yang sudah dikembangkan oleh warga, khususnya kelompok perempuan, untuk menyikapi kondisi tersebut?
Kamar/Tenda/Barak (saat berada di dalam maupun saat meninggalkan lokasi)	***Tidak pernah. Kamar atau barak tersedia dari bantuan pihak lain maupun pemerintah.***	-
MCK (saat menggunakannya ataupun pergi ke/kembali dari MCK)	***Tidak pernah. MCK tersedia dan mencukupi rata-rata setiap keluarga memilkinya.***	-
Dapur/Dapur Umum (saat menggunakannya ataupun pergi ke/ kembali dari dapur/dapur umum)	***Tidak pernah. Aktifitas dapur umum hanya terjadi beberapa hari pasca gempa. Setelah ada bantuan dan sesudah membersihkan reruntuhan, pengungsi kembali kepada masing-masing keluarga.***	-
Fasilitas Umum seperti pos kesehatan, sarana pendidikan, tempat bermain, dll.	***Tidak pernah. Fasiltas tersedia dan rutin ada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.***	-
Sumber Air (bersih-minum)	***Tidak pernah. Sumber air adalah air sumur dan rata-rata setiap keluarga memilki sumber air sendiri.***	-
Tempat Sampah Bersama (bila relevan)	***Tidak pernah. Lokasi tempat sampah ada di masing-masing keluarga.***	-
Tempat Kegiatan Warga, termasuk pasar	***Tidak pernah karena kegiatan warga selalu dilakukan di tempat yang terdekat yaitu dalam lingkungan satu desa.***	-
Perjalanan ke luar dari Tempat Pengungsian	***Tidak pernah. Akses jalan sangat mudah untuk menuju ke jalur kota kabupaten.***	-

6. B. RASA AMAN dan/atau NYAMAN PEREMPUAN di PENGUNGSIAN			
Aspek Keamanan	**Daftar Kejadian** (jenis kasus, waktu, lokasi kejadian & pihak yang terlibat)	**Mekanisme Penyelesaian** Bagaimanakah mekanisme penyelesaiannya? Apakah perempuan dilibatkan dalam proses penyelesaian?	**Dampak** Dampak kejadian & cara penyelesaiannya bagi perempuan pengungsi secara umum. Apakah perempuan merasa memperoleh jaminan keamanan dengan penyelesaian itu? Mengapa?
1. Kejadian kejahatan/kriminalitas/gangguan sosial dalam komunitas pengungsi, a.l: - pencurian/perampokan, dst. - pemerasan/pungli, dst. - perkelahian/pemukulan, dst. - orang mabok yang menjadi agresif. - prostitusi bawah umur/paksa - perjudian. - hamil luar nikah. - perselingkuhan. - lainnya_____	***Tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas lainnya karena struktur sosial dalam tingkat dusun masih berfungsi sehingga penjagaan terhadap kemanan lingkungan tetap terjaga.***	**-**	**-**
2. Kejadian kekerasan/kerusuhan di komunitas pengungsi secara umum, a.l.: - penyerangan oleh komunitas lain - razia dengan kekerasan oleh aparat/kelompok bersenjata lainnya - pembakaran tempat pemukiman - isu/teror bom - lainnya_____	***Sama dengan atas.***	**-**	**-**
3. Kejadian kekerasan terhadap perempuan pengungsi di komunitas, a.l.: - pengintipan dan pelecehan seksual lainnya - razia/pemaksaan penggunaan atribut/pakaian tertentu - perdagangan perempuan - perkosaan - penyerangan seksual lainnya - pencegahan, gangguan dan/atau pembubaran kegiatan perempuan - lainnya_____	***Tidak terjadi. Perempuan mersa nyaman dalam melakukan aktivitas di rumah maupun saat pertemuan dan keluar dari lingkungan pengungsian.***	**-**	**-**
4. Kejadian kekerasan terhadap perempuan pengungsi di dalam keluarga, a.l.: - KDRT - Kawin/cerai paksa - incest/perkosaan - lainnya_____	***Terjadi beberapa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hanya saja, tidak ada atau belum ada penanganan karena masih mengganggap persoalan tersebut adalah persoalan pribadi yang tak boleh dibawa keluar rumah tangga.***	**-**	**-**

Pemantauan

Kondisi HAM Perempuan di Pengungsian

Pengambilan data mulai tgl **1/Februari/2007** s/d **8/Maret/2007.**
Waktu Pemantauan Sebelumnya (bila ada), tgl **seminggu paska gempa sampai Februari 2007.**
Nama Dokumentor (jenis kelamin): **Tim Teratai; Putri (P), Deta (P), Ajeng (P), Imam (L), Bowo (L)**
Organisasi : **Yayasan Teratai Indonesia.**
Tempat Tinggal Dokumentor : **Yogyakarta.**

I. Informasi Dasar

1. Data Lokasi Pengungsian			
Nama Lokasi : ***Ngereco***		Kabupaten/kota	: ***Bantul***
Desa/Kelurahan	: ***Seloharjo***	Propinsi	: ***Daerah Istimewa Yogyakarta***
Kecamatan	: ***Pundong***	Kode Area Pengungsi	: (diisi kemudian saat *entry* data)

2. Penyebab terjadinya pengungsian: ***Gempa 27 Mei 2006***
3. Lama mengungsi : ***sejak gempa***
4. Bentuk Hunian Sementara (Huntara) : ***di tanah milik sendiri***
   - ✓ Tenda
   - ✓ Rumah darurat/dibuat dari puing^2 sisa rumah
5. Asal Pengungsi (desa, kec, kab) : ***dari satu daerah, yaitu Ngereco***

6. Jumlah Pengungsi

Jumlah KK ***86*** unit
Pasangan menikah : ***81*** orang
Duda/orang tua tunggal : ***12*** orang
Perempuan Kepala Keluarga : ***1*** orang
Janda meninggal : ***35*** orang
Janda cerai : ***0*** orang
Perempuan orang tua tunggal : ***3*** orang

Unit ukur	*Dewasa*		*Anak-anak*	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
> 65 thn	22	27		
>18 – 65 thn	153	135		
> 5 – 17 thn			51	56
≤ 5 thn			28	23
Berkebutuhan khusus (fisik)	1	0	0	0
Berkebutuhan khusus (mental)	1	0	0	0
Penyakit kronis	5	0	0	0
Hamil & melahirkan	9		0	
Menyusui	6		0	

7. Profesi/Pekerjaan Pengungsi

Jenis	*Perempuan*	*Laki-laki*
Petani	80	85
Pedagang	13	18
Tukang	1	3
Industri/kerajinan/jualan di rumah	6	0
Buruh	22	17
Karyawan swasta	2	6
Pegawai Negeri Sipil / PNS	2	10
Sopir/Ojek, Kernet, Becak	0	2
TNI/Polri	0	3
Mocok-mocok/serabutan	0	1
Tidak punya penghasilan	119	84
Lainnya, pejabat pemerintah	0	1

8. Identifikasi Potensi Pengungsi		
Budaya lokal yang menguatkan komunitas (misal: gotong-royong, arisan)	*Tokoh pengungsi yang dipercaya komunitas dan terbuka pada upaya penegakan HAM*	*Perempuan pengungsi yang aktif & artikulatif/bisa menyuarakan kepentingan perempuan*
Budaya gotong royong masih berlaku bahkan lebih intensif, antara lain ditunjukkan dengan membangun fasilitas umum secara bergotong royong. Arisan juga tetap berjalan sebagai media berkomunikasi dan berkumpul. Begitu juga simpan pinjam. Ada perkumpulan gamelan yang juga menjadi ajang hiburan dan latihan seni bagi masyarakat. Saat gempa perangkat gamelan ini rusak tetapi pertengahan bulan maret 2007 sudah bisa dipakai lagi.	***Bapak Kadus dan istrinya yang masih sangat muda dan berpendidikan di atas rata-rata masyarakat. Mereka sangat terbuka terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.***	***Ketua PKK yang kebetulan dipilih oleh masyarakat dan bukan secara struktural. Istri Bapak Kadus tidak menjabat posisi ini karena kesibukannya terkait dengan pekerjaanya sebagai karyawan swasta.***

1. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN POKOK				
Jenis Bantuan	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Jenis Bantuan Pokok:				***1. Sejumlah bantuan hampir pernah tersedia:***
Jadup	X		Pemerintah	***a. Jadup tersedia hanya pada bulan pertama setelah gempa. Bantuan lain diberikan pada masa tanggap darurat, yaitu bulan pertama.***
Pangan/Sembako, a.l:				***b. Akibat bantuan tidak tersedia, kondisi kesehatan pengungsi menurun atau karena menderita diare, gangguan pernafasan, pusing, demam/meriang.***
- beras/sejenisnya	X		KPI,	***c. Untuk mengatasi keterbatasan itu, pengungsi bekerja memenuhi kebutuhan mereka.***
- mie instant	X		kerabat	
- minyak goreng	X		jauh	
- gula	X			
- garam	X			***2. Semua bantuan yang ada, diterima pengungsi dalam keadaan baik dan cocok dengan kebutuhan mereka. Ketika bantuan didistribusikan, tidak ada informasi yang menyertainya dengan asumsi bahwa pengungsi sudah tahu fungsi dari bantuan itu.***
- susu	X			
- lauk pauk	X			
- bumbu dapur	X			
- alat-alat dapur	X			***3. Bantuan yang tersedia tetapi sulit diperoleh adalah bantuan tenda atau terpal:***
Air (bersih-minum)				***a. Pengungsi harus mendapat ijin dari perangkat dusun untuk dapat mengakses bantuan ini. Kesulitan bertambah karena proses memperoleh surat identitas diri dan menunggu bantuan memakan waktu dan biaya transportasi.***
Papan/Tempat Berlindung/ Shelter, a.l:				***b. Kesulitan memperoleh bantuan ini juga karena faktor keterbatasan bantuan. Beberapa tenda dan atau terpal diusahakan oleh kadus, namun karena alasan keterbatasan bantuan, tidak semuanya mendapat.***
- bangunan/tenda/ terpal dan tali	X		Satkorlak	***c. Menyikapi keterbatasan tersebut, sejumlah pengungsi memilih untuk mendiami hunian sementara yang dibuat dari puing-puing reruntuhan rumah.***
- alas tidur/tikar	X		KPI	***d. Tidak teridentifikasi adanya perbedaan dampak bagi laki-laki dan perempuan akibat kondisi tersebut.***
- bantal	X			
- selimut	X			
- kelambu/obat nyamuk	X			
- Ruang Privat untuk Pasangan Suami Istri	X			
Sandang/Pakaian				***4. Prakarsa/inisiatif yang diambil pengungsi untuk menyikapi keterbatasan bantuan:***
- pakaian untuk semua usia	X		Warga	***a. Pangan: rata-rata pengungsi mengaku harus menghemat, hutang atau untuk barang yang tidak mahal meminta ke tetangga atau keluarga dekat atau mengusahakan sendiri (membeli, menanam dsb).***
- pakaian dalam	X		Semarang,	***b. Papan: karena tenda dan atau terpal tidak merata atau terlambat diterima, pengungsi membangun hunian dari puing-puing.***
- pakaian lainnya yang relevan, seperti baju hangat, jilbab	X		KPI	***c. Sandang dan paket khusus perempuan: memakai yang tersisa dari bantuan sebelumnya.***
Alat Sanitasi & Kesehatan				***d. Sanitasi dan kesehatan: memakai yang ada/seadanya.***
- alat mandi, sikat gigi & odol, dll.	X		KPI	
- sabun cuci	X			
- sapu, sikat & alat untuk kebersihan lainnya	X			***5. Perempuan pengungsi terlibat dalam proses dan memantau pendistribusian paket khusus perempuan dan pangan.***

1. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN POKOK (Lanjutan)				
Jenis Bantuan	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Paket Khusus Perempuan - baju dalam (bh) - pembalut - perlengkapan ibu hamil, melahirkan - makanan tambahan untuk ibu hamil & menyusui	 X X X X		KPI	***6. Ruang privat untuk suami dan istri:*** ***a. Disediakan secara mandiri oleh pengungsi di dalam hunian yang terbuat dari puing-puing rumah ada. Di dalam tenda, sekat dibuat dari puing-puing juga.*** ***b. Sejauh ini pasangan suami istri nyaman, namun lebih nyaman jika di rumah sendiri.***
Informasi lain yang terkait: ***Tidak tersedianya ruang privat untuk suami-istri dikarenakan pengungsi mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Pemerintah juga tidak sempat berpikir ke arah kebutuhan suami-istri sebab lebih memikirkan kebutuhan umum para pengungsi.***				

2. AKSES PEREMPUAN PADA LAYANAN DASAR				
Jenis Layanan Dasar	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Layanan Kesehatan - obat-obatan - tempat pelayanan, termasuk ruang khusus pemeriksaan untuk perempuan, klinik keliling atau klinik yang gampang dijangkau pengungsi perempuan - tenaga medis, seperti dokter laki-laki maupun perempuan, bidan dan perawat - waktu pelayanan	 X X X X		Dinas kesehatan/ Puskesmas, CARDI	***1. Tidak semua layanan dasar tersedia bagi pengungsi*** ***a. Layanan yang tidak tersedia, antara lain bantuan hukum dan pengembangan ekonomi.*** ***b. MSF hanya memberikan layanan bulan pertama setelah gempa. Sementara itu, setelah Desember 2006 tidak ada lagi layanan dari CARDI.*** ***c. Dampak dari ketidaktersedian layanan dasar paling tampak pada menurunya derajat kesehatan pengungsi.*** ***d. Dalam programnya, CARDI membina perempuan di sejumlah dusun sebagai kader kesehatan. Ketika pelatihan tidak lagi dilanjutkan, kegiatan perempuan pengungsi menjadi berkurang.***
Layanan Konseling - tempat pelayanan - tenaga konselor - waktu pelayanan	 X X X		MSF	
Layanan Kesehatan Reproduksi - pilihan alat kontrasepsi - tempat pelayanan - tenaga ahli - program penyuluhan, baik bagi pengungsi perempuan maupun laki-laki	 X X X X		Puskesmas	
Layanan Pendidikan (formal & nonformal, termasuk pendidikan agama) - tempat kegiatan belajar-mengajar - alat & materi kegiatan belajar-mengajar. - tenaga pendidik - waktu kegiatan	 X		UNICEF	
Layanan/Bantuan Hukum, seperti mendampingi korban kekerasan; pengurusan hak milik, waris, perwalian anak		X		***2. Pengungsi mengusahakan sendiri atau bertahan dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk aktivitas ekonomi, beberapa pengungsi mencoba kembali menekuni pekerjaan semula seperti berdagang & bertani, namun dalam pengertian minimal, yaitu jika pekerjaan mengurus tempat tinggal selesai dan tidak kelelahan. "Sing penting nggih ngurus omah to Mas, Mbak," ujar pengungsi.***
Layanan Administrasi Kependudukan - KTP - akte kelahiran - pencatatan perkawinan/ perceraian - sertifikat tanah/bangunan	 X X X X		Perangkat desa atau Kadus	
Layanan Pengembangan Ekonomi Keluarga: - pendidikan ketrampilan - layanan modal - tempat usaha - jaringan pemasaran		X		

3. AKSES PEREMPUAN PADA FASILITAS BERSAMA				
Jenis Fasilitas Bersama	**Ada**	**Tdk Ada**	**Lembaga Penyedia**	**Keterangan**
Barak		X		***1. Sebagian besar fasilitas dasar untuk pengungsi tidak tersedia. Belum ada organisasi pendamping pengungsi yang memberikan bantuan untuk mendirikan fasilitas tersebut. Pengungsi pun beraktivitas dengan fasilitas seadanya.***
MCK		X		
Dapur (umum)		X		
Sumur/Sumber Air		X		
Penerangan	X		PLN	
Tempat Pertemuan	X		Warga Magelang	***2. Pasar tidak tersedia di dalam dusun melainkan terkonsentrasi di desa atau kecamatan. Karena jaraknya jauh, perempuan pengungsi harus mengeluarkan biaya lebih ke pasar atau jalan kaki bagi yang tidak memiliki sarana transportasi atau tidak punya uang untuk biaya transportasi.***
Tempat Ibadah	X		Warga Magelang	
Tempat Jemuran		X		
Tempat Sampah		X		
Saluran Pembuangan Air Limbah		X		
Tempat Fasilitas Olahraga		X		
Pasar/Tempat serupa		X		
Fasilitas Informasi Bersama; seperti papan pengumuman, HT, *megafon*, radio komunitas, koran/selebaran komunitas		X	Swadaya	***3. Segera setelah gempa, tempat kediaman Kadus menjadi barak sementara karena memiliki tenda besar untuk hajatan. Sampai saat ini, kediaman Kadus tetap menjadi tempat berkumpul, tempat ibadah, pusat informasi dsb.***
Fasilitas Transportasi Bersama; seperti jalan, jembatan atau pun rakit/sampan sehingga tempat pengungsian dapat dijangkau untuk penyaluran bantuan		X	Swadaya	
Sarana hiburan bersama (TV), dll		X		

4. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
Jenis Rapat/Pertemuan/Proses Pengambilan Keputusan untuk menentukan, a.l:	***1. Pertemuan dilakukan untuk sebagian banyak persoalan dalam pengungsian:***
Jenis dan Cara Pembagian Bantuan	***a. Pertemuan khusus tidak ada karena biasanya, satu pertemuan digunakan untuk membahas banyak hal. Pembahasan tersebut dirasa sudah mencukupi.***
Jenis dan Jadwal Layanan	***b. Akibatnya, hal-hal tertentu terkadang kurang dibahas secara mendalam karena keterbatasan waktu. Keputusan seringkali kemudian diserahkan pada tokoh dusun.***
Jenis dan Cara Pengaturan Fasilitas Bersama	
Koordinator Pengungsi/Ketua Lingkungan	
Keamanan Lingkungan	***2. Bila tidak hadir dalam pertemuan, bukan dikarenakan sulit mengakses akan tetapi lebih karena pengungsi tersebut memilih melakukan pekerjaan lainnya dan mempercayakan kepada orang lain untuk menyampaikan aspirasinya. Khusus kelompok lansia, ketidakhadiran mereka sering karena terlambat mendapatkan informasi.***
Penanganan Kasus Kekerasan/Kejahatan	
Penyebarluasan Informasi	
Pilihan & Pengaturan Pemulangan Pengungsi	***3. Dusun ini memiliki mekanisme pertemuan rutin untuk membicarakan segala persolan yang dihadapi oleh warga terkait dengan kondisi pasca gempa.***
Urusan Keluarga, termasuk waris dan perwalian anak	

5. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN DI PENGUNGSIAN	
Jenis Kegiatan/Jabatan Strategis untuk Pengelolaan:	***1. Program pemulangan pengungsi dan advokasi kebijakan yang berpihak pada pengungsi secara formal tidak ditemukan. Padahal program ini sudah dijanjikan sejak awal bencana:***
Pembagian Bantuan bagi Pengungsi	***a. Pengungsi kecewa dengan kebijakan pemerintah tentang dana perumahan. Sejumlah pengungsi telah berhutang untuk membeli material bangunan. Karena janji pemerintah tidak kunjung dipenuhi, pengungsi harus gali lubang tutup lubang, seperti memakai dana DIPA untuk menutup hutang.***
Layanan bagi Pengungsi	***b. Tidak ada perhatian khusus untuk perempuan, terlebih janda ataupun lansia pada proses pemulangan pengungsi.***
Fasilitas Bersama	

5. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN DI PENGUNGSIAN (Lanjutan)	
Lingkungan Pengungsi *Keamanan Lingkungan* *Penanganan Kasus Kekerasan/Kejahatan* *Penyebarluasan Informasi* *Perkumpulan Warga* *Pemulangan Pengungsi* *Urusan Keluarga* *Berpergian ke Tempat di Luar Pengungsian* *Advokasi kebijakan yang berpihak pada pengungsi*	***2. Pengungsi tidak hadir dalam pertemuan bukan dikarenakan sulit untuk mengakses informasi tetapi lebih karena keengganan mereka untuk meninggalkan rumah pada malam hari, apalagi bagi mereka yang lansia.*** ***3. Selain pertemuan seminggu sekali, setiap bulannya dilangsungkan pertemuan rutin perempuan untuk saling berbagi dan membahas hal-hal yang terkait dengan persolan masyarakat pengungsi. Dalam hal pengambilan keputusan di tingkat dusun, ada mekanisme musyawarah yang melibatkan juga perempuan seperti Ketua PKK yang kebetulan bukan istri dari Kadus- berbeda dari kebiasaan ketua PKK dijabat oleh istri dari pejabat pemerintah sesuai dengan hirarki jabatan suaminya itu*** ***a. Hanya saja, perempuan pengungsi tidak dilibatkan dalam distribusi bantuan DIPA bagi pengungsi.*** ***b. Sejumlah perempuan pengungsi menganggap ketidakterlibatan mereka wajar karena "sudah ada laki-laki kok," atau "Biasane diwakilke kok Pak".*** ***c. Perempuan lanjut usia juga sering terlambat mengakses informasi dibanding laki-laki.***
Prakarsa/inisiatif yang dikembangkan oleh warga, khususnya kelompok perempuan; ***Di wilayah ini ada kumpulan arisan perempuan sepasaran (lima hari sekali). Perempuan yang tidak hadir biasanya diwakilkan famili terdekat baik perempuan maupun laki-laki. Arisan diselenggarakan di ruang pertemuan sementara di kediaman Kadus. Kadus selalu menemani pertemuan ini. Pada kesempatan inilah biasanya perempuan bersuara.***	

6. A. RASA AMAN dan/atau NYAMAN PEREMPUAN di PENGUNGSIAN		
Lokasi Keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di:	**Kapan** dan **alasan** perempuan merasa tidak aman dan/atau nyaman bila sendirian di lokasi tersebut.	**Prakarsa/inisiatif** apa yang sudah dikembangkan oleh warga, khususnya kelompok perempuan, untuk menyikapi kondisi tersebut?
Kamar/Tenda/Barak (saat berada di dalam maupun saat meninggalkan lokasi)	***Merasa tidak aman dan nyaman ketika angin bertiup kencang menerpa hunian mereka.***	***Menguatkan hunian, memangkas sebagian batang pohon, atau menebang pohon yang dikhawatirkan roboh bila tertiup angin kencang.***
MCK (saat menggunakannya ataupun pergi ke/kembali dari MCK)	***MCK masing-masing keluarga sudah tersedia sehingga relatif kondisinya lebih nyaman untuk perempuan.***	*-*
Dapur/Dapur Umum (saat menggunakannya ataupun pergi ke/ kembali dari dapur/dapur umum)	***Dapur umum tidak nyaman digunakan karena:*** ***- berada di tempat terbuka. Angin kencang mudah mengganggu perapian mereka sehingga menjadi sulit memasak.*** ***- pengungsi merasa malu memasak di luar hunian.***	***Pengungsi memilih untuk memasak di dapur di hunian masing-masing atau di kebun.***
Fasilitas Umum seperti pos kesehatan, sarana pendidikan, tempat bermain, dll.	*-*	*-*
Sumber Air (bersih-minum)	***Beberapa hari setelah gempa, sumber air bersih tidak dapat digunakan karena air keruh dan beberapa sumur turun debit airnya. Setelah itu, sumber air kembali normal dan mencukupi kebutuhan pengungsi.***	***Untuk mengatasi persoalan penurunan debit air, beberapa pemilik sumur menggali sumur mereka lebih dalam.***
Tempat Sampah Bersama (bila relevan)	*-*	***Di masing-masing rumah tangga.***
Tempat Kegiatan Warga, termasuk pasar	***Pasar diakses dengan jalan kaki atau alat transportasi umum. Sebagian besar pengungsi memilih ke warung terdekat atau memanfaatkan hasil tanam mereka sendiri utuk memenuhi kebutuhan makan.***	*-*
Perjalanan ke luar dari Tempat Pengungsian	***Aman karena rata-rata jalan masih utuh .***	*-*

Informasi

Latar Belakang, Implikasi dan Opsi Pengungsian

Pengambilan data mulai tgl **28 Mei** s/d **5 Juni 2007.**
Pengambil Data : ***Bonnie Kertaredja***
Organisasi/individu : ***Solidaritas Perempuan Kinasih***

I. Informasi Dasar

1. Data Lokasi Pengungsian			
Nama Lokasi : ***Lapangan Jejeran***		Kabupaten/kota	: ***Bantul***
Desa/Kelurahan	: ***Wonokromo***	Propinsi	: ***Daerah Istimewa Yogyakarta***
Kecamatan	: ***Pleret***	Kode Area Pengungsi	: (diisi kemudian saat *entry* data)

2. Penyebab terjadinya pengungsian: ***gempa***
3. Lama mengungsi : ***15 hari, atau sejak tanggal 27 Mei 2006***

II. Motivasi/Alasan Pengungsian

Pada tanggal 27 Mei 2006, jam 05:55 WIB, terjadi guncangan gempa yang dasyat. Dalam waktu sekejab, rumah-rumah telah roboh rata dengan tanah. Hal yang bisa dilakukan hanya lari menyelamatkan diri, dan menyelamatkan anggota keluarga yang sakit. Pertolongan pertama dilakukan warga dengan meminjam mobil-mobil yang dimiliki warga setempat untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Warga menyelamatkan diri di jalan pinggir desa karena di dalam desa telah penuh dengan puing-puing reruntuhan. Belum selesai kepanikan warga, tiba-tiba muncul isu tsunami. Mereka lari sejauh mungkin dan meninggalkan anggota keluarga mereka yang meninggal begitu saja. Setelah sore hari barulah mereka kembali ke desa dan mengungsi secara berkelompok di sawah pinggir desa dengan fasilitas seadanya karena belum adanya bantuan. Keesokan harinya barulah bantuan berdatangan.

Penduduk mengungsi karena tempat tinggal mereka hancur atau menjadi tidak layak sebagai tempat berlindung akibat gempa bumi. Warga tidak dijinkan kembali ke rumahnya yang hancur maupun retak-retak karena gempa bumi susulan yang besar dikhawatirkan akan terjadi. Apalagi, masih terasa sedikit-sedikit gempa mengguncang susul-menyusul. Keadaan desa pun masih dalam keadaan porak-poranda akibat banyak rumah yang roboh dan hancur.

III.Proses Evakuasi/Perjalanan Pengungsian

Pengungsi berasal dari beberapa pedukuhan, namun kebanyakan dari pedukuhan Sareyan yang rata-rata rumahnya hancur lebur. Lama perjalanan dalam menempuh tempat pengungsian selama 20 menit dengan berjalan kaki. Jaraknya memang tidak jauh dari lokasi kejadian, namun perjalanan yang ditempuh sangat sulit, karena banyak puing-puing berserakan yang menghalangi jalan. Apalagi bagi lansia, anak-anak, *difabel* dan perempuan hamil untuk menuju lokasi pengungsian.

Keputusan mengungsi diambil secara spontanitas oleh warga yang menjadi korban karena lokasi itulah yang dianggap paling aman saat itu. Perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, karena perempuan dianggap lemah dalam kondisi seperti itu. Sebelumnya, tidak ada informasi tentang lokasi yang dijadikan

tempat pengungsian. Baru kemudian ada informasi tempat pengungsian yang lebih aman yaitu di lapangan Jejeran Desa Wonokromo, Pleret. Keputusan untuk pindah ke tempat pengungsian itu diambil bersama-sama setelah mendapat informasi dari kepala dusun/desa.

Bantuan evakuasi ke tempat pengungsian berasal dari masayarakat lokal. Bentuk bantuannya berupa alat transportasi mobil *pick up* untuk mengangkut para korban gempa. Angkutan itu diprioritaskan bagi perempuan lansia, hamil, menyusui dan *difabel*. Selama dalam perjalanan menuju tempat pengungsian, tidak ditemukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

IV.Dampak Pengungsian pada Komunitas Lokal

Lapangan yang menjadi lokasi pengungsian adalah tanah milik umum. Tidak ada informasi awal kalau tempat tersebut akan dijadikan pengungsian. Masyarakat lokal juga tidak mengadakan persiapan khusus untuk menyambut pengungsi. Bahkan sebaliknya, mereka sama-sama berada dalam tanggap darurat, masyarakat lokal yang rumahnya roboh akibat gempa pun turut mengungsi di sana.

Di tempat pengungsian ini, baik pengungsi dari luar maupun masyarakat lokal bisa saling tukar pengalaman dan wawasan dari terjadinya gempa hingga kesehatan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selama dalam pengungsian, tidak terjadi ketegangan antara masyarakat lokal dan para pendatang yang mengungsi. Malah, mereka saling gotong-royong, saling dukung satu dengan lainnya. Bagi perempuan, perempuan lokal dan pengungsi juga saling mengenal dengan akrab.

V. Upaya Bertahan Perempuan Pengungsi

Dalam mengatasi keterbatasan bantuan dan fasilitas bagi pengungsi, mereka mendahulukan balita, anak-anak, ibu hamil, menyusui dan lansia serta *difabel*.

VI.Opsi/Pilihan Perempuan Pengungsi

Opsi	Pulang ke tempat asal	Bertahan di tempat pengungsian
Faktor-faktor pendukung pengungsi perempuan memilih opsi tersebut	• **Karena banyak harta benda yang berserakan dan rawan pencurian.** • **Dapat mendirikan tenda/membuat barak dari puing-puing rumah.**	• **Karena tidak ada tempat untuk berteduh akibat rumahnya rata dengan tanah.**
Faktor-faktor penghalang bagi perempuan pengungsi untuk memilih opsi tersebut, termasuk adanya anggota keluarga atau masyarakat lainnya yang menghalang-halangi perempuan pengungsi memilih secara terbuka dan sukarela.	• **Tidak ada bantuan di tempat asal. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa dihalangi untuk membuat tenda di rumahnya masing-masing.**	-
Kebutuhan perempuan pengungsi agar bebas memilih dan kuat menjalani pilihannya, seperti informasi kondisi daerah yang dituju dan akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas.	• **Karena untuk menjaga harta bendanya dari penjarahan dan pencurian, maka para perempuan memutuskan kembali ke rumahnya dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.** • **Juga sambil mencari informasi keadaan, apakah sudah benar-benar aman atau was-was.**	-

Lembar Isian Kasus

Kekerasan & Diskriminasi terhadap Perempuan di Pengungsian

1. Korban	Nama : *D001* Nama orang tua : Ayah : ***konfidensial*** Ibu : ***konfidensial*** Tempat tanggal lahir (atau umur) : ***Yogyakarta, 31 Agustus 1972*** Alamat tinggal : ***Pengungsian Posko Selatan, Bantul*** Pekerjaan/jabatan : ***Wiraswasta,*** Etnis/suku : ***Jawa,*** Agama : ***Islam*** Status perkawinan : ***Kawin*** Jumlah anak dalam tanggungan : ***3 anak, Usia 16 th, 14 th, dan 5 th.***
2. Pelaku	Jumlah pelaku : ***2 orang.*** Nama : ***WD (salah satunya)*** Umur/tempat tanggal lahir : ***38 tahun,*** Jenis Kelamin : ***Perempuan*** Alamat tinggal (lengkap) : ***Bantul, Yogyakarta*** Pekerjaan/jabatan : ***Guru,*** Etnis/suku : ***Jawa,*** Agama : ***Islam*** Status perkawinan : ***Kawin*** Hubungan pelaku dengan korban : ***Istri Kepala Dukuh dan Warga*** Hubungan pelaku dengan negara/kekuasaan : ***Istri Kepala dukuh***
3. Kejadian/ Peristiwa	Kejadiannya berawal saat ada organisasi perempuan terbentuk di pedukuhan tersebut. Sejak awal, bantuan dari berbagai kalangan harus melalui pedukuhan dan kepala dukuh menguasai distribusi bantuan. Kalaupun ada warga yang aktif dan *vocal* di dalam organisasi yang dibentuk oleh warga, maka ia selalu mendapat teror yang menyuruhnya dan orang-orang lain yang terlibat dalam organisasi itu bubar. Bila terus menentang, mereka akan dikucilkan dan tidak diberi bantuan. Karena teror itu, hanya kepala pedukuhan yang mengelola dana-dana bantuan itu. Kejadian serupa dialami oleh korban. Meskipun tidak mendapat tindak kekerasan fisik, ia merasa haknya untuk berorganisasi dan mengakses segala informasi serta bantuan terbatasi. Karena pengucilan dan juga pembatasan akses terhadap bantuan, korban merasa diskriminasikan oleh kepala dusun tersebut. Selain korban, di pedukuhan ini juga banyak perempuan yang tidak dilibatkan/didiskriminasikan. Menurut korban, ia menjadi sasaran diskriminasi karena dianggap orang-orang yang kritis dan berbahaya membongkar kinerja-kinerja kepala dukuh yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada setiap bantuan, kepala dukuh mengatur/menghitam-putihkan data, tetapi ia takut dianggap mengkorupsi bantuan.

4. Dampak/Akibat Peristiwa pada Korban	
Fisik	–
Psikologis	Merasa tertekan dalam dan takut, karena teror-teror yang dilakukan oleh kepala dukuh tersebut.
Seksual	–
Ekonomi	Sulit mendapat mendapat bantuan yang ada khususnya bantuan yang melalui birokrasi setempat.
Sosial (termasuk pendidikan, dan penerimaan masyarakat pada korban)	Warga mulai takut untuk diajak berkomunikasi oleh korban karena takut mereka juga akan menjadi korban diskriminasi.

5. Tanggapan/tindakan	Peristiwa ini dilaporkan kepada lembaga yang menyalurkan dana bantuan dan kepada Camat Pleret. Peristiwa ini dilaporkan oleh korban sendiri. Pelaporan kepada Camat dilakukan bersama lembaga yang memberi bantuan ketika Camat Pleret datang untuk meresmikan balai pertemuan warga di pedukuhan tersebut. Tanggapan yang diberikan oleh Pak Camat adalah memanggil kepala dukuh untuk dimintai keterangan. Hanya saja Camat tidak dapat berbuat banyak karena kepala dukuh tersebut mempunyai dukungan orang-orang pejabat dan preman kampung.

6. Saksi	Nama	: ***konfidensial***
	Umur/tempat tanggal lahir	: ***25 tahun*** Jenis Kelamin : ***Perempuan***
	Alamat tinggal (lengkap)	: ***Pleret, Bantul, Yogyakarta***
	Pekerjaan/jabatan	: ***Buruh pabrik*** Etnis/suku : ***Jawa*** Agama : ***Islam***
	Status perkawinan	: ***Kawin***
	Jumlah tanggungan	: ***1 orang anak***
	Hubungan saksi dengan korban	: ***tetangga***
7. Dokumen lain yang disertakan dalam laporan	☐ Hasil visum ☐ BAP ke kepolisian ☐ Foto korban ☐ Peta lokasi kejadian ☐ Surat keterangan dokter	☐ Keterangan barang bukti ☐ Hasil wawancara ☐ Foto pelaku ☐ Lainnya,.....
8. Pengambil data	Nama	: ***Bonnie Kertaredja***
	Nama organisasi	: ***Solidaritas perempuan Kinasih***

Sebuah Catatan Khusus dari Timor Barat

Analisa Umum Kondisi Pengungsi Terhadap Pilihan

A. Kondisi Terkini

- Masih terdapat 7.094 KK pengungsi di Timor Barat, separuhnya diperkirakan punya pendapatan tetap (PNS, TNI/POLRI, Pensiunan) sisanya keluarga tanpa pendapatan tetap (petani, tukang, dll).
- Opsi yang tersedia reintegrasi (kembali ke Timor Leste) atau Integrasi lokal di Indonesia (pemukiman di TB, dalam NTT dan transmigrasi keluar NTT).
- Masih banyak pengungsi yang terbuka terhadap opsi reintegrasi tetapi ada hambatan (masih menerima gaji, kurangnya kesempatan kerja di Timor Leste, ketakutan balas dendam, pertimbangan ekonomi, pendidikan anak dll).
- Hambatan tersebut menyebabkan ambivalensi sikap, seperti *pulang – tidak pulang* atau *nanti akan pulang*. Dampak: lebih memilih pemukiman dalam TB dan cenderung hidup berkelompok demi rasa aman dan solidaritas.

B. Pertimbangan Logis

- Pengalaman Timor Barat: pengungsi sebenarnya ingin keluar dari kamp tetapi belum menemukan pilihan yang lebih baik dari kamp.
- Selain itu, kemampuan pemerintah dalam penyediaan pemukiman relatif terbatas dibanding besarnya jumlah sisa pengungsi.
- Masalah: lahan untuk relokasi di Timor Barat. Lahan yang tersedia hanyalah lahan kelas 2 yang tidak cocok untuk pertanian.
- Masih ada 'image' tentang pemukiman yang tidak begitu positif di mata pengungsi.
- Biasanya program pemukiman dibangun dengan target pengungsi di satu kamp tertentu. Resikonya: mereka tidak tahu keadaan sebelum memilih atau dipaksa memilih untuk pindah ke lokasi baru. Mereka tidak memahami budaya dan kebiasaan ditempat baru.
- Pengungsi tidak siap untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, integrasi lokal menjadi lebih sulit.
- Karena terpaksa, pengungsi tidak siap untuk mandiri di lokasi baru ("karena pemerintah yang memindahkan berarti pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencari lahan pertanian, membangun WC, dll").
- Melihat pola penghidupan, pola pengungsian dapat disesuaikan dengan sistem mata pencaharian pengungsi misalnya untuk PNS, nelayan, pedagang, petani, dll. Dengan beragam pola misalnya konsentrasi, sisipan, BBR, dll.

C. Penanganan Pengungsi Selama Ini

Pemerintah mendukung opsi untuk integrasi dengan masyarakat lokal dan melakukan pembongkaran kamp. Hanya saja, pemerintah tidak menaruh perhatian yang cukup pada proses intergrasi yang sebenarnya. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan:

- ✓ Fokus pemerintah lebih pada pemindahan dan pengosongan kamp seolah-olah persoalan pengungsi selesai jika pengungsi sudah keluar kamp.
- ✓ Pengungsi menolak pemukiman bagi pengungsi karena tidak adanya fasilitas yang layak dan jaminan integrasi sosial.

✓ Belum adanya 'kompensasi sosial' yang mendorong warga lokal penerima pengungsi, sehingga:
  - Masyarakat "*enggan*" hidup bersama dengan pengungsi dengan menolak negosiasi lahan, sumber daya lainnya.
  - Konflik antara masayarakat dan pengungsi makin tinggi karena perebutan akses sumber daya, seperti pendidikan, kesejahteraan umum, pangan dan air, lapangan kerja dll.

✓ Pengungsi memilih untuk bertahan hidup di kamp pengungsi karena:
  - merasa tidak ada pilihan lain.
  - ketergantungan pada pihak lain baik di dalam kelompok pengungsi, maupun pihak luar seperti TNI.
  - Sudah memiliki mekanisme *"coping"* untuk bertahan hidup di kamp (ada lahan, pekerjaan, hubungan baik dengan masyarakat lokal).
  - Kecewa pada pilihan yang ada karena hunian bagi pengungsi dipersiapkan dengan kualitas jelek.
  - Ada intimidasi dan paksaan.
  - Pilihan ideologi.

D. Resiko Bertahan di Kamp bagi Pengungsi

- Semakin melemahnya posisi kelompok rentan khususnya perempuan dan anak.
- Memburuknya situasi kesehatan, gizi dan pendidikan pengungsi.
- Ketegangan dan konflik antara lokal dan pengungsi meningkat karena perebutan akses sumber daya.
- Perusakan lingkungan hidup.
- Pemerintah dan TNI akan bersifat represif dalam menyelesaikan persoalan pengungsi, terutama untuk mengosongkan kamp.
- Masyarakat akan terpencar dalam kelompok kecil mengikuti arus lahan pertanian dan keterkaitan kultural/geografis.

E. Sikap Masyarakat Lokal

Sikap masyarakat lokal terbagi dua, yaitu yang menolak integrasi dan yang ikut membantu proses reintegrasi pengungsi, yang ditunjukkan dengan:

- Menuntut kembali hak-hak mereka atas lahan dan menegakkan aturan hidup bersama berdasarkan budaya lokal, baik melalui dialog maupun inisiatif 'pengusiran pengungsi'.
- Apatis dan berharap pada perubahan kebijakan PEMDA.
- Proaktif lakukan negosiasi karena keterkaitan historis dan kultural (Atambua, Betun).
- Menguatnya dukungan pemerintah lokal (desa-kecamatan) untuk pemukiman pengungsi.

Maria Filiana Tahu
Pemantau

Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Timor Timur

Di Pengungsian Timor Barat Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur

(Laporan Uji Coba Format Pemantauan)

Lokasi

- Kamp Noelbaki, Desa Noelbaki Kacamatan Kupang Timur.
- Kamp Tuapukan, Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur.
- Settlement 50 Raknamo, Desa Raknamo Kecamatan Meomafo.

Metode Pemantauan

- Diskusi kelompok terfokus. Fokus diskusi pada isu perempuan dan hak-hak perempuan pengungsi.
- Wawancara dengan perempuan-perempuan yang berkarya bagi komunitas seperti kader kesehatan, guru, aktivis gereja, inisiator pemukiman mandiri.

Jumlah Narasumber : 25 orang perempuan dengan pertimbangan asal daerah dan agama.
Waktu : 04 – 09 Des 2006
Dokumentator : 5 orang relawan Cis, 4 perempuan dan 1 laki-laki.

Pertimbangan Pemilihan Lokasi Pemantauan untuk Uji Coba

- Kamp Noelbaki merupakan wilayah tanah pemerintah; tempat pengungsian didirikan di atas fasilitas publik
- Kamp Tuapukan merupakan wilayah pengungsian yang 80% tanahnya merupakan tanah masyarakat lokal.
- Settlement 50 Raknamo, merupakan wilayah baru untuk memulai hidup baru sebagai warga baru dengan jaminan layanan administrasi desa. Pada tanggal 11 Januari 2006, 50 RT (rumah tangga) dengan jumlah perempuan 107 orang dan 97 orang laki-laki mengambil keputusan untuk memulai hidup baru di lokasi ini.

Informasi Umum

- Rata-rata mereka yang diwawancarai, telah menjalani hidup di pengungsian selama 7 tahun, sejak bulan September 1999.
- Bentuk hunian mereka berupa barak yang telah dihuni sejak tahun 1999, bekas gedung pemerintah seperti pos jaga, rumah dinas dan kantor, rumah darurat dari sisa terpal bantuan dan kayu-kayu bekas, rumah dinding bebak dengan atap daun lontar, dan rumah dinding beratap seng.
- Mereka berasal dari daerah berbeda di wilayah timur Timor-Timur (Lorosae); dari Kabupaten Dilli, Kabupaten Viqueque, Kabupaten Lospalos, Kabupaten Baucao, Kabupaten Aileu, dan Kabupaten Manatuto. Para perempuan yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka mengungsi karena kerusuhan dan ingin mencari rasa aman sementara. Ada juga yang mengatakan karena Timor-Timur telah keluar dari Indonesia dan mereka lebih memilih Indonesia. Lebih banyak lagi yang mengatakan, mereka mengungsi karena ikut suami dan keluarga besarnya. Sebagian lagi mengatakan, bahwa mereka mau mengungsi karena hal itu cuma sementara. Mereka ini adalah istri milisi yang dijanjikan rumah dan fasilitas sementara untuk keamanan dan kesejahteraan di pengungsian oleh tentara yang melatih suami mereka.

- Bahasa yang mereka gunakan: bahasa Tetum, Indonesia, Makasae dan Fataluku.
- Alasan pindah dari kamp ke settlement: ingin hidup mandiri, tidak ada kejelasan masa depan di kamp dan ada jaminan tersedianya tanah, rumah dan fasilitas KM/WC sendiri.

1. Akses Perempuan pada Bantuan Pokok

No	Jenis Bantuan	Bentuk	Pemberi	Waktu
1	Pangan sembako	Beras dan uang lauk pauk sebesar Rp.1500/jiwa/hari. Mi instan, ikan kaleng, biskuit, gula, garam, minyak goreng dan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil/menyusui.	Pemerintah Pemerintah, LSM, organisasi pemuda/pelajar, organisasi keagamaan.	2 tahun lebih sejak Sept 1999 – Des 2001. ± 6 – 8 kali diberi dalam kurun waktu 6 bulan.
2	Air bersih/ air minum	Tidak ada pemisahan air bersih dan air minum. Air disalurkan setiap hari dengan tangki ukuran 5000 ltr.	Pemerintah	3 tahun, sejak 1999 – Des 2002
3	Tempat berlindung, *shelter*	Barak, terpal, tali-temali, alat masak, sarana tampung air, selimut, kelambu, tikar, dan bantal.	Pemerintah, UNHCR, LSM lokal	Diberikan 1 kali pada waktu mendaftar sebagai pengungsi.
4	Ruang privat	Ruang privat khusus suami isteri atau khusus untuk perempuan tidak ada. Yang ada cuma ruang privat bagi keluarga di barak.	Pemerintah	Diberikan sekali saja namun terbatas karena kapasitas jumlah bangunan barak tidak cukup menampung semua pengungsi.
5	Sandang, termasuk pakaian dalam	Baju, celana, rok, daster; untuk anak-anak, orang dewasa perempuan dan laki-laki; bra, celana dalam.	LSM lokal, UNHCR, organisasi gereja.	Diberikan 1 kali pada waktu mendaftar sebagai pengungsi
6	Prasarana dan sarana sanitasi/ kebersihan	WC/KM umum, bak umum, jerigen angkat air, tempat sampah umum, sikat gigi, sabun mandi/cuci.	MSF, UNHCR, pemerintah, LSM, lembaga gereja	Diberikan 1 kali saja, kecuali sabun mandi dan sikat gigi sering diberikan pada waktu kegiatan anak.
7	Paket khusus perempuan	Pembalut	LSM	Diberikan cuma sekali.

Tanggapan para perempuan tentang distribusi bantuan pokok

Di kamp ini kita semua pernah rasa bantuan, walau tidak semua mendapatkannya, kalau ada orang yang tidak dapat bantuan biasanya kita rela bagi yang kita dapat. Cape sekali kalau hanya berkelahi terus dengan petugas karena soal nama penerima yang tidak tercantum. Yang jadi soal adalah para koordinator sering tipu data untuk dapat bantuan lebih.. (R, 30 tahun, Kamp Tuapukan)

Yang biasa ambil bantuan hanyalah laki-laki, tapi kita perempuan biasanya ikut, karena nama-nama orang Tim-Tim itu mirip. Kita ikut untuk memastikan. Tapi kita sering diusir oleh petugas dan orang-orang yang antri… coba kalau mereka daftar nama suami istri, mungkin lebih gampang … Dalam kegiatan bagi bantuan sering kacau..

Tentang ketersediaan bantuan pokok

Bantuan makanan yang paling banyak itu supermi, anak-anak pakai makan main-main. Kadang-kadang jadi tidak cukup, jadi hanya makan nasi kosong saja. Kita biasa minta daun-daun seperti daun ubi atau daun pepaya untuk buat sayur. Kalau tidak ada minyak kita rebus satu kali dengan beras. Kalau sudah begini, anak-anak tidak mau makan. Jadi kita harus beli lagi supermi untuk mereka.. (M, 35 tahun, Kamp Noelbaki)

Yang paling susah itu air, saya ingat dulu itu kita harus antri lama sekali supaya dapat air. (N, 24 tahun, Kamp Tuapukan)

Mens itu paling susah, kita biasa pakai kain tapi tidak ada kain, jadi kalau ada bantuan pakaian yang daster-daster kita potong kecil-kecil untuk buat kain pembalut.. (C, 30 tahun, Kamp Tuapukan)

…Pernah ada yang kasih bantuan pembalut yang pakai kapas itu, tapi kita tua-tua ini tidak biasa pakai, anak muda saja yang pakai… (R, Kamp Noelbaki)

Kami masuk settelement Raknamo cuma bawa makanan yang ada. Kita mau datang karena pemerintah janji mau kasih langsung jaminan hidup. Tapi saya kecewa sekali, ternyata harus tunggu lama baru dapat. Kasian anak-anak saya, mereka masih kecil, kalau orang dewasa memang masih bisa tahan sedikit.. (C, settlement Raknamo)

Saya melahirkan anak ke-7 dengan dibantu oleh suami saya, waktu itu hujan deras sekali bulan Desember 1999. Dengan alas tikar saja di atas tanah yang berlumpur di dalam rumah, saya melahirkan Jose. Tidak ada orang bantu kami, saya juga tidak tau mau menyuruh suami ke mana cari bantuan. Malam itu rasanya saya mau mati saja. Saya melahirkan Jose dengan selamat, tapi saya menangis terus dan tidak bisa diam, suami saya marah dan membentak saya supaya diam… (B, Kamp Tuapukan)

2. Akses Perempuan pada Layanan Dasar

No	Jenis bantuan yang diberikan	Bentuk	Pemberi	Waktu
1	Layanan kesehatan: Obat-obatan	Obat-obatan yang tersedia, obat flu, batuk, pilek, malaria, diare, vitamin dan obat penambah darah untuk ibu hamil. Ada pos pelayanan sementara. Ahli medis (dokter, perawat dan relawan terlatih) dan waktu pemeriksaan.	Pemerintah LSM Gereja	6 bulan. Sampai sekarang di Kamp Tuapukan ada layanan kesehatan gratis dari pemerintah tapi cuma menyediakan obat panas, batuk dan pilek, dan waktu pelayanannya dibuka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 12, kalau hari Jum'at hanya sampai jam 10.
2	Layanan konseling.	Tidak ada.	Tidak ada	Tidak ada
3	Layanan kesehatan reproduksi	Khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Pos pelayanan dan waktu pemeriksaan.	UNFPA, UNHCR, CD Bethesda, Cis, CWS	6 bulan
4	Layanan pendidikan formal dan non formal, termasuk pendidikan agama	Sekolah tenda tingkat TK-SD. Guru, kurikulum pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum formal, tempat belajar yang khusus dan waktu sekolah yang teratur.	JRS, CCF, Gereja	Untuk gereja berlangsung hingga sekarang. JRS selesai pada 2005 dan CCF masih membantu di settlement Oebelo hingga sekarang.
5	Layanan bantuan hukum	Hanya ada hukum adat (denda)	Kesepakatan adat	Berlaku sampai sekarang
6	Layanan administrasi kependudukan	Layanan KTP sementara dan KTP tetap, paspor, sertifikat tanah.		
7	Layanan peningkatan *skill* dan pengembangan ekonomi keluarga	Kursus gratis tukang kayu dan ukir, menjahit, dukungan motor perahu untuk kelompok nelayan.	CWS, UNHCR dan pemerintah	3 bulan.

Pengalaman perempuan berhubungan dengan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar

Perempuan yang sulit memperoleh layanan adalah kelompok lansia karena kebanyakan mereka tidak dapat berbahasa Indonesia.

Tidak tersedia layanan yang memadai bagi ibu hamil/melahirkan dan menyusui.
Dulu pernah ada makanan tambahan seperti susu, bubur kacang hijau untui ibu hamil/menyusui tetapi tidak lama. Kalau anak-anak sering dapat terus … sekarang ini ada posyandu, ibu hamil biasa datang untuk kontrol berat badan saja… (J, Kamp Tuapukan).

Sekarang ini, kalau sakit kita harus ke bidan di Polindes atau Puskesmas. Obat di bidan harus kita beli tidak ada yang gratis. Di Puskesmas enak, obat ada yang gratis kecuali infus kita harus beli, masalahnya kita harus bayar uang transport…

paling susah kalau harus rujuk ke rumah sakit umum, kita harus urus surat keterangan tidak mampu supaya dapat keringanan, tapi urus surat itu susah, tunggu sampai 1 minggu paling cepat… Kalau hanya sakit pilek, batuk, kulit, pusing atau sakit perempuan seperti luka di susu, kita pakai obat kampung saja. Tapi kalau malaria, diare baru kita beli obat… (R, Kamp Tuapukan)

Tentang layanan konseling: kalau suster atau relawan perempuan yang mereka kenal; yang ke kamp mereka bebas menceritakan masalah mereka.

Tentang layanan kespro: tidak ada penyuluhan kesehatan untuk laki-laki. Untuk alat KB mereka harus membeli, tapi kebanyakan suami mereka melarang untuk ikut KB, karena takut kalau ada pengaruh pada kesehatan di masa yang akan datang. *Pernah ada tetangga yang pakai suntik tapi dia tidak cocok, dia sering panas dan muntah-muntah dan suaminya suruh stop.* (A, Kamp Noelbaki).

Tentang layanan pendidikan: pada sekolah tingkat SD kelas 1 – 4, yang sangat dekat dengan lokasi kamp, ada pemisahan, anak lokal bersekolah pada pagi hari dan anak pengungsi bersekolah pada sore hari, demikian juga dengan gurunya, guru lokal dan guru pengungsi. Kebijakan ini dibuat oleh pihak sekolah karena ada kendala bahasa untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak pengungsi. Dampak dari kebijakan ini bagi anak perempuan pengungsi adalah mereka sering alpa sekolah karena kebanyakan membantu orang tua, antri mengambil air dan mencari kayu bakar di hutan – akibat langsungnya banyak dari mereka yang tidak naik kelas, menjadi malu dan akhirnya memilih untuk berhenti... M, 12 tahun, siswi SD GMIT mengatakan bahwa ia tidak bisa ke sekolah karena sering pada sore hari harus membantu orang tua bekerja di kebun, ketika ia protes, orang tuanya memukulnya dan mengatakan ia pemalas... *bapa suruh saya berhenti sekolah saja karena dia tidak punya uang dan ibu saya cuma diam…*

Tentang hukum adat (denda): Biasanya yang mengurus urusan denda adalah laki-laki, tidak ada perempuan yang dianggap layak untuk duduk bersama untuk memutuskan denda. Denda adat untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa; 1 ekor babi dan uang 1 juta rupiah untuk kekerasan terhadap istri, untuk kasus pemerkosaan; 1 ekor sapi dan uang 5-10 juta rupiah. Persoalannya adalah kebanyakan putusan dapat dikompromi dan ada aturan cicil, dan pihak korban harus menanggung semua biaya konsumsi selama proses adat berlangsung.

Tentang administrasi dan kependudukan: Walaupun sudah 7 tahun tinggal di tempat pengungsian, belum ada penetapan RT/RW atau lingkungan bagi wilayah domisili mereka. Untuk memegang kendali sosial pihak desa masih mengandalkan para koordinator kamp atau tokoh adat yang semuanya adalah laki-laki. Anak-anak di kamp, rata-rata belum memiliki Akta Kelahiran. Untuk pengurusan KTP, sampai kini masih cukup rumit karena mereka tidak terdaftar sebagai warga lingkungan. Kebiasaanya mereka biasa membayar langsung pada calo sebesar Rp. 40.000 - Rp. 50.000 lebih mahal dua kali lipat dari pengurusan lewat desa.– Seorang ibu mengaku, ia pernah membayar Rp. 100.000, karena ia sangat butuh untuk pengurusan paspor.

3. Akses Perempuan pada Fasilitas Bersama

No	Jenis fasilitas yang diberikan	Pemberi
1	Barak, MCK, Dapur umum, Sumber air/sumur. Penerangan, Tempat pertemuan, Tempat ibadah, Tempat sampah, Saluran pembuangan air limbah, Tempat olahraga. Fasilitas informasi; papan info, koran, selebaran, komunitas. Fasilitas transportasi bersama; jalan, kenderaan.	Pemerintah, MSF, Masyarakat lokal, lembaga agama, UNHCR, CIS, PIAR

Semua fasilitas ini tersedia, kecuali MCK yang jumlahnya terbatas, cuma ada 3-4 WC bagi 10 RT bahkan ada yang 20 RT dan hanya berada di lokasi barak, padahal jumlah barak yang tersedia tidak cukup menampung jumlah pengungsi.

Kelompok-kelompok yang tidak bisa mengakses fasilitas barak dan MCK adalah mereka yang datang kemudian setelah barak dihuni. Kebanyakan dari mereka yang menghuni barak adalah para TNI, PNS dan pensiunan yang mendapatkan jatah, hanya sebagian kecil yang sipil. Para sipil yang lain mendapatkan tenda untuk membangun pemukiman sementara dan membuat kamar mandi darurat.

Penerangan masih gratis bagi yang berada dalam lokasi kamp, namun tidak penerangan jalan. Di malam hari jarang terlihat perempuan berjalan sendiri atau berdua di luar rumah karena sering terlihat para-lelaki berkumpul main judi dan minum-minum, kecuali beramai-ramai jika ada pesta atau kegiatan gereja. Mereka yang tinggal di dekat masyarakat lokal (khususnya di Kamp Tuapukan) harus membayar Rp. 15.000/bulan pada tuan rumah dimana mereka menarik aliran listrik.

4. Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Jenis rapat/pertemuan perumusan dan atau pengaturan untuk pengambilan keputusan:
Dalam pembagian bantuan bagi pengungsi, layanan bagi pengungsi, penggunaan fasilitas bersama, pemilihan koordinator pengungsi/ketua lingkungan, keamanan lingkungan, penanganan kasus kekerasan/kejahatan, penyebarluasan informasi, pilihan dan pengaturan pemulangan atau pemindahan pengungsi, urusan keluarga.

Jenis pertemuan yang tidak pernah pernah diadakan adalah pertemuan yang membicarakan tentang penggunaan fasilitas bersama dan keamanan lingkungan. Perempuan akan hadir dalam pertemuan jika diundang tapi banyak kali mereka tidak diundang karena mereka dianggap hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga, mereka bukanlah kepala keluarga dan mereka tidak bisa bicara di depan umum. Biasanya perempuan hanya diminta untuk mendukung jalannya pertemuan dengan menyiapkan konsumsi.

Para lansia dan janda sipil tidak pernah diundang dalam pertemuan apapun karena mereka dianggap tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bisa mengikuti saja. Namun walaupun demikian dalam keseharian para perempuan sering berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting sehubungan dengan persoalan sosial yang mereka rasakan seperti: soal distribusi bantuan yang harus adil dan berpihak pada mereka yang lebih membutuhkan seperti janda, lansia, anak yatim piatu, soal koordinator yang korupsi bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan, soal pelaku kekerasan yang harus dipenjara, soal pulang ke Timor Leste, settelement dan rekonsiliasi para elit.

Perempuan yang sering ikut pertemuan-pertemuan; perempuan yang aktif di gereja, mahasisiwi, pernah jadi pemimpin regu persit, kader posyandu.

Alasan suara perempuan jarang atau tidak didengar;
- *…kita bukan pemimpin…* (O, Tuapukan)
- *…kita perempuan yang dianggap cerewet dan suka omong kosong.* (A, Noelbaki)
- *...kita belum banyak pengalaman…* (R, Tuapukan)
- *...mungkin dianggap hanya banyak protes.* (C, settlement Raknamo)
- *…takut berbeda dengan laki-laki dan biasanya membuat orang tidak suka kita.* (C, Tuapukan)

Prakarsa perempuan untuk menyikapi pembatasan partisipasinya dalam pertemuan adalah mereka mempengaruhi/mengajak sesama perempuan untuk lebih banyak hadir dalam setiap pertemuan, tapi prakarsa ini sering berbenturan dengan persoalan perempuan tidak punya waktu karena harus terus bekerja sepanjang hari.

5. Keterlibatan Perempuan dalam Kegiatan di Pengungsian/settlement

Jenis kegiatan/jabatan strategis untuk pengelolaan:
Dalam pembagian bantuan bagi pengungsi, layanan bagi pengungsi, penggunaan fasilitas bersama, pemilihan koordinator pengungsi/ketua lingkungan, keamanan lingkungan, penanganan kasus kekerasan/kejahatan, penyebarluasan informasi, perkumpulan warga, pilihan dan pengaturan pemulangan atau pemindahan pengungsi, bepergian ke tempat di luar pengungsian, urusan keluarga.

Semua kegiatan di atas pernah dilakukan bahkan hingga kini. Kecuali keamanan lingkungan, sejak pasca kerusuhan Januari 2000 di Kamp Noelbaki dan kerusuhan Mei 2000 di Tuapukan, kegiatan keamanan langsung diprakarsai oleh tentara. Hal ini berlangsung selama 1 tahun. Hingga kini situasi cenderung aman, hanya saja jika ada pesta/acara gereja yang berlangsung hingga malam hari dibentuk panitia keamanan dan sangat jarang perempuan dilibatkan.

Rata-rata perempuan menjabat posisi strategis pada kegiatan pelayanan kesehatan, pembagian bantuan makanan tambahan, bepergian ke Timor Leste untuk kunjung keluarga dan memantau aset keluarga serta sebagai agen rekonsiliasi aras bawah. Untuk kegitan yang lain mereka hanya terlibat secara praktis seperti membantu konsumsi, menghadiri undangan dan sebagai pembawa acara.

6. Rasa Aman atau Nyaman Perempuan di Pengungsian/settlement

1. Lokasi keamanan dalam melakukan aktifitas sehari-hari di kamar/tenda/barak/rumah, MCK, dapur umum, sumber air, tempat sampah bersama, tempat kegiatan warga, perjalanan keluar dari tempat pengungsian.

Konstruksi barak dan MCK yang rapuh dan berhimpitan kadang-kadang membuat perempuan, khususnya perempuan muda merasa tidak nyaman jika harus tidur siang saat rumah sepi. C, 23 tahun, Kamp Tuapukan terpaksa harus rela berkeringat jika harus tidur siang karena ia perlu memakai kain/selimut untuk menutupi sekujur tubuhnya atau ia harus menggunakan celana panjang. Kalau mau mengganti pakaian, M, 21 tahun (Kamp Noelbaki) sudah terbiasa untuk menengok kesana-kemari supaya merasa pasti tidak ada laki-laki yang mengintip atau sekedar lewat dari pinggir kamarnya.

Terkait dengan penerangan; *lampu di rumah selalu dinyalakan sampai pagi… kalau listrik mati (padam) saya selalu memeluk adik perempuan atau tidur dengan tante di sebelah rumah* (M, 17 tahun, Kamp Noelbaki). *Tidak ada perempuan yang berani jalan malam sendirian, kalau ada pasti dia lari-lari saja…* (O, Tuapukan)

Terkait jarak rumah dengan kebun dan hutan; *untuk pergi ke kebun atau mencari kayu api kita perempuan tidak boleh jalan sendiri, berduapun dengan sesama perempuan itu tidak boleh, karena pernah ada kasus seorang janda tua hampir diperkosa ketika pulang dari kebun. Sebaiknya kita pergi rame-rame…* (S, Kamp Tuapukan)

Perempuan yang paling banyak bekerja untuk mengambil air. Hampir setiap hari mereka harus berhadapan dengan omelan dari masyarakat lokal pemilik sumur. Ini sering terjadi pada musim panas karena debit air yang berkurang.

Saya pikir hidup di settlement akan jauh lebih tenang, tapi ternyata tidak… kami perempuan ternyata harus lebih hati-hati… (ibu dari korban pemerkosaan oleh tetangganya di lokasi settlement)

2. Aspek keamanan; kejadian kriminalitas/kejahatan/dan gangguan sosial dalam komunitas pengungsi/settlement: pencurian/perampokan, pemerasan/pungli, perkelahian/pemukulan, orang mabuk yang agresif, prostitusi bawah umur, prostitusi paksa, perjudian.

   - Kejadian kekerasan/kerusuhan di komunitas pengungsi secara umum: penyerangan oleh komunitas lain, razia oleh aparat/kelompok bersenjata lainnya, pembakaran tempat pemukiman, isu teror bom.
   - Kejadian kekerasan terhadap perempuan pengungsi di komunitas pengungsi: pengintipan dan pelecehan seksual lainnya, perdagangan perempuan, perkosaan, penyerangan seksual lainnya, pencegahan, gangguan dan/atau pembubaran kegiatan perempuan.
   - Kejadian kekerasan terhadap perempuan pengungsi di dalam keluarga: KDRT, kawin paksa, *incest*/perkosaan.

O, seorang janda pensiunan mengaku bahwa rumahnya sering kecurian, mulai dari burung nuri peliharaannya, uang sampai perhiasan. Kejadian ini terjadi setiap kali ia bepergian ke Kabupaten Atambua untuk mengambil uang pensiunan. *…Saya tidak pernah tahu siapa pelakunya dan para tetanggapun tidak tahu…*

Terkait dengan issu, *waktu Aceh kena tsumani, yang paling kita takut bukan lagi kerusuhan tetapi tsunami, karena kami ini tinggal dekat dan sejajar dengan laut. Waktu itu tanggal 4 Januari 2005, ada orang teriak "air laut naik, air laut datang!", saat itu sudah malam sekitar jam 8 dan listrik mati. Kami semua lari ke atas sambil berteriak panik, sampai-sampai orang mati yang akan dikubur esok hari ditinggal begitu saja. Ternyata tidak ada apa-apa…* (berbagai sumber)

Para perempuan yang sering ke Timor Leste, memantau perkembangan bahaya kerusuhan Dilli dari situasi di perbatasan Mota'ain, jika perbatasan ditutup maka mereka tidak akan masuk, tapi jika dibuka, mereka akan tetap masuk.

Terkait pembatasan ekspresi perempuan: R, sering bersuara keras dalam forum pertemuan. Ia tidak banyak disukai oleh orang, ia dinilai sebagai perempuan yang suka banyak omong, meskipun ia membuka les matematika dan membaca gratis di rumahnya pada hari libur.

Kekerasan oleh suami/bapak terhadap istri dan anak perempuan sering terjadi. Mereka sering dimaki dengan suara keras dan juga sering dimarahi di depan umum. M, 40 tahun, mengatakan sudah lama ia ingin kembali ke Timor Leste tapi suaminya malah menuduh dia sudah punya suami di sana. Ia dipukuli dan dianiaya karena tidak bisa memberikan anak laki-laki dan ia hanya bisa menangis melihat 4 anak perempuan sering dipukul oleh suaminya tanpa alasan yang jelas. Penderitaannya semakin menjadi karena suaminya ternyata ketahuan selingkuh dengan tetangganya yang sudah bersuami. Hingga kini ia hanya bertahan, dia memilih bekerja keras dengan berdagang di pasar sepanjang hari untuk menghidupi 4 anaknya. Belakangan suaminya mulai terlihat sering membantunya di pasar.

Kasus perkosaan dan *incest* di kamp yang pernah terjadi dilakukan oleh laki-laki yang dikenal; tetangga, paman dan bapak kandung.

Terkait dengan orang yang suka mengganggu/mengancam atau mengintimidasi perempuan.
Beberapa perempuan mengatakan nama-nama laki-laki yang suka mengganggu ketika mereka jalan sendiri. Salah satunya adalah germo yang mengijinkan kegiatan prostitusi di rumahnya (Kamp Tuapukan). Tidak ada perempuan yang akan lewat dari rumahnya walaupun saat mengangkat air beramai-ramai.

3. Aspek keamanan; kehadiran aparat keamanan negara, kehadiran kelompok, kelompok bersenjata/milisi, kehadiran kelompok pamswakarsa, kehadiran preman, kelompok lainnya.

Terkait kebijakan/peraturan yang berdampak langsung pada perempuan.
Pada tahun 2003 perempuan pedagang sayur yang berjualan di sepanjang Kamp Tuapukan harus berhadapan dengan sekelompok tentara yang menghancurkan jualan mereka pada sekitar jam 10 pagi. Para tentara ini melaksanakan perintah Danrem untuk menertibkan pinggiran di sekitar ruas jalan Timor Raya. Semua bangunan jenis apapun harus berjarak 10 meter dari ruas jalan. Dengan tanpa bicara, para tentara ketika tiba di tempat jualan, langsung menghancurkan apa saja yang ada. Mereka sama sekali tidak peduli dengan tangisan dan teriakan para perempuan pedagang. Hingga akhirnya lebih dari 30 orang perempuan berdemonstrasi menuntut ganti rugi di depan gedung Korem. Mereka hanya mendapatkan Rp. 100.000 dan disuruh bubar. Banyak dari mereka yang tidak merasa puas tapi tidak berdaya.

Kebijakan bantuan BBR dan terminasi yang berhubungan dengan pengurusan surat-surat untuk pemenuhan prosedur penerimaan; seringkali terjadi pungli oleh para koordinator, karena perempuan tidak tahu letak kantor pemerintahan dan bagaimana cara mengurusnya, selain itu juga karena mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Beberapa janda mengaku harus membayar Rp. 10.000 per hari sebagai uang transportasi untuk pengurusan surat, belum lagi jika ada yang harus difotokopi. Setelah itu mereka terikat perjanjian dengan koordinator untuk membayar komisi dari bantuan yang diterima.

Pada tahun 2003 beberapa perempuan mengorganisir diri untuk mengurus bantuan bagi pasangan kawin campur (pengungsi dan masyarakat asli NTT). Ketika bantuan akan cair, beberapa tokoh masyarakat lokal dan pengungsi membubarkan mereka karena dituduh berencana korupsi.

Meri Djami
Pemantau

Pemantauan di Maluku tentang

HAM Perempuan di Kamp Pengungsian

1. THR

▶ Informasi Umum

Wawancara	: tgl 9 Januari 2007 dan 6 Februari 2007
yang dihadiri oleh	: 11 orang ibu-ibu
Nama dokumentator	: Baihajar Tualeka
Jenis Kelamin	: Perempuan
Organisasi	: LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Tempat Tinggal dokumentator	: Pengungsian di luar lokasi pemantauan.
Nama lokasi pemantauan	: Kamp THR, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.

▶ Informasi Dasar

Mereka mengungsi karena konflik sosial, sejak tahun 1999. Bentuk hunian yang mereka tempati adalah barak di atas tanah milik pemerintah. Pengungsi berasal dari Kudamati, Airsalobar, Kudamati, Waringin.

→ Jumlah pengungsi sekitar 18 KK, pasangan menikah 12 KK, duda/orang tua tunggal 2 orang, perempuan kepala keluarga ada 4 orang, janda meninggal 2 orang, janda cerai 2 orang. Perempuan hamil dan melahirkan 1 orang, menyusui 2 orang.

→ Profesi perempuan pedagang 16 orang, asongan 5 orang, pekerja rumah tangga/pembantu 1 orang, pensiunan 1 orang, sedangkan profesi laki-laki 18 orang buruh bangunan, 2 orang ojek.

→ identifikasi potensi pengungsi: ibu-ibu merasa lewat pengajian mereka sangat kuat, kumpul bersama dalam kelompok diskusi, *sharing* bersama dalam *support group*. Ibu-ibu selalu terlibat dalam kegiatan perempuan terutama yang terkait dengan penguatan. Ada pula diskusi mingguan yang difasilitasi oleh LAPPAN sejak tahun 2002. Ada beberapa tokoh pengungsi perempuan yang selalu berjuang untuk penegakan HAM dalam komunitas yang selalu aktif dalam melakukan berbagai kegiatan dalam kamp atau biasanya menjadi pendamping bagi teman mereka yang menjadi korban kekerasan.

▶ Akses Perempuan

Bantuan pokok: sejak tahun 1999-2003 pengungsi merasa mendapat bantuan mulai dari jadup, papan, sandang, alat sanitasi, paket khusus perempuan. Bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bagi pengungsi namun dirasakan sangat terbatas adalah masalah paket khusus perempuan. Kadang-kadang pembalut yang diberikan kualitas rendah dan pakaian dalam terbatas. Ada yang mendapat bantuan, ada yang tidak kebagian. Bantuan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kelurahan membantu memberikan data administrasi dan pengurusan akte kelahiran anak serta KTP. Beberapa lokal NGO, seperti LAPPAN, membantu anak-anak dari pendidikan, psikososial bagi komunitas, serta membuka akses untuk komunitas dengan pihak lain, dan INGO seperti ACF memberikan bantuan beras selama beberapa tahun; MSF memberikan bantuan air bersih dan klinik kesehatan; MCI memberikan peralatan mandi dan dapur serta menyediakan barak sementara dalam gedung; CARDI menyediakan tarpal, selimut serta peralatan dapur. NGO Nasional seperti JRS memberikan bantuan peralatan sekolah bagi anak-anak; PKM memberi bantuan sandang, papan, pangan dengan bekerjasama dengan komunitas. Adapula bantuan dari media seperti RCTI dan SCTV Pundi Amal,

dan Dana Kemanusiaan KOMPAS yang membantu memberikan peralatan sekolah anak-anak dan menyediakan peralatan bermain anak. Bantuan dari lembaga agama dan individu sulit diingat satu persatu oleh ibu-ibu. Selama ini, bantuan selalu diberikan lewat kordinator kamp yang selanjutnya akan dibagikan berdasarkan data yang ada. Kordinator akan mengumumkan lewat *megaphone*, selanjutnya pengungsi dapat mengambil bantuan di POSKO yang telah disediakan. Dalam posko ada beberapa orang yang bekerja untuk mengkordinir bantuan, namun sering didominasi oleh laki-laki. Kadang-kadang bantuan yang jumlahnya sedikit sangat sulit dibagikan sehingga diprioritaskan pada kelompok tertentu atau diambil oleh kordinator kamp dan staf. Ibu-ibu mengeluhkan kordinator kamp selalu berlaku kurang adil sebab lebih memprioritaskan keluarganya. Beberapa ibu-ibu mengatakan mereka beberapa kali tidak dapat bantuan karena dianggap tidak terdata, padahal sama-sama mengungsi namun bedanya mereka menumpang di rumah keluarga. Pembagian bantuan sering menyebabkan pertengkaran atau kecemburuan sosial, karena pembagian tidak berdasarkan kebutuhan melainkan lebih mengutamakan pemerataan sehingga yang tidak membutuhkan pun akan tetap mendapat bantuan. Ada pula bantuan yang diberikan sudah kadaluwarsa terutama mi instan yang diberikan oleh Dinas Sosial.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam akses bantuan terutama terhadap janda, meskipun mereka terdaftar. Alasannya, anak mereka sudah dapat bantuan. Hal yang sama dialami oleh perempuan orang tua tunggal yang dianggap tidak pantas dapat bantuan karena tidak mempunyai suami. Perempuan cacat fisik atau mental juga mengalami perlakuan serupa. Diskriminasi terhadap perempuan memburuk setelah kordinator perempuan diganti laki-laki. Akibat lainnya, rata-rata bantuan yang masuk ke dalam kamp belum sensitif gender, sehingga perlu diberikan rekomendasi bagi pihak pemerintah atau pihak mana pun untuk memperhatikan keterlibatan perempuan serta persoalannya.

Bantuan yang tidak tersedia adalah ruang privasi padahal laki-laki tidak mau tahu situasi. Kalaupun mau melayani perempuan merasa sangat malu dan tidak nyaman karena ruangan sangat terbuka. Bila ditolak, suami akan marah, memukul, mencaci-maki, bahkan berselingkuh. Kadang-kadang mereka gunakan kamar mandi untuk melakukan hubungan suami istri, namun sering diintip. Kalau yang merasa mampu biasanya pergi mencari penginapan yang murah. Beberapa kali di kamp mereka mematikan lampu agar suami istri bisa berhubungan seksual. Namun, ada saja orang yang iseng mengintip, atau tiba-tiba anak-anaknya bangun atau ada orang yang lewat. Perempuan merasa sangat malu dengan kondisi ini.

▶ Fasilitas Bersama

Fasilitas bersama tersedia terkecuali pasar dan sarana hiburan bersama. Namun ini tidak menjadi masalah karena lokasi pasar sangat dekat dan pengungsi memiliki TV sendiri. Persoalan fasilitas misalnya MCK. Ibu-ibu bercerita hampir sepanjang waktu ada di sumur untuk mencuci atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Untuk itu, mereka mereka tidak nyaman jika harus menggunakan fasilitas MCK bersama-sama laki-laki. Apalagi pada saat menstruasi dan masa nifas. Kadang-kadang laki-laki mengintip perempuan yang sedang mandi. Laki-laki juga kurang begitu memperhatikan kebersihan MCK, sementara perempuan yang selalu membersihkan MCK. Perempuan merasa tak berdaya untuk memprotes hal ini, karena dominasi laki-laki sangat kuat. Akhirnya MCK cepat rusak karena tidak ada yang peduli. Seorang ibu menuturkan, *"kesalahan adalah ketika MSF memberikan bantuan MCK perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses. Oleh karena itu, lembaga donor harus diberikan pemahaman sensitif gender dalam distribusi bantuan. Lihat saja MCK itu sudah rusak, siapa yang mau perbaiki? Selama ini kami tidak pernah dilibatkan sehingga rasa memiliki tidak ada."*

▶ Pelibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Pertemuan dalam Kamp pengungsian THR sering kali melibatkan ibu-ibu. Ada beberapa perempuan, bahkan janda, yang selalu mewakili keluarganya hadir untuk mendengar informasi. Sebagian kecil ibu-ibu dianggap

mampu menyuarakan aspirasi perempuan dan selalu diberikan kesempatan. Kadang-kadang perempuan hanya dipakai sebagai tameng untuk tampil di depan publik dalam memperjuangkan hak pengungsi misalnya mengurus BBR dan lobi bantuan bagi komunitas. Sebagai tameng, mereka dilibatkan sebatas lobi saja, dan tidak lagi dilibatkan ketika realisasi bantuan. Dalam proses pemilihan koordinator dan menjaga keamanan perempuan ikut terlibat. Namun, ada anggapan bahwa pekerjaan perempuan adalah menyediakan konsumsi bagi pos jaga malam. Untuk pertemuan tertentu, perempuan diberikan kesempatan berbicara namun usul tersebut selalu ditolak oleh laki-laki. Pertemuan semacam ini biasanya berakhir dengan protes akibat suara perempuan kurang didengarkan. Padahal, pengalaman di THR menunjukkan bila perempuan yang menjadi koordinator, distribusi bantuan berjalan lebih adil, administrasi dan data kamp akurat. *"Sekarang siapa yang bertanggung jawab dengan kami? Pemerintah katakan pengungsi sudah selesai di THR, bahkan kami akan diadukan ke pihak polisi. Herannya pemerintah mau mengajukan masyarakatnya di polisi. Apa salah kami sebagai pengungsi?"* Tutur ibu S.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan Pengungsian

Mereka berkumpul dalam majelis taklim, membentuk kelompok dakwah, kelompok diskusi, tarik tambang, group bola voli, senam dan karaoke bersama, lomba-lomba lainnya serta ikut terlibat dalam aksi sosial seperti kampanye damai dan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, aksi memperjuangkan akses atas Bahan Bangunan Rumah, dan ikut serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LSM ataupun pemerintah. Banyak kegiatan dalam komunitas yang diprakarsai oleh ibu-ibu, serta didukung oleh komunitas seperti menjelang hari kemerdekaan dan hari-hari keagamaan.

▶ Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Tahun 2007 banyak pencuri dan orang mabuk. Masalah kesehatan juga mencuat, seperti sampah, air bersih dan MCK yang sudah rusak dan tidak terawat. Ada pula beberapa ibu-ibu yang merasa diancam oleh oknum tertentu. Sekarang masyarakat lokal sangat baik terhadap pengungsi THR yang tersisa ini. Dulu tahun 2003, terjadi perkelahian antara pemuda lokal dengan pengungsi sehingga barak-barak dilempar dan mau dibakar, namun segera diatasi oleh polisi. Tahun 2005, Detasemen 88 datang dan mengancam pengungsi karena dianggap sebagai teroris. Ibu-ibu merasa takut, karena ada ibu yang ditangkap oleh Detasemen 88. Sebagian besar kasus diselesaikan pihak yang berwajib ada pula lewat RT.

▶ Kasus Diskriminasi terhadap Perempuan

Beberapa perempuan bertutur mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan terutama yang berkaitan dengan masalah bantuan, antara lain:

1. Dalam proses pengurusan BBR. Sejumlah janda selalu mendapat tekanan dari pihak Dinas Sosial, terutama pada saat survei titik rumah. Perempuan diinterogasi dengan pertanyaan yang tidak masuk akal, bahkan oleh Kepala Dinas Sosial mereka dituduh melakukan penipuan tempat tinggal dan karenanya, akan dilaporkan ke polisi. Tuduhan ini disampaikan sekalipun sudah ada informasi dari ketua RT lama bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal mereka. Ada juga perempuan yang diintimidasi oleh polisi dan tentara.
2. Ada pula unsur penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan iming-iming memberikan bantuan kepada kaum perempuan tetapi bantuan tersebut tak kunjung datang.
3. Perempuan yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya selalu ditekan dan diteror oleh pihak- pihak tertentu (misalnya, pihak yang mengurus BBR).

▶ Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, lihat laporan daerah.

2. 2. Waringin

▶ Informasi Umum

Wawancara	: tgl 2 Januari 2007 dan 7 Februari 2007
yang dihadiri oleh	: 20 orang ibu-ibu
Nama dokumentator	: Ema Sugianti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Organisasi	: LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Tempat Tinggal dokumentator	: di lokasi pemantauan.
Nama lokasi pemantauan	: Kamp Waringin, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.

▶ Informasi Dasar

Mereka mengungsi karena konflik sosial, sejak tahun 1999. Bentuk hunian yang mereka tempati adalah rumah di atas tanah sendiri. Mereka dulu mengungsi di THR berasal dari waringin dan kembali ke lokasi asal pada tahun 2005.

→ Jumlah pengungsi sekitar 275 KK, pasangan menikah 274 KK, duda/orang tua tunggal 4 orang, perempuan kepala keluarga ada 10 orang, janda meninggal 5 orang, janda cerai 4 orang. Perempuan hamil dan melahirkan 5 orang, menyusui 10 orang.

→ Profesi perempuan pedagang 250 orang, asongan 20 orang, pekerja rumah tangga/pembantu 10 orang, sedangkan profesi Laki-laki 267 orang buruh bangunan, 50 orang ojek, 6 sopir angkot, 4 orang PNS.

→ Identifikasi potensi pengungsi: ibu-ibu merasa lewat pengajian majelis taklim mereka menjadi sangat kuat, selalu terlibat dalam kegiatan perempuan yang difasilitasi oleh LAPPAN. Beberapa kali ikut terlibat dalam aksi sosial. Kelompok perempuan di sini sangat kuat, termasuk ibu-ibu kader posyandu.

▶ Bantuan Pokok

Sejak tahun 1999-2004 pengungsi merasa mendapat cukup bantuan mulai dari jadup, papan, sandang, alat sanitasi. Paket khusus perempuan kurang tersedia sehingga pada saat menstruasi, sebagian perempuan menggunakan kain bekas untuk pengganti pembalut. Pengungsi di sini berasal dari THR yang pindah di tahun 2005.

▶ Fasilitas Bersama

Fasilitas bersama yang tersedia seperti jalan raya dan air bersih. Sejumlah pengungsi tidak bisa memperoleh air minum karena saluran PAM dirusak warga atau karena habis disedot dengan mesin. Karena sangat dekat dengan pasar, sampah menjadi masalah utama. Meskipun sudah ada gerobak oleh dinas kebersihan tetapi saluran got kotor karena warga membuang sampah di dalam got.

Distribusi bantuan hampir tidak pernah melibatkan perempuan, bahkan sangat tertutup dan ada indikasi korupsi. Bantuan untuk pemberdayaan pengungsi misalnya, masing-masing orang berhak mendapat bantuan 4 juta, namun sampai di tangan ibu-ibu hanya Rp. 1.800.000. Ibu-ibu merasa kesulitan memperjuangkan haknya karena lurah dan RT-RT ikut terlibat dalam hal ini. Kebanyakan perempuan mengusulkan bahwa pemerintah jangan hanya memberikan bantuan namun harus mempunyai standar etik yang jelas dalam pengelolaan program sehingga perempuan tidak diabaikan begitu saja, seakan-akan mereka bukan manusia dalam komunitas. Beberapa janda merasa adanya diskriminasi terhadap diri mereka. Padahal saat pemilihan RT perempuan dipanggil untuk ikut terlibat, tetapi saat realisasi bantuan mereka sudah tidak dilibatkan lagi

▶ Pelibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Pertemuan biasanya diumumkan lewat mesjid. Warga tidak memiliki ruang pertemuan. Pada saat hari raya Idul Adha, perempuan tidak dilibatkan dalam pertemuan. Panitia yang terbentuk adalah laki-laki semua. Seksi konsumsi

adalah ibu-ibu; seperti biasanya perempuan disandingkan dengan peran domestik. Pada saat ada bantuan jalan dan pagar, yang terlibat hanya beberapa pihak laki-laki. Perempuan merasa kaget ketika sudah ada pekerjaan jalan raya oleh suami mereka atau laki-laki lainnya. Padahal ibu-ibu di sini sangat kuat dan berinisiatif tinggi. Semua bantuan yang masuk ke dalam kamp ini adalah lobi dari ibu-ibu, mulai dari bantuan bahan bangunan rumah sampai pada bantuan pengembangan komunitas.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan Pengungsian

Mereka berkumpul dalam majelis taklim, membentuk kelompok dakwah, kelompok diskusi, lomba masak, serta ikut terlibat dalam aksi sosial seperti kampanye damai dan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, aksi berjuang untuk mendapatkan BBR (Bahan Bangunan Rumah), dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LSM ataupun pemerintah. Banyak kegiatan dalam komunitas yang diprakarsai oleh ibu-ibu, serta didukung oleh komunitas seperti menjelang hari kemerdekaan dan hari-hari keagamaan.

▶ Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Para perempuan yang ikut dalam diskusi ini mengatakan bahwa "belajar dari konflik tahun 2004", kehadiran orang mabuk dan isu-isu tertentu selalu membuat mereka takut. Sekarang apabila ada yang mabuk, ibu-ibu melapor pada pihak yang berwajib. Judi juga semakin berkurang karena ibu-ibu melaporkan ke polisi akibat kuatir akan memicu kekerasan. Pelaporan ini dibuat sejak adanya penguatan hukum bagi perempuan dan komunitas. *"Dulu kami tidak mengerti hukum. Kami selalu takut… setelah perempuan paham hukum maka akses ke polisi dirasakan sangat mudah… Anehnya polisi kurang respon terhadap kasus. Misalnya, ada orang mabuk beberapa waktu lalu. Ketika kami melapor ke polisi, ternyata tidak direspon. Padahal dia sudah melempar dan merusak mobil orang lain. Esoknya kami tindak lanjuti sampai dia ditangkap. Harapan kami, pelaku diberikan pembinaan untuk tidak mengulang lagi tindakannya,"* ujar seorang ibu.

▶ Kasus Diskriminasi terhadap Perempuan

Beberapa perempuan bertutur mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan terutama yang berkaitan dengan masalah bantuan selalu diperlakukan kurang adil, antara lain:

1. Akses mendapatkan bantuan. Sebagian besar perempuan pengungsian merasa adanya diskriminasi karena perempuan tidak mendapatkan hak-haknya dalam bantuan, misalnya sembako, BBR, dan bantuan peningkatan ekonomi perempuan. Beberapa janda menuturkan bantuan yang mereka dapat selalu dipotong oleh pihak pemberi bantuan dalam hal ini Dinas Sosial, Lurah atau Koordinator.
2. Akses bantuan yang diberikan selalu tidak transparan. Pengambilan data yang dilakukan oleh Ketua RT kurang memperhatikan perempuan pencari nafkah utama dan janda. Ketua RT selalu memprioritaskan keluarganya sehingga menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap RT dan menimbulkan kecemburuan sosial.

2.3. Belakang Kota

▶ Informasi Umum

Wawancara	: tgl 4 Januari 2007 dan 9 Februari 2007
yang dihadiri oleh	: 8 orang ibu-ibu
Nama dokumentator	: Ema Sugianti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Organisasi	: LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Tempat Tinggal dokumentator	: pengungsi di luar pemantauan.
Nama lokasi pemantauan	: Kamp Belakang Kota, Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

▶ Informasi Dasar

Mereka mengungsi karena konflik sosial, sejak tahun 1999. Bentuk hunian yang mereka tempati adalah rumah di atas tanah pemerintah. Mereka berasal dari lokasi yang sangat berbeda-beda, beberapa kepala keluarga yang sudah mendapat bantuan pemerintah bahkan sudah pindah di daerah gunung malintang.

→ Jumlah pengungsi sekitar 85 KK, pasangan menikah 75 KK, duda/orang tua tunggal 1 orang, perempuan kepala keluarga ada 6 orang, janda meninggal 4 orang, janda cerai 2 orang. Perempuan hamil dan melahirkan 6 orang, menyusui 4 orang.

→ Profesi perempuan pedagang 80 orang, asongan 20 orang, pekerja rumah tangga/pembantu 4 orang, sedangkan profesi laki-laki 45 orang buruh bangunan, 35 orang tukang becak, 10 orang ojek, 1 sopir angkot, 1 orang pensiunan tentara.

→ Identifikasi potensi pengungsi: ibu-ibu merasa sangat sibuk untuk jualan, bahkan sampai tidak mempunyai waktu untuk penguatan diri mereka. Ada beberapa ibu-ibu yang selalu memberikan pembinaan spritual kepada ibu-ibu lainnya. Kebanyakan kasus kekerasan dalam komunitas selalu melibatkan ibu-ibu dalam proses penyelesaian masalah. Mereka lebih merasa nyaman apabila penyelesaian kasus lewat ibu-ibu karena kordinator laki-laki selalu mabuk dan juga pelaku kekerasan. Ada sejumlah ibu-ibu yang selalu membela pengungsi perempuan dan aktif dalam menyuarakan hak-hak perempuan.

▶ Bantuan Pokok

Sejak tahun 1999, pengungsi di Belakang Kota merasa tidak pernah mendapat bantuan dalam bentuk apapun. Hal ini karena fokus bantuan pemerintah selalu terkonsentrasi pada kamp-kamp yang besar saja. Mereka hanya pernah mendapat bantuan barak yang disediakan oleh pemerintah dengan ukuran 2 x 3 meter. Bantuan khusus untuk perempuan selalu mereka upayakan sendiri. Dulunya mereka hanya memiliki 2 potong pakaian dalam yang mereka langsung cuci. Kondisi ini menyulitkan ketika menstruasi. Karena tidak ada pembalut, mereka menggunakan pakaian bekas pengganti pembalut.

▶ Layanan Dasar

Masalah kesehatan kurang menjadi perhatian, apalagi kesehatan reproduksi bagi perempuan. Seorang ibu menuturkan, *"Lihat, anak kami sangat banyak. Kami [mau] memasang alat kontrasepsi [tetapi] sangat mahal… Rp.75.000, padahal kami tidak mempunyai uang… untuk pengurusan surat sehat bagi masyarakat miskin selalu mengalami diskriminasi dari Kelurahan. Kebanyakan ibu-ibu adalah pelaku ekonomi keluarga. Pekerjaan suami mereka sebagai buruh dan tukang becak namun uang yang didapatkan oleh suami mereka hanya dihabiskan untuk mabuk dan judi. Kalau kami tidak bekerja, anak-anak kami mau makan apa? Biaya pendidikan anak-anak dari mana? Kami juga tidak bisa makan. Sehari-harinya kami makan dari hasil dagangan."*

▶ Fasilitas Bersama

Fasilitas MCK dan air bersih disediakan oleh MSF. Karena tidak dikelola oleh warga dengan baik, fasilitas bersama ini sudah rusak dan banyak bolong-bolongnya. Perempuan menjadi tidak nyaman menggunakan fasilitas bersama ini, karena diintip oleh laki-laki dewasa dan orang mabuk. Selain itu, saluran got di daerah ini sangat kotor. Kamp pengungsian ini memang sangat tidak layak untuk dihuni. Karena dekat dengan pasar, kondisinya jorok dan orang asing mudah masuk keluar kamp.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Jarang ada pertemuan dalam kamp kecuali guru mengaji yang mengumpulkan ibu-ibu untuk memberikan siraman rohani. Ketua RT yang anggota TNI jarang datang ke kamp. Bahkan ada salah satu pensiunan TNI selalu mabuk dan membuat kekacauan dalam kamp, namun tidak ada yang berani melawan. Ada seorang perempuan guru ngaji anak-anak yang selalu berjuang untuk masalah perempuan yang selalu didengarkan suaranya.

Setiap ada masalah dalam kamp, ia yang dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan. Akhir-akhir ini, ibu-ibu mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan terutama yang terkait dengan penguatan komunitas.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan Pengungsian

Kegiatan dalam kamp ini selalu diprakarsai oleh guru mengaji dan murid-muridnya. Kegiatan bersama adalah menjelang Ramadhan dan hari raya besar keagamaan serta hari kemerdekaan.

▶ Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Ibu-ibu mengatakan bahwa mereka merasa sangat terganggu dengan kehadiran orang mabuk dan judi yang merajalela. Selama ini ibu-ibu sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib namun tidak ditanggapi. Padahal, jarak kamp ini dari pos polisi hanya 20 meter.

▶ Kasus Diskriminasi terhadap Perempuan

Beberapa perempuan bertutur mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan terutama yang berkaitan dengan bantuan. Mereka selalu diperlakukan kurang adil, bahkan hampir-hampir tidak mendapatkan apapun. Untuk akses BBR, mereka mengalami kesulitan karena prosedurnya tidak mereka pahami. Kondisi ini mendorong mereka untuk lebih mandiri dan *survive,* menghindari ketergantungan.

2.4. ARBES (Air Besar)

▶ Informasi Umum

Wawancara	: tgl 5 Januari 2007 dan 8 Februari 2007
yang dihadiri oleh	: 21 orang ibu-ibu
Nama dokumentator	: Bai Tualeka
Jenis Kelamin	: Perempuan
Organisasi	: LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Tempat Tinggal dokumentator	: pengungsi di luar pemantaun.
Nama lokasi pemantauan	: Kamp THR (II) Arbes, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

▶ Informasi Dasar

Mereka mengungsi karena konflik sosial, sejak tahun 1999. Bentuk hunian yang mereka tempati adalah rumah di atas tanah tanah sendiri. Mereka berasal dari lokasi yang sangat berbeda-beda. Daerah ini biasanya dijuluki THR II karena sekitar 175 KK dari THR pindah ke lokasi ini. Komunitas ini lebih memilih opsi relokasi ketimbang pulang karena tidak merasa aman dan nyaman di rumah lama (sebelum konflik).

→ Jumlah pengungsi sekitar 175 KK, pasangan menikah 170 KK, duda/orang tua tunggal 3 orang, perempuan kepala keluarga ada 7 orang, janda meninggal 2 orang, janda cerai 4 orang. Perempuan hamil dan melahirkan 9 orang, menyusui 7 orang.

→ Profesi perempuan pedagang 120 orang, asongan 30 orang, pekerja rumah tangga/pembantu 2 orang, sedangkan profesi laki-laki 60 orang buruh bangunan, 20 orang tukang becak, 15 orang ojek, 4 sopir angkot, 3 orang pensiunan PNS dan 8 orang PNS.

→ Identifikasi potensi pengungsi: ibu-ibu merasa tidak mempunyai aktivitas selain mengurus keluarga dan berjualan. Sangat berbeda ketika mereka masih di THR dulu, ada diskusi. Ibu Ketua RT berjuang untuk membela HAM Perempuan, beberapa ibu sangat aktif dalam mengambil inisiatif untuk melakukan advokasi dengan pihak lain dan beberapa ibu terlibat dalam partai politik.

▶ Bantuan Pokok

Hampir mirip dengan THR, lokasi pengungsian ini difasilitasi oleh pemerintah. Tanah yang mereka tinggali saat ini dapat menjadi hak milik. Inilah yang membuat cemas pengungsi. Ukuran tanah adalah 10 x 15 meter dan pengungsi sudah melunasi tapi uangnya dibawa lari oleh oknum. Ibu-ibu sangat cemas karena bila tanah menjadi sengketa mereka tak tahu bagaimana bisa mendapat uang untuk melunasinya lagi. Awalnya, ibu-ibu merasa sulit beradaptasi dengan lokasi baru ini, terutama karena transportasi sangat mahal, tidak ada listrik dan jalan raya, air bersih sulit, sekolah anak-anak jauh, dan fasilitas kesehatan tidak ada. Pengungsi kemudian membangun jalan raya dan mengupayakan listrik sendiri. Karena kamar mandi belum ada, mandi dan cuci dilakukan di sungai. Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi perempuan karena harus bergabung dengan laki-laki.

▶ Fasilitas Bersama

Fasilitas bersama yang tersedia adalah air minum dari PDAM. Perempuan merasa terbebani karena harus bayar mahal namun air kurang tersedia.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Pertemuan warga jarang ada. Beberapa bulan yang lalu telah dipilih Ketua RT, semua calon adalah laki-laki. Perempuan jarang terlibat dan suara mereka jarang didengarkan.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan Pengungsian

Kegiatan dalam kamp ini diprakarsai oleh perempuan dalam bentuk membuka akses untuk pendidikan anak-anak *(play group)* dan pengajian anak-anak.

▶ Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Ibu-ibu merasa terganggu dengan orang mabuk dan masalah tanah yang dianggap sengketa.

2.5. Waiheru BIP

▶ Informasi Umum

Wawancara	: tgl 6 Januari 2007 dan 9 Februari 2007
yang dihadiri oleh	: 20 orang ibu-ibu
Nama dokumentator	: Manan Tualepe dan Neni
Jenis Kelamin	: Laki-laki dan perempuan
Organisasi	: LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Tempat Tinggal dokumentator	: Pengungsi di luar pemantuan.
Nama lokasi pemantauan	: Waiheru BIP Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.

▶ Informasi Dasar

Mereka mengungsi karena konflik sosial, sejak tahun 1999. Bentuk hunian yang mereka tempati adalah rumah di atas tanah tanah sendiri. Mereka berasal dari lokasi yang sama adalah Waitatiri.

→ Profesi perempuan pedagang 120 orang, asongan 30 orang, pekerja rumah tangga/pembantu 2 orang, sedangkan profesi laki-laki 60 orang buruh bangunan, 20 orang tukang becak, 15 orang ojek, 4 sopir angkot, 3 orang pensiunan PNS, 8 orang PNS. Jumlah pengungsi sekitar 43 KK, pasangan menikah 40 KK, duda/orang tua tunggal 1 orang, perempuan kepala keluarga ada 1 orang, janda meninggal 1 orang, janda cerai 2 orang. Perempuan hamil dan melahirkan 2 orang, menyusui 2 orang.

→ Profesi perempuan pedagang asongan 42 orang, petani 40 orang, sedangkan profesi laki-laki 40 orang buruh bangunan, 2 sopir angkot.

→ Identifikasi potensi pengungsi: ibu-ibu di sini adalah petani penggarap lahan. Ada sejumlah ibu yang aktif menyuarakan hak-hak perempuan. Hampir semua ibu terlibat dalam diskusi komunal penguatan perempuan yang dilakukan oleh LAPPAN. Inisiatif ibu-ibu sangat tinggi.

▶ Bantuan Pokok

Pengungsi belum pernah mendapat bantuan dari pihak manapun sejak mengungsi. Kebanyakan kebutuhan sehari-hari diupayakan oleh ibu-ibu sendiri. Mereka merasa belajar dari konflik, dalam situasi seperti ini mereka mampu bertahan dan menghindari ketergantungan dari pihak lain. Bagi mereka, anak-anak harus tidak putus sekolah karena pendidikan sangat penting. Kekerasan jarang terjadi, masalah dalam kamp selalu melibatkan perempuan dalam proses penyelesaian.

▶ Fasilitas Bersama

Sungai menjadi sumber air minum dan untuk keperluan MCK. Perempuan merasa sangat tidak nyaman karena saat mandi mereka bergabung bersama dengan laki-laki. Anak-anak perempuan merasa sedih kalau menstruasi karena harus ke sungai untuk membersihkan kotoran. Ibu-ibu yang mengalami masa nifas juga mengalami hal yang sama. Di saat mandi, ada laki-laki iseng yang suka mengganggu anak-anak perempuan. Sejauh ini, bantuan pemerintah hampir tidak ada, bahkan jalan raya dan listrik tidak ada.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan keputusan

Pengungsi di kamp ini selalu mendengarkan suara perempuan. Inisiatif perempuan untuk pertemuan sangat tinggi. Mereka membahas masalah kamp, BBR, dan masalah pendidikan anak-anak.

▶ Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan Pengungsian

Kegiatan perempuan dalam kamp adalah membentuk kelompok diskusi untuk membahas isu-isu yang dianggap bermanfaat bagi warga.

▶ Rasa Aman dan Nyaman Perempuan di Pengungsian

Ibu-ibu merasa terganggu dengan pihak luar yang selalu datang melakukan teror, terutama mengancam komunitas untuk tidak menjaga sungai agar mereka bisa mengambil batu dan pasir untuk dijual.

Pemantauan Pada Masa Tanggap Darurat

Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi

Data diambil dari tgl **10 Agustus** s/d **24 November 1999** (catatan individu)
Pengambil Data : **Sr. Brigitta Renyaan PBHK**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Organisasi : **GPP (Gerakan Perempuan Peduli)**

I. Informasi Dasar

1. Data Lokasi Pengungsian			
Nama Lokasi : ***Novisiat PBHK***		Kabupaten/kota	: ***Ambon***
Desa/Kelurahan	: ***Batu Merah, Aharu, dan Air Besar***	Propinsi	: ***Maluku***
Kecamatan	: ***Sirimaw***	Kode Area Pengungsi	: (diisi kemudian saat *entry* data)

2. Penyebab terjadinya pengungsian:
   - Bencana sosial, yaitu ***konflik bersenjata/ perang antar kampung/perang SARA/kebakaran/pengusiran paksa oleh kelompok perusuh***
3. Lama mengungsi ***4 bulan, atau sejak tanggal 10 Agustus 1999 s/d 24 November 1999***
4. Bentuk Hunian Sementara (Huntara): ***Bukan di tanah milik sendiri, yaitu di gedung/tempat pembinaan calon-calon biarawati PBHK milik para biarawati PBHK Maluku***
5. Asal pengungsi: ***dari daerah berbeda-beda,*** yaitu dari daerah Ahuru yang meliputi RT.03, RT.04 dan RT.07, dan dari Air Besar Komplek STAIN yang terdiri dari RT.05 dan RT.06

6. Jumlah Pengungsi

Jumlah KK ***183*** unit
Pasangan menikah : ***169*** orang
Janda/Kepala keluarga/orang tua tunggal : ***15*** orang
Perempuan Kepala Keluarga : ***1*** orang

Unit ukur	*Dewasa*		*Anak-anak*	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
> 65 thn	-	-		
>18 – 65 thn	-	-		
> 5 – 17 thn			-	-
≤ 5 thn			-	-
Berkebutuhan khusus (fisik)	1 (lumpuh)	-	-	-
Berkebutuhan khusus (mental)	-	-	-	-
Penyakit kronis	-	-	-	-
Stigma sosial	-	-	-	-
Hamil & melahirkan	2		-	
Menyusui	5		-	

7. Durasi/lamanya pengungsian ini dianggap dalam "masa tanggap darurat": **± 6 bulan, Durasi "Masa Tanggap Darurat" bagi kami di Ambon dan khususnya daerah Ahuru ini tergantung situasi; bisa hari, bisa bulan, namun tidak lebih dari 1 tahun. Para pengungsi dalam 1-2 bulan pindah lagi ke lokasi baru akibat penyerangan kelompok tertentu.**
8. Mekanisme koordinasi penanganan pengungsi yang ada saat ini:
   a. Para perempuan mengakses bantuan sandang dan pangan (sembako) dan berdialog bersama untuk kenyamanan perempuan dan keluarganya serta mengelola dan mentransformasi keadaan yang tidak nyaman menjadi nyaman bagi semua orang, terutama bagi perempuan dan anak.

b. Laki-laki membantu aparat keamanan saat itu, Armed 11 Ranggelang dan Marinir, untuk mempertahankan diri dan menjaga keselamatan perempuan dan anak saat terjadi penyerangan.

c. Ada wakil perempuan yang ikut mengambil keputusan dan sumbang saran solusi dalam rapat-rapat antara aparat keamanan, ketua-ketua RT, RW, dan wakil-wakil pengungsi setiap minggu pertemuan.

d. Ketua RT.04 dan para pengungsi sepakat di saat masa tanggap darurat sebagai koordinator adalah seorang tokoh perempuan yang dibantu oleh 2 - 3 orang ibu. Selalu ada dialog antara perempuan dan laki-laki, termasuk aparat TNI.

Catatan tambahan :

- **Dalam konteks konflik Maluku, pengungsi terpisah berdasarkan kelompok agama. Sebagian besar dari pengungsi di sini beragama Kristen. Ada satu keluarga beragama Islam yang ikut di dalam pengungsian ini. Perempuan pengungsi berinisiatif menghubungi polisi untuk mengantarkan mereka ke daerah yang lebih aman bagi mereka.**
- **Ada dua orang ibu yang sedang hamil dan menyusui. Anak-anak mereka dipelihara oleh ibu-ibu yang lain ketika terjadi penyerangan ke komunitasnya.**
- **Tidak terdapat keluhan kesehatan yang berat selama pengungsian ini karena lingkungan pengungsian bersih dan jauh dari polusi.**

A. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN										
Jenis Bantuan	*Ketersediaan Bantuan (✓)*		*Kondisi Bantuan (✓)*					*Akses Perempuan (✓)*		*Informasi terkait lainnya* (lembaga pemberi bantuan, cara pembagian bantuan; informasi tentang perempuan yang sulit memperoleh bantuan & alasannya; inisiatif pengungsi, khususnya perempuan menyikapi keterbatasan bantuan)
			Kualitas		Kuantitas/jumlah					
	Ada	Tdk Ada	*Baik (layak pakai)*	*Buruk*	*Cukup*	*Kurang*	*Berlebihan*	*Mudah*	*Sulit*	
Pangan. (a.l.; beras/sejenisnya, mi instan, minyak goreng, gula, garam, susu, lauk pauk, bumbu dapur, alat-alat dapur).	✓		✓					✓		**Yayasan Rinamakana, *Crisis Center* Keuskupan Amboina, SATKORLAK, Suster-suster PBHK, ACF, Mercy Corps.**
Air (bersih dan minum).	✓		✓					✓		**Sumber air dan saluran disediakan Novisiat PBHK.**
Tempat tinggal darurat/tenda (termasuk alas tidur/selimut/kelambu/ obat nyamuk).	✓		✓					✓		**Ada 21 kamar tidur yang digunakan bersama 1-3 keluarga. Ada juga ruang studi digunakan 10 atau lebih keluarga.**
Ruang tertutup untuk suami-istri.		✓							✓	**-**
Pakaian (baju luar dan dalam, serta pakaian relevan lainnya seperti baju hangat, jilbab dan sarung).		✓						✓		**Pakaian-pakaian mereka tidak terbakar, masih dapat diselamatkan sehingga kebutuhan dapat terpenuhi walaupun tidak ada bantuan dari luar.**
Alat Sanitasi & Kesehatan (alat mandi, sikat gigi&odol, sabun cuci, sapu, sikat & alat untuk kebersihan lainnya).	✓							✓		**Dalam situasi tanggap darurat, ada kerja sama perempuan pengungsi dengan biarawati di lokasi ini sehingga kebersihan dan alat-alat mandi terjamin baik.**
Jadup atau bentuk bantuan berupa uang lainnya.	✓							✓		**Beras dan uang makan dari TNI yang bertugas di daerah Novisiat ini. Pengaturan bantuan diserahkan kepada perempuan.**

A. AKSES PEREMPUAN PADA BANTUAN (Lanjutan)										
Jenis Bantuan	*Ketersediaan Bantuan (✓)*		*Kondisi Bantuan (✓)*					*Akses Perempuan (✓)*		*Informasi terkait lainnya* (lembaga pemberi bantuan, cara pembagian bantuan; informasi tentang perempuan yang sulit memperoleh bantuan & alasannya; inisiatif pengungsi, khususnya perempuan menyikapi keterbatasan bantuan)
			Kualitas		Kuantitas/jumlah					
	Ada	Tdk Ada	*Baik (layak pakai)*	*Buruk*	*Cukup*	*Kurang*	*Berlebihan*	*Mudah*	*Sulit*	
Paket Khusus Perempuan (BH, pembalut, paket ibu hamil dan melahirkan, termasuk makanan tambahan).		✓								**Khusus makanan tambahan bagi anak-anak ditangani Yayasan Rinamakana dan kacang hijau untuk ibu-ibu ditangani *Crisis Center* Keuskupan**

B. AKSES PEREMPUAN ATAS LAYANAN/FASILITAS							
Jenis Layanan/Fasilitas	*Layanan/ Fasilitas (✓)*		*Kondisi (✓)*		*Akses Perempuan (✓)*		*Informasi terkait lainnya* (lembaga pemberi bantuan, cara pembagian bantuan; informasi tentang perempuan yang sulit memperoleh bantuan & alasannya; inisiatif pengungsi, khususnya perempuan menyikapi keterbatasan bantuan)
	Ada	Tdk Ada	Baik	Buruk	Mudah	Sulit	
Informasi	✓		✓		✓		**Telpon, TV dan koran lokal tersedia di Novisiat. H.T. disediakan oleh *Crisis Center* keuskupan untuk pengungsian.**
Transportasi		✓		✓		✓	**Transportasi lumpuh total sehingga perempuan harus berjalan kaki naik turun gunung menempuh jarak yang jauh dan tidak aman.**
Layanan Kesehatan	✓		✓		✓		**Pelayanan teratur dari kelompok suster/perawat Katolik yang berada pada Yayasan St. Lukas/*Crisis Center* Keuskupan.**
Layanan Kesehatan Reproduksi (KB, layanan ibu hamil, melahirkan & menyusui)							**Perempuan pengungsi harus pergi ke puskesmas dan RS untuk layanan kesehatan reproduksi.**
Layanan Konseling							**Perempuan korban yang berinisiatif untuk penanganan trauma dengan konseling. Perempuan mengekspresikan diri lewat gambar-gambar untuk anak-anak.**
Advokasi kasus kekerasan	✓		✓		✓		**Perempuan kreatif dalam mencari solusi.**
Hukum						✓	**Di saat itu hukum tidak jalan; konflik melumpuhkan semua.**
Administrasi (KTP, Akte, dll)							**Para pengungsi lebih mengutamakan keselamatan diri dari pada KTP dan Akte.**
MCK	✓		✓		✓		**Semua MCK di Novisiat PBHK digunakan oleh para pengungsi dibagi, untuk perempuan dan anak perempuan; laki-laki digabungkan dengan aparat TNI.**
Sumur/Sumber Air	✓		✓		✓		**Perempuan menggunakan dengan leluasa dan mengatur penggunaannya**
Penerangan	✓		✓		✓		**Perempuan yang menentukan dan mengatur penghematan.**
Sanitasi/Tempat Sampah/ Pembuangan Limbah	✓		✓		✓		**Sudah tersedia dengan baik; digunakan dan dipelihara kebersihannya oleh perempuan.**
Saluran air/*drainase*	✓		✓		✓		**–**
Fasilitas bersama lainnya, yaitu ruang doa untuk shalat dan kapel	✓		✓		✓		**- Ruang doa/kapel digunakan para pengungsi dan aparat yang katolik.** **- Disediakan tempat shalat bagi aparat yang muslim.**

C. PERLINDUNGAN RASA AMAN BAGI PEREMPUAN PENGUNGSI					
Lokasi/ Situs/Ranah	*Tempat Tinggal*	*MCK*	*Lingkungan*	*Keluarga*	*Mobilitas dan Komunikasi*
Persoalan/keluhan perempuan pengungsi	✓ **segan karena bagi mereka tempat ini sakral (biara).**		✓ **ada kelompok bersenjata/-preman.** ✓ **kekerasan terhadap perempuan.** ✓ **sering terjadi penyerangan.**	✓ **kekerasan terhadap anak perempuan.** ✓ **terpisah dari keluarga.**	✓ **adanya larangan berpergian oleh aparat/kelompok bersenjata lainnya.** ✓ **merasa was-was kalau berpergian sendiri.** ✓ **transportasi umum jarang.** ✓ **biaya transportasi cukup mahal.** ✓ **telefon umum/wartel jauh dari tempat tinggal.**
Informasi terkait lainnya (lokasi yang dianggap rawan bagi perempuan pengungsi, isu atau kejadian yang meresahkan pengungsi, khususnya perempuan; prakarsa/inisiatif untuk meningkatkan rasa aman pengungsi, khususnya perempuan)	◉ **Lokasi ini jauh dari keramaian dan jauh dari perumahan penduduk. Perempuan dan anak selalu merasa terancam, penuh ketakutan bila ada penyerangan.** ◉ **Pernah terjadi kesalahpahaman antara perempuan pengungsi dengan seorang komandan regu pada pos penjagaan di kompleks pengungsian ini. Oknum tentara ini mengancam dan terjadi perang mulut antara keluarga perempuan dengan tentara ini. Dari kelompok perempuan, muncul beberapa perempuan yang memediasi dan menyelesaikan masalah dengan damai tanpa kekerasan.** ◉ **Perempuan berinisiatif bila terjadi pemblokiran jalan. Semua pengungsi diarahkan untuk tidak bepergian sendirian atau bila ke kota harus dengan lebih 5 orang dengan menempuh jalan setapak.** ◉ **Perempuan di pengungsian ini berani mendatangi kelompok-kelompok yang sedang bertikai untuk bernegosiasi.**				

D. AKSES PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN						
Jenis Keputusan/ Isu yang dibahas	**Musyawarah/ Membahas Isu (✓)**		**Keterlibatan Perempuan (✓)**			**Informasi terkait lainnya** *(alasan musyawarah/diskusi tidak pernah dilakukan, alasan perempuan tidak diajak ikut atau tidak didengar pertimbangannya, informasi tentang perempuan yang tidak pernah diajak berunding & alasannya; inisiatif pengungsi, khususnya perempuan, agar pertimbangannya didengarkan)*
	Ada	Tidak Ada	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	
Pengelolaan fasilitas bersama (dapur umum, MCK, air bersih)	✓		✓			**Bila dialog dengan kelompok besar/campuran, perempuan yang hadir mewakili dan vokal sehingga ide perempuan didengar dan diterima.**
Penentuan bantuan yang dibutuhkan	✓			✓		**Perempuan mengusulkan kepada koordinator pengungsi dan diteruskan kepada NGO, LSM, Satkorlak, dll.**
Pengaturan penyaluran bantuan	✓		✓			**Perempuan ikut mengatur agar tidak timbul kecemburuan atau ketidakadilan.**
Pengaturan keamanan lingkungan	✓		✓			**Perempuan lewat wakilnya ikut mengatur strategi dalam mengelola keamanan lingkungan.**
Pemilihan ketua lingkungan/koordinator pengungsi	✓			✓		**Tidak semua perempuan pengungsi berani bersuara dan tampil.**
Persoalan lainnya di lingkungan pengungsian	✓			✓		**Perempuan muda/anak gadis yang dekat dengan aparat dengan cara ikatan saudara angkat kadang salah ditafsir oleh perempuan/sesama lain dan menimbulkan isu yang tidak benar.**

Kasus

Kekerasan & Diskriminasi terhadap Perempuan di Pengungsian

A. Kasus KDRT 1

1. Korban	Nama	: **001_A**
	Nama orang tua	: Ayah : **001_A** Ibu : **001_A**
	Tempat tanggal lahir (atau umur)	: **001_A**
	Alamat tinggal	: **Gonzallo Veloso Karpan (Tempat Pengungsian)**
	Pekerjaan/jabatan	: **Tukang cuci/Ibu RT** Etnis/suku : **Kei** Agama: **Katolik**
	Status perkawinan	: **Kawin**
	Jumlah anak dalam tanggungan	: **5** Usia masing-masing tanggungan **5 – 10 th**
	Jumlah tanggungan di luar anak	: - Usia masing-masing tanggungan -
	Keterangan lain	: -
2. Pelaku	Jumlah pelaku	: **1 orang**
	Nama	: **001_A**
	Umur/tempat tanggal lahir	: **Seram** Jenis Kelamin : **Laki - laki**
	Alamat tinggal (lengkap)	: **Gonzallo Veloso (Tempat Pengungsian)**
	Pekerjaan/jabatan	: **Tukang Becak** Etnis/suku : **Seram** Agama : **Katolik**
	Status perkawinan	: **Kawin**
	Hubungan pelaku dengan korban	: **Suami - istri**
3. Kejadian/ Peristiwa	Pemukulan terjadi saat bertengkar antara suami-istri di Gonzallo Veloso pada sore menjelang malam. Pemukulan ini diawali dengan adu mulut. Pertengkaran sebetulnya sudah berlangsung selama satu minggu berturut-turut karena korban curiga suaminya/pelaku berselingkuh. Kecurigaan muncul karena hasil kerja pelaku tidak diserahkan penuh kepada korban. Akibat pemukulan itu, wajah korban menjadi memar.	

4. Dampak/Akibat Peristiwa pada Korban	
Fisik	Muka membengkak dan memar.
Psikologis	Depresi. Korban membalas kekerasan fisik kepada sang suami dengan mencoba memotong kaki sang suami. Akibatnya, kaki suami harus dijahit di RSU Ambon dan ia dirawat 1-2 hari di Rumah Sakit.
Seksual	-
Ekonomi	Kegiatan korban sehari-hari sebagai tukang cuci terhenti. Suami korban juga tidak dapat mendayung becak. Akibatnya, ekonomi keluarga ini terganggu.
Sosial (termasuk pendidikan, dan penerimaan masyarakat pada korban)	Korban menerima sikap sinis masyarakat akibat membuat luka sang suami. Bahkan ada yang menilai korban melawan sang suami, bahkan melukainya.

5. Tanggapan/ tindakan	Apakah peristiwa ini sudah dilaporkan ke aparat keamanan, pejabat pemerintah setempat, atau pihak lain yang dianggap mampu menolong? **Sudah (ya)** Bila ya, siapa yang melaporkan, kapan dan kepada siapa? **Yang melaporkan adalah perempuan di lokasi pengungsian dan dilaporkan kepada Pastor, suster dan Ketua RT.** Apa tanggapan pihak yang memperoleh laporan? *(Tindakan apa yang diambil, kapan, dan apa dampaknya bagi korban dan pelaku)* **Diadakan pembinaan/pendampingan kepada korban dan pelaku oleh petugas pastorar konseling untuk berdamai.** **Mereka juga mendapat bantuan berupa biaya pengobatan dari YKM-PBHK.** Bila tidak, apa alasan kasus tidak dilaporkan?
6. Saksi	Peristiwa pertengkaran dan pemukulan terhadap korban disaksikan oleh banyak orang karena mereka sama-sama mengungsi di aula. Begitu juga dengan balas dendam korban.
7. Pelapor	Tidak ada.
8. Dokumen pendukung	Tidak ada.
Kejadian ini terjadi di tempat pengungsian dan sudah melewati 1-2 tahun lalu. Saat ini, mereka telah kembali ke lokasi perumahan perkampungan. Istri kembali jadi tukang cuci dan suami tetap sebagai tukang becak. Hubungan suami istri lebih baik, lebih saling menghormati dan lebih giat bekerja bersama dalam meningkatkan ekonomi taraf hidup keluarga. Mengingat kembali peristiwa kekerasan tersebut, baik suami maupun istri, menertawakan kebodohan mereka.	

B. Kasus KDRT 2

1. Korban	Nama	: **002_A**
	Nama orang tua	: **002_A** Ibu : **002_A**
	Tempat tanggal lahir (atau umur)	: **Ambon, 26 th**
	Alamat tinggal	: **Gonzallo Veloso Karpan (Tempat Pengungsian)**
	Pekerjaan/jabatan	: **Tukang cuci/Ibu RT** Etnis/suku : **Kei** Agama: **Katolik**
	Status perkawinan	: **Kawin**
	Jumlah anak dalam tanggungan	: **1** Usia masing-masing tanggungan : **5 – 10 th**
	Jumlah tanggungan di luar anak	: **3** Usia masing-masing tanggungan : **22, 18, 16**
2. Pelaku	Jumlah pelaku	: **1 orang**
	Nama	: **002_A**
	Umur/tempat tanggal lahir	: **Ambon, 30 th** Jenis Kelamin : **Laki - laki**
	Alamat tinggal (lengkap)	: **Perumahan Andreas, Belakang Goa, Air Besar**
	Pekerjaan/jabatan	: **Buruh Kasar** Etnis/suku : **Kei** Agama : **Katolik**
	Status perkawinan	: **Kawin**
	Hubungan pelaku dengan korban	: **Suami - istri**

B. Kasus KDRT 2 (Lanjutan)

3. Kejadian/ Peristiwa	Pemukulan terjadi saat korban bertengkar dengan pelaku/suami korban di bulan Desember 2006, di dalam rumah keluarga di perumahan Andreas, Belakang Goa, RT.08/RW.17. Pertengkaran terjadi karena soal kesulitan ekonomi. Korban dipukul dengan tangan, wajah korban ditinju, disusul dengan tendangan keras pada perut dan dada korban. Akibatnya, korban merasa sesak nafas dan gangguan pada bagian dada.

4. Dampak/Akibat Peristiwa pada Korban	
Fisik	Pernafasan korban terganggu, rasa sakit dan nyeri pada tulang-tulang rusuk dan dada. Wajah memar. Selama 3 hari, korban berada di tempat tidur.
Psikologis	◦ Merasa minder karena penganiayaan terhadap dirinya diketahui banyak tetangga, ◦ Korban masih sakit hati terhadap suami dan tidak puas dengan penyelesaian yang sudah ditempuh, ◦ Masih ada rasa memberontak dan menyesal atas pilihannya menikah, ◦ Cenderung cuek dan menarik diri.
Seksual	Suami/pelaku sering memaksa istri berhubungan badan; bila istri menolak maka hasilnya kekerasan fisik.
Ekonomi	Ekonomi RT semakin memprihatinkan.
Sosial	Anak korban menganggap biasa perbuatan kekerasan ini.

5. Tanggapan/ tindakan	Apakah peristiwa ini sudah dilaporkan ke aparat keamanan, pejabat pemerintah setempat, atau pihak lain yang dianggap mampu menolong? **Sudah (ya)** Bila ya, siapa yang melaporkan, kapan dan kepada siapa? **Korban sendiri yang melaporkan kepada polisi.** Apa tanggapan pihak yang memperoleh laporan? **Kepolisian menanggapi serius dan segera menuju rumah pelaku untuk membawa ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Penangkapan ini dicegah oleh pastor paroki dan badan pengurus rukun serta RT setempat. Akibat intervensi ini, pelaku/suami lolos dari hukuman.**
6. Saksi	Banyak orang yang menyaksikan penganiayaan itu karena mereka tinggal dengan pengungsi lainnya di dalam aula.
7. Pelapor	Tidak ada
8. Dokumen pendukung	Tidak ada
9. Pengambil data	Nama : **Sr. Brigitta Renyaan PBHK** Nama organisasi : **GPP - YKM** Waktu mengambil data : **6 Maret 2007**

Informasi

Latar Belakang, Implikasi dan Opsi Pengungsian

Data diambil dari tgl - s.d. **6 Maret 2007**
Pengambil Data : **Sr. Brigitta Renyaan PBHK**
Organisasi : **GPP (Gerakan Perempuan Peduli)**

I. Informasi Dasar

1. Data Lokasi Pengungsian			
Nama Lokasi : ***Gonzallo Veloso & Kopertis Karang Panjang***		Kabupaten/kota	: ***Ambon***
Desa/Kelurahan		Propinsi	: ***Maluku***
Kecamatan		Kode Area Pengungsi	: (diisi kemudian saat *entry* data)

2. Penyebab terjadinya pengungsian:
   - Bencana sosial, yaitu **konflik bersenjata**
3. Lama mengungsi sejak **pecah konflik, Januari 1999**

A. Motivasi/Alasan Pengungsian

Pengungsian terjadi sejak awal kerusuhan di Ambon, 19 Januari 1999. Dua kelompok masyarakat berbeda agama saling serang dan melakukan pembakaran, pembunuhan dan penghancuran desa-desa serta tempat ibadah. Tidak ada stigma terhadap perempuan sebagai pemicu kerusuhan, tetapi justru perempuan yang menjadi target kekerasan kedua kelompok. Dalam konflik ini, aktor di tingkat elit maupun akar rumput terlibat. Bahkan perempuan dan anak-anak.

Sebelum pengungsian terjadi, ada banyak isu yang beredar bahwa akan ada serangan dari kelompok dengan agama yang berbeda. Isu ini direspon oleh pemeringah setempat dengan mengadakan dialog antara Gubernur dan semua tokoh agama dan masyarakat. Dalam dialog yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1998, gubernur meminta setiap tokoh agama untuk mendampingi umat masing-masing agar tidak terpengaruh dengan isu. Di bulan Desember, dialog serupa kembali digelar, tetapi kali ini terbagi dalam dua dialog terpisah berdasarkan latar belakang agama. Untuk penanganan pengungsi, sejak awal seorang pimpinan di Jakarta asal Ambon menggulirkan rencana relokasi.

B. Proses Evakuasi/Perjalanan Pengungsian

Awalnya, pengungsian ada di berbagai tempat seperti Ahuru, Air Besar, dan Batu Merah. Ada yang pergi dari rumah dan perkampungan tanpa membawa apapun karena mereka diusir paksa oleh perusuh dari kedua kelompok. Para pengungsi mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Ada yang tidur di hutan saat melarikan diri.

Pengungsi dari Buru harus meninggalkan sawah dan perkampungan yang sudah bertahun-tahn mereka kelola. Mereka meninggalkan Buru dengan kapal menuju Ambon. Bantuan evakuasi mereka peroleh

dari aparat keamanan. Ada lansia yang dibopong aparat karena ia tak kuat berjalan. Dalam evakuasi ini, ada pengungsi yang tertembak dan luka-luka akibat penyerangan. Pengungsi juga mengalami kelaparan. Bahkan, pengungsi yang lari ke hutan harus bertahan tanpa makan selama satu bulan. Kekuatan mereka peroleh dari seorang pendeta perempuan yang terus memberikan semangat kepada umatnya.

Perjalanan pengungsian penduduk dari RT.04-07 Ahuru dan Air Bersar berlanjut dari ke lokasi Novisiat ke Kapel Gereja Yacobus dan kemudian berjalan menuju Gonzallo Veloso. Karena Gonzallo juga diserang, mereka pindah ke Kota Ambon. Saat Kota Ambon juga diserang, para pengungsi mencari tempat berlindung di Gonzola dan seputar Kopertis Karang Panjang. Barak untuk pengungsi kemudian dibangun di Gonzallo. Ketika konflik mereda, dari barak inilah pengungsi berangsur-angsur kembali membangun perumahan di bekas perkampungan mereka yang sudah hancur.

Sebagian pengungsi masih tinggal di Barak Kebun Bunga, Kompleks Kopertis Karang Panjang. Mereka menunggu pembangunan rumah di tempat baru karena kampung mereka telah dihuni oleh pengungsi yang lain. Karena tidak bisa kembali ke kampung asal, mereka terpaksa menjual rumah dan tanahnya dengan harga yang murah.

C. Dampak Pengungsian pada Komunitas Lokal

Masyarakat lokal pada umumnya menerima pengungsi karena keprihatinan atas nasib sesama, meskipun tidak diinformasikan terlebih dahulu. Informasi baru mereka peroleh dari ketua RT/RW atau ketua lingkungan setelah pengungsi tiba. Masyarakat lokal menyediakan tanah untuk menampung pengungsi dan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan pengungsi.

Dampak positif dari interaksi antara pengungsi dengan warga lokal adalah adanya proses saling belajar, transformasi pengetahuan dan ketrampilan, dan interaksi lintas suku. Meskipun demikian, ada juga ketegangan antara pengungsi dan warga lokal akibat kecemburuan sosial. Ada warga lokal yang merasa hanya menjadi penonton saja padahal mereka juga mengalami dampak konflik, sementara pengungsi mendapatkan perhatian lebih dan bantuan.

Ketegangan ini coba diselesaikan secara bersama-sama melalui dialog dan sosialisasi kebiasaan masyarakat lokal kepada pengungsi. Dari dialog antar perempuan, muncul kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara bersama-sama.

D. Upaya Bertahan Perempuan Pengungsi

Perempuan berperan dalam mendorong dan melaksanakan rekonsiliasi dengan memberi semangat. Ada tiga perempuan yang vokal dalam menyuarakan kepentingan perempuan. Perempuan mau hadir dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. LSM, dan tokoh agama dalam membangun budaya damai. Perempuan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, termasuk untuk menentukan pilihan untuk masa depan pengungsian. Perempuan juga ikut dalam memprakarsai kegiatan *trauma healing* yang dilaksanakan oleh LSM, gereja, dan relawan kemanusiaan. Meskipun demikian, tidak semua pihak yang menangani pengungsi menanggapi secara positif keterlibatan aktif perempuan, bahkan ada yang tidak peduli dan sengaja meminggirkan perempuan.

E. Opsi/ Pilihan Perempuan Pengungsi			
Opsi	**Pulang ke tempat asal**	**Bertahan di tempat pengungsian**	**Pindah ke tempat lain/relokasi**
Faktor-faktor pendukung pengungsi perempuan memilih opsi tersebut.	◦ **rumah mereka akan dibayar kembali oleh pemerintah lewat bantuan bangunan rumah.** ◦ **tanah milik sendiri dan pengurusan sertifikat dibantu oleh Gereja/Yayasan Rinamakana.** ◦ **dapat memulai lagi usaha atau pekerjaan sebelum mengungsi.**	**-**	**-**

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat atas tanggung jawab negara atas tindak kekerasan terhadap perempuan menyusul perkosaan dan penyerangan seksual terhadap perempuan Indonesia etnis Tionghoa yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Komnas Perempuan sejak didirikan berdasarkan Keppres No. 181 pada tanggal 18 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Pepres No. 65 tahun 2005, telah berupaya menjalankan mandatnya lewat pendekatan yang holistik melalui program kerja; (a) pemantauan, (b) reformasi hukum dan kebijakan, (c) pendidikan dan kampanye, (d) pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dan (e) perlindungan bagi kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan mandatnya untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, Komnas Perempuan dituntut untuk tanggap dalam menangani sekaligus sigap dalam memahami perkembangan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Karenanya, Komnas Perempuan membutuhkan sebuah mekanisme yang lebih fleksibel untuk mampu mengeksplorasi, memberikan pemahaman yang komprehensif, sekaligus rekomendasi bagi penanganan yang lebih baik atas isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang muncul itu. Sebagai tanggapan, pada bulan Februari 2005 Komnas Perempuan menggagas sebuah mekanisme baru dalam struktur kerjanya yaitu Pelapor Khusus. Pada bulan Juni 2005, Komnas Perempuan mensahkan Pelapor Khusus untuk Aceh yang didukung oleh sebuah tim *ad hoc*, Gugus Kerja Aceh. Selain mendukung kerja Pelapor Khusus, Gugus Kerja Aceh juga melakukan pendokumentasian pengalaman kekerasan dan kerentanan perempuan pembela HAM dan advokasi kebijakan dan peraturan daerah Aceh.

Informasi lebih lanjut dan untuk memperoleh publikasi-publikasi Komnas Perempuan, hubungi:

Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari No. 4B
Jakarta 10310
Tel +62 21 390 3963
Fax +62 21 390 3922
Email : mail@komnasperempuan.or.id
www.komnasperempuan.or.id